



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu 2005 - 2025



***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Kota Palu***



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1.	Pengantar	I - 1
1.2.	Pengertian	I - 3
1.3.	Maksud Dan Tujuan	I - 4
1.4.	Landasan Hukum	I - 4
1.5.	Sistematika Penulisan	I - 7
1.6.	Kerangka Pikir Rpjpd Kota Palu 2005-2025	I - 8

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

1.7.	Aspek Geografi Dan Demografi	II - 1
1.8.	Karakteristik Lokasi Dan Wilayah	II - 1
1.9.	Potensi Pengembangan Wilayah	II - 15
1.10.	Wilayah Rawan Bencana	II - 30
1.11.	Aspek Demografi	II - 35
1.12.	Aspek Kesejahteraan Rakyat	II - 37
1.13.	Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi	II - 37
1.14.	Fokus Kesejahteraan Sosial	II - 40
1.15.	Fokus Seni Budaya Dan Olah Raga	II - 45
1.16.	Aspek Pelayanan Umum	II - 47
1.17.	Fokus Pelayanan Urusan Wajib	II - 47
1.18.	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II - 85
1.19.	Aspek Daya Saing Daerah	II - 97
1.20.	Kemampuan Ekonomi Daerah	II - 97
1.21.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II - 99
1.22.	Iklim Berinvestasi	II - 105
1.23.	Sumberdaya Manusia	II - 107

BAB III : ANALISIS ISU STRATEGIS

1.24.	Potensi Kota Palu Yang Menonjol	III - 1
1.25.	Isu, Masalah, Dan Harapan Warga Kota Palu	III - 3
1.26.	Isu Kota Palu Yang Menonjol	III - 4
1.27.	Masalah Kota Palu Yang Menonjol	III - 4
1.28.	Harapan Warga Kota Palu	III - 4
1.29.	Proses Panjang Lahirnya Visi Kota Palu	III - 5

BAB IV : VISI DAN MISI

1.30.	Visi Pembangunan Kota Palu 2005 – 2025	IV - 1
1.31.	Misi Pembangunan Kota Palu	IV - 3

BAB V : SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG DAERAH

5.1.	Mewujudkan Kota Palu Sebagai Kota Untuk Semua (<i>City For All</i>)	V - 1
5.2.	Tahapan Dan Skala Prioritas Rencana Pembangunan	
	Jangka Panjang Daerah	V - 3
5.2.1.	RPJM Daerah Kota Palu Tahap Pertama Tahun 2005 – 2009	V - 4
5.2.2.	RPJM Daerah Kota Palu Tahap Kedua Tahun 2010 – 2014	V - 4
5.2.3.	RPJM Daerah Kota Palu Tahap Ketiga Tahun 2014 – 2019	V - 5
5.2.4.	RPJM Daerah Kota Palu Tahap Ke Empat Tahun 2019 – 2024	V - 5
5.3.	Tantangan Pembangunan Kota Palu	V - 6
5.3.1.	Tantangan Ekonomi	V - 6
5.3.2.	Sumberdaya Manusia Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing	V - 7
5.3.3.	Degradasi Lingkungan Dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	V - 9
5.3.4.	Demokratisasi, Sosial Dan Penegakan Hukum	V - 11
5.3.5.	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Dan Tataruang Berkelanjutan	V - 13

BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

6.1.	Penyelenggaraan	VI - 1
6.2.	Organisasi Pelaksanaan Dan Sumber Pembiayaan	VI - 2
6.3.	Evaluasi Indikator Kinerja	VI - 3

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	:	Jumlah kelurahan, luas wilayah dan Ibu kota Kecamatan di Kota Palu -----	II - 1
2.	Tabel 2.2	:	Penyinaran Matahari, Curah Hujan dan Kecepatan Angin Pada Stasiun Meterologi Mutiara Palu Menurut Bulan Tahun 2010 -----	II - 11
3.	Tabel 2.3	:	Rata-rata Parameter Cuaca pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu menurut Bulan -----	II - 12
4.	Tabel 2.4	:	Luas Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Kota Palu -----	II - 13
5.	Tabel 2.5	:	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kota Palu -----	II - 16
6.	Tabel 2.6	:	Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan Kota Palu -----	II - 17
7.	Tabel 2.7	:	Luas Pola Pemanfaatan Ruang Menurut Fungsinya di Kota Palu -----	II - 18
8.	Tabel 2.8	:	Populasi Ternak Besar dan Kecil di Kota Palu Tahun 2006 – 2010 -----	II - 19
9.	Tabel 2.9	:	Populasi Ternak Unggas di Kota Palu Tahun 2006 – 2010 -----	II - 19
10.	Tabel 2.10	:	Produksi Perikanan di Kota Palu pada tahun 2007 – 2008 -----	II - 20
11.	Tabel 2.11	:	Produksi Perikanan Kota Palu tahun 2005-2009 -----	II - 20
12.	Tabel 2.12	:	Luas Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Kota Palu -----	II - 21
13.	Tabel 2.13	:	Lokasi dan Potensi Bahan tambang di Kota Palu -----	II - 23
14.	Tabel 2.14	:	Profil Kepariwisata Kota Palu -----	II - 26
15.	Tabel 2.15	:	Wilayah Kota Palu Rawan Gelombang Pasang Tsunami -----	II - 34
16.	Tabel 2.16	:	Jumlah dan Rasio Penduduk Kota Palu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 -----	II - 35
17.	Tabel 2.17	:	Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2010 -----	II - 36
18.	Tabel 2.18	:	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Palu Tahun 2009 – 2010 -----	II - 37
19.	Tabel 2.19	:	Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2006 – 2009 Atas Dasar Harga Konstan Kota Palu -----	II - 38
20.	Tabel 2.20	:	Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2006 – 2009 ADH Konstan dan ADH Berlaku Kota Palu -----	II - 39
22.	Tabel 2.21	:	Jumlah Induk Olahraga dan Atlet Menurut Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2009 -----	II - 47
23.	Tabel 2.22	:	Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 – 2009 -----	II - 57
24.	Tabel 2.23	:	Perkembangan jumlah Puskesmas, Pustu dan Puskesmas Keliling serta Rasionalitas terhadap Penduduk di Kota Palu Tahun 2006 s/d 2010 -----	II - 59
25.	Tabel 2.24	:	Jumlah RS dan Tempat Tidur Serta Rasio Tidur Per 1000 Penduduk Tahun 2010 -----	II - 60
26.	Tabel 2.25	:	Proporsi Tenaga Kesehatan menurut 7 Kategori di Kota Palu Tahun 2010 -----	II - 60
27.	Tabel 2.26	:	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Di Kota Palu Berdasarkan Kondisi Tahun 2009 – 2010 -----	II - 61
28.	Tabel 2.27	:	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kota Palu -----	II - 68
29.	Tabel 2.28	:	Data-data Realisasi Trafik Pelabuhan Pantoloan Tahun 2008 -----	II - 70
30.	Tabel 2.39	:	Data Informasi Layanan Publik Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Palu Tahun 2008 -----	II - 74
31.	Tabel 2.30	:	Jumlah Akta Catatan Sipil yang Diterbitkan di Kota Palu Tahun 2007 – 2010 -----	II - 75
32.	Tabel 2.31	:	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Di Kota Palu -----	II - 77

		Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Serta Jenis Kelamin Tahun 2009 -----	
33.	Tabel 2.32	: Koperasi Aktif Di Kota Palu Tahun 2006 – 2010 -----	II - 78
34.	Tabel 2.33	: Komposisi Aktivitas Lembaga dan Keanggotaan Koperasi Terhadap Total Aktivitas Lembaga dan Keanggotaan Masing–Masing Kecamatan Kota Palu Tahun 2009 -----	II - 79
35.	Tabel 2.34	: Pelaksanaan Festival Teluk Palu 2005 – 2010 -----	II - 80
36.	Tabel 2.35	: Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Palu Tahun 2006-2010 -----	II - 84
37.	Tabel 2.36	: Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kota Palu Tahun 2004 – 2009 -----	II - 86
38.	Tabel 2.37	: Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2006 – 2009 -----	II - 88
39.	Tabel 2.38	: Luas Pola Pemanfaatan Ruang Menurut Fungsinya di Kota Palu -----	II - 89
40.	Tabel 2.39	: Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB tahun 2006-2009 -----	II - 90
41.	Tabel 2.40	: Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalan Terhadap PDRB Tahun 2006-2009 -----	II - 91
42.	Tabel 2.41	: Pertumbuhan Industri di Kota Palu Tahun 2005-2009 -----	II - 93
43.	Tabel 2.42	: Perkembangan Indikator COR dan LOR Industri Kota Palu Tahun 2006-2009 -----	II - 94
44.	Tabel 2.43	: Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2006-2009 -----	II - 95
45.	Tabel 2.44	: Jumlah Ekspor Perdagangan di Kota Palu Tahun 2007 – 2010 (000 US\$) -----	II - 96
46.	Tabel 2.45	: Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) Terhadap PDRB Tahun 2006-2009 -----	II - 96
47.	Tabel 2.46	: Produktivitas Total Daerah per Sektor (ADH Berlaku) di Kota Palu Tahun 2009 -----	II - 98
48.	Tabel 2.47	: Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Palu Tahun 2009 – 2010 -----	II - 99
49.	Tabel 2.48	: Lalu-lintas Kapal, Jumlah Penumpang yang Datang dan Berangkat, dan Jumlah Barang yang Dibongkar dan Dimuat di Pelabuhan Pantoloan -----	II - 100
50.	Tabel 2.49	: Banyaknya Bank dan Cabangnya Menurut Jenis Bank di Kota Palu Tahun 2006 – 2010 -----	II - 101
51.	Tabel 2.50	: Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih di Kota Palu Tahun 2009 -----	II - 103
52.	Tabel 2.51	: Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Kota Palu Tahun 2006 – 2010 -----	II - 103
53.	Tabel 2.52	: Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Palu Tahun 2006 – 2009 -----	II - 104
54.	Tabel 2.53	: Angka Kriminalitas di Kota Palu Tahun 2009 – 2010 -----	II - 105
55.	Tabel 2.54	: Jumlah Kelurahan Menurut Status dan Kecamatan di Kota Palu Tahun 2010 -----	II - 107
56.	Tabel 2.55	: Rasio Ketergantungan Tahun 2009 - 2010 di Kota Palu -----	II - 108
57.	Tabel 2.56	: Aspek pelayanan umum & pilihan	II - 109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	:	Persentase Luasan Wilayah Kecamatan di Kota Palu	II - 2
Gambar 2.2	:	Peta Class Kelerengan	II - 5
Gambar 2.3	:	Bagan Alir Sungai- Sungai Yang Mengalir ke Sungai Palu	II - 24
Gambar 2.4	:	Peta Class Ancaman Bencana Banjir	II - 31
Gambar 2.5	:	Perkembangan Laju Inflasi Kota Palu Tahun 2005-2010	II - 40
Gambar 2.6	:	Persentase Angka Melek Huruf Di Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 – 2009	II - 40
Gambar 2.7	:	Persentase APK Di Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008	II - 41
Gambar 2.8	:	Persentase APM di Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 – 2009	II - 42
Gambar 2.9	:	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 – 2009	II 43
Gambar 2.10	:	Persentase Penduduk Kota Palu Yang Bekerja Berdasarkan Sektor Tahun 2008-2009	II - 44
Gambar 2.11	:	Perkembangan Grup Seni Kota Palu Tahun 2006 – 2009	II - 45
Gambar 2.12	:	Angka Partisipasi Sekolah Kota Palu Tahun 2008 – 2009	II - 46
Gambar 2.13	:	Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas dan Kemampuan Membaca dan Menulis Berdasarkan Jenis Kelamin	II - 48
Gambar 2.14	:	Rasio Murid/Guru; Murid/Buku & Murid/Ruang Belajar di Kota Palu Tahun 2007 – 2010	II - 49
Gambar 2.15	:	Persentase Pelayanan Umum Dalam Konsep Pendidikan Dasar	II - 50
Gambar 2.16	:	Persentase Pelayanan Umum Dalam Konsep Pendidikan Menengah	II - 51
Gambar 2.17	:	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Ditamatkan dan Status Pendidikan di Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009	II - 51
Gambar 2.18	:	Umur Harapan Hidup Masyarakat Kota Palu Tahun 2005-2010	II - 52
Gambar 2.19	:	Perbandingan Angka Kematian Kasar Kota Palu 2008-2010	II - 53
Gambar 2.20	:	Perbandingan Angka Kematian Bayi Kota Palu 2008-2010	II - 54
Gambar 2.21	:	Perbandingan Angka Kematian Ibu Kota Palu 2007-2010	II - 55
Gambar 2.22	:	Rata-rata Frekuensi Kunjungan Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 – 2009	II - 56
Gambar 2.23	:	Rasio Jaringan Irigasi Kota Palu Tahun 2006 - 2010	II - 58
Gambar 2.24	:	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Palu Tahun 2006 – 2010	II - 62
Gambar 2.25	:	Luas Lahan Pemakaman Kota Palu	II - 63
Gambar 2.26	:	Data Angkutan Umum Dalam Kota Palu Tahun 2008 Sampai Pertengahan Tahun 2009	II - 67
Gambar 2.27	:	Jumlah Izin Trayek di Kota Palu Tahun 2005 – 2009	II - 69
Gambar 2.28	:	Rasio TPS di Kota Palu Tahun 2005 - 2009	II - 70
Gambar 2.29	:	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Bersih di Kota Palu Tahun 2005 – 2009	II - 71
Gambar 2.30	:	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL di Kota Palu Tahun	II - 72

		2009-2010	
	Gambar 2.31	: Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Palu Tahun 2009-2010	II - 72
	Gambar 2.32	: Banyaknya Pelanggan dan Sarana Telekomunikasi dan Jenis Penggunaan Tahun 2006-2009	II - 73
	Gambar 2.33	: Jumlah Anggota Legislatif Perempuan di Kota Palu Tahun 2006 dan 2009	II - 74
	Gambar 2.34	: Jumlah Target dan Pencapaian Akseptor Baru di Kota Palu Tahun 2006 – 2010	II - 76
	Gambar 2.35	: Jumlah UMKM yang Dibina di Kota Palu tahun 2008-2010	II - 76
	Gambar 2.36	: Produktifitas Bahan Pangan Lokal di Kota Palu Tahun 2008-2009	II - 79
	Gambar 2.37	: Banyaknya LPM Menurut Tingkat Perkembangannya di Kota Palu Tahun 2006-2010	II - 82
	Gambar 2.38	: Produksi Perikanan di Kota Palu Tahun 2006-2010 (ton)	II - 83
	Gambar 2.39	: Angka Konsumsi Rata-Rata Rumah Tangga per Kapita di Kota Palu Tahun 2005 – 2009	II - 90
	Gambar 2.40	: Jenis Restoran dan Rumah Makan di Kota Palu Tahun 2006 – 2009	II - 104

1.1. PENGANTAR

Seiring dengan bergulirnya era reformasi sebagai dampak dari krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka. Gerakan reformasi berpengaruh pula pada sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik mengarah pada sistem desentralistik dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana di dalamnya mengatur urusan wajib dan urusan pilihan dalam menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada Walikota untuk melakukan koordinasi perencanaan, pengawasan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di tingkat Kota yang berdasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana terdapat urusan wajib dan urusan pilihan sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan angka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Untuk itulah Pemerintah Kota Palu

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005 – 2025.

Dampak reformasi tersebut berpengaruh pula pada tatanan perencanaan pembangunan sehingga pada kurun waktu 1997-2004 pemerintah belum dapat menyusun dokumen perencanaan, sebagaimana pada kurun waktu 1969-1997 pemerintah dengan baik telah memiliki rencana pembangunan nasional jangka panjang secara sistematis melalui tahapan lima tahunan. Pada kurun waktu 1997-2004 tersebut pemerintah dan pemerintahan daerah baru dapat menyusun kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional/Daerah dan selanjutnya digantikan oleh Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan rencana kerja pemerintah dan pemerintah daerah dalam jangka menengah 5 (lima) tahun.

Berdasarkan kronologis di atas, untuk menjaga pembangunan berkelanjutan maka terbitlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, yang diperjelas pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025. Selanjutnya dalam RPJP Nasional menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional agar adanya acuan yang jelas baik substansi dan jangka waktu, sehingga adanya keterkaitan perencanaan pembangunan mulai dari Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Pada akhir tahun 2025 diharapkan dapat terwujud Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh Sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, kegiatan usaha yang berdaya saing antara lain ditandai oleh berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaan

Indonesia di luar negeri, sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah berpendapatan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah, pelayanan pendidikan yang berkualitas dengan pelaksanaan manajemen pendidikan yang sudah maju, peningkatan kualitas pendidikan secara kompetitif dan terpadu, pelayanan kesehatan yang berkualitas ditandai dengan meningkatnya pelayanan kesehatan pada semua akses dan pelayanan kesehatan yang dikelola secara profesional, terpadu, kompetitif. Untuk itulah Pemerintah Kota Palu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005 – 2025 yang disusun selain mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi serta memperhatikan karakteristik dan potensi Kota Palu yang diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan sebagai cerminan cita-cita bersama yang akan dicapai yaitu terciptanya masyarakat Kota Palu yang terlindungi, sehat, sejahtera, berdaya saing dan berkeadilan dalam kerangka Kota Palu **“Kota Untuk Semua (City for All)”**.

Selanjutnya RPJP Daerah Kota Palu menjadi dasar bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah selama masa jabatan 5 (Lima) Tahun.

1.2. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Palu Tahun 2005 - 2025 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Kota Palu berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata, serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kota Palu. RPJP Daerah Kota Palu ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. RPJP Daerah Kota Palu Tahun 2005 - 2025 merupakan pedoman umum bagi seluruh segenap aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Sosial

Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh unsur dan lapisan masyarakat di daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dalam kurun waktu dua puluh tahun.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005 – 2025 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat serta sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Palu. Adapun tujuannya sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama adalah :

1. Untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Kota Palu 20 (dua puluh) tahun kedepan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan perencanaan pembangunan provinsi Sulawesi Tengah dan nasional.
2. Untuk mendukung koordinasi dan saling melengkapi antar pelaku pembangunan Kota Palu, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat, menjamin penggunaan sumber daya Kota Palu secara efektif, efisien, berkeadilan, adil, transparan, akuntabel, partisipatif, kedilan sosial dan berkelanjutan, serta menjaga kesinambungan pembangunan di Kota Palu.

1.4. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Palu disusun atas dasar :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional : Seluruh ketentuan peraturanperundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu :

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII / MPR / 2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan ;
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
- i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- r. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
- s. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPJP Daerah Kota Palu disusun sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang memuat pengantar, pengertian, maksud dan tujuan, landasan hukum, sistematika penulisan dan kerangka pikir RPJPD Kota Palu 2005-2025.
- BAB II** : Kondisi, analisis dan prediksi Kondisi umum daerah yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting pada titik awal penyusunan RPJPD Kota Palu Tahun 2005 – 2025 dalam setiap sektor pembangunan, analisis terhadap tantangan yang akan dihadapi selama 20 tahun ke depan serta prediksi kondisi umum masing-masing sektor pembangunan 20 tahun ke depan.
- BAB III** : Analisis strategis, menjelaskan tentang pokok-pokok penting yang mendasari penentuan visi dan misi Kota Palu 2005-2025. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.
- BAB IV** : Visi dan Misi pembangunan daerah 2005 -2025 yang memuat visi pembangunan daerah Kota Palu dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut.
- BAB V** : Arah, Tahapan dan Prioritas pembangunan Tahun 2005–2025 yang memuat upaya-upaya untuk mengatasi kendala dan permasalahan serta tantangan yang akan terjadi untuk pencapaian Visi dan Misi Kota Palu
- BAB VI** : Kaidah pelaksanaan, bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD

1.6. KERANGKA PIKIR RPJPD KOTA PALU 2005 – 2025

Seiring dengan berjalannya waktu pertambahan jumlah penduduk Kota Palu diprediksikan akan meningkat yang puncaknya diperkirakan akan

terjadi pada tahun 2025 yaitu sebesar 400.885 jiwa, kondisi ini harus diimbangi dengan penyediaan pra sarana dasar meliputi: pangan, perumahan dan infrastruktur pendukungnya. Perkembangan kota saat ini yang demikian pesat, memerlukan pengaturan-pengaturan yang dapat menyediakan ruang cukup bagi warganya untuk tetap hidup nyaman, aman, sejahtera dan rukun sebagai wujud kota yang menyenangkan seluruh warga atau *"City for All"*. Tentunya tantangan dan hambatan yang dihadapi tidaklah ringan, namun dengan kebersamaan seluruh stakeholder kota tentunya kita diharapkan dapat meraih mimpi tersebut.

Tentu saja, Pemerintah dan masyarakat Kota Palu juga harus mampu meningkatkan daya saing daerah untuk meraih kesempatan dan peluang yang ada dalam pemangunan. Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Provinsi Sulawesi Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menghadapi hal yang sama dimasa-masa yang akan datang, dengan melihat fakta dan kecenderungan yang ada, berbagai langkah harus ditempuh untuk tetap menjamin terlaksananya pembangunan pada masa yang akan datang dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dan memiliki sinergi yang kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang pada gilirannya akan mendukung pada pencapaian Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta untuk menjamin terlaksananya pembangunan Kota Palu yang berkelanjutan.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a). Luas dan Batas Wilayah Administrasi

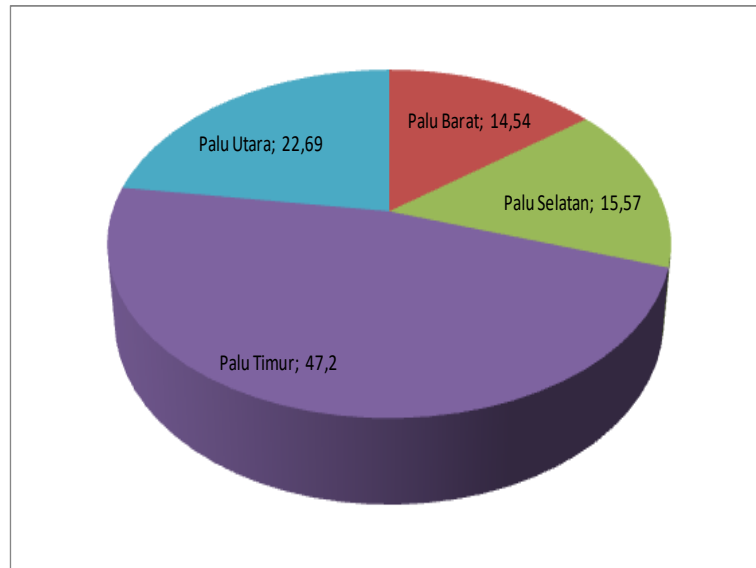
Kota Palu dengan wilayahseluas 395,04 km² atau 39,504 Ha, terdiri dari4 Kecamatan dan 43 Kelurahan. Luas masing-masing Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Palu Timur seluas 186,55 Km², Kecamatan Palu Barat dengan luas 57,47Km², Kecamatan Palu Selatanluas 61,35 Km² dan Kecamatan Palu Utaraseluas 89,69 Km² sebagaimana terlihat pada tabel 2.1. Secara rinci persentase luasan dari masing-masing Kecamatan tersebut terlihat pada gambar 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah kelurahan, luas wilayah dan Ibukota Kecamatan
di Kota Palu

No.	Kecamatan	Jumlah kelurahan	Luas (km²)	Ibukota Kecamatan
1	Palu Utara	8	89,69	Lambara
2	Palu Selatan	12	61,35	Birobuli Utara
3	Palu Barat	15	57,47	Lere
4	Palu Timur	8	186,55	Besusu Barat
Jumlah		43	395,06	

Sumber : Kota Palu dalam Angka 2010 (diolah kembali)

Gambar 2.1
Persentase Luasan Wilayah Kecamatan di Kota Palu



Sumber : Kota Palu dalam Angka 2010 (diolah kembali)

Data luasan masing-masing Kelurahan yang ada di 4 Kecamatan di wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut:

Kecamatan Palu Utara

- Kelurahan Baiya : Luas 19,25 km²
- Kelurahan Kayumalue Ngapa : Luas 7,43 km²
- Kelurahan Kayumalue Pajeko : Luas 2,39 km²
- Kelurahan Lambara : Luas 6,82 km²
- Kelurahan Mamboro : Luas 18,17 km²
- Kelurahan Panau : Luas 2,08 km²
- Kelurahan Pantoloan : Luas 31,6 km²
- Kelurahan Taipa : Luas 1,95 km²

Kecamatan Palu Selatan

- Kelurahan Kawatuna : Luas 20,67 km²
- Kelurahan Lolu Selatan : Luas 1,29 km²
- Kelurahan Lolu Utara : Luas 2,68 km²
- Kelurahan Palupi : Luas 2,17 km²
- Kelurahan Pengawu : Luas 2,19 km²
- Kelurahan Petobo : Luas 10,4 km²

- Kelurahan Tanamodindi : Luas 3,33 km²
- Kelurahan Tawanjuka : Luas 1,64 km²
- Kelurahan Birobuli Utara : Luas 7,09 km²
- Kelurahan Birobuli Selatan : Luas 3,75 km²
- Kelurahan Tatura Utara : Luas 3,28 km²
- Kelurahan Tatura Selatan : Luas 2,86 km²

Kecamatan Palu Barat

- Kelurahan Balaroa : Luas 2,38 km²
- Kelurahan Baru : Luas 0,75 km²
- Kelurahan Boyaoge : Luas 1,57 km²
- Kelurahan Buluri : Luas 14,45 km²
- Kelurahan Donggala Kodi : Luas 2,36 km²
- Kelurahan Duyu : Luas 6,16 km²
- Kelurahan Kabonena : Luas 2,27 km²
- Kelurahan Kamonji : Luas 0,85 km²
- Kelurahan Lere : Luas 2,97 km²
- Kelurahan Nunu : Luas 1,22 km²
- Kelurahan Silae : Luas 2,33 km²
- Kelurahan Siranindi : Luas 0,84 km²
- Kelurahan Tipo : Luas 5,7 km²
- Kelurahan Ujuna : Luas 0,49 km²
- Kelurahan Watusampu : Luas 13,13 km²

Kecamatan Palu Timur

- Kelurahan Besusu Barat : Luas 0,87 km²
- Kelurahan Besusu Tengah : Luas 2,26 km²
- Kelurahan Besusu Timur : Luas 0,6 km²
- Kelurahan Lasoani : Luas 36,86 km²
- Kelurahan Layana Indah : Luas 15 km²
- Kelurahan Poboya : Luas 63,41 km²
- Kelurahan Talise : Luas 12,37 km²
- Kelurahan Tondo : Luas 55,16 km²

Secara Administratif, Kota Palu yang merupakan Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Teluk Palu, Kecamatan Tanantovea dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.
Sebelah Selatan	Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.
Sebelah Barat	Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala, dan Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.
Sebelah Timur	Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

b). Letak dan Kondisi Geografis

Kota Palu yang berada pada kawasan dataran lembah Palu dan telukPalu, secara astronomis terletak antara 0°,36" - 0°,56" Lintang Selatan dan 119°,45" - 121°,1" Bujur Timur. Ketinggian wilayah kota Palu sekitar 0 - 700 meter dari permukaan laut.

Secara geografis Kota Palu di belah menjadi 2 wilayah besar yaitu wilayah barat dan timur yang secara langsung di belah oleh Sungai Palu. Anakan sungai-sungai yang mengalir dari perbukitan di bagian Utara, Timur selatan dan Barat menuju ke arah pedataran bermuara di Sunai Palu, serta menampung pula limbah-limbah air rumah tangga yang tersalurkan melalui drainase yang kemudian menuju ke Teluk Palu.

Wilayah Kota Palu dicirikan oleh bentuk utama berupa lembah (*graben*) dimana pusat kota terletak di bagian tengah dari lembah tersebut. Orientasi lembah ini mengikuti arah utama jalur pegunungan di kedua sisinya, yaitu berarah relatif di utara-selatan.

c). Topografi

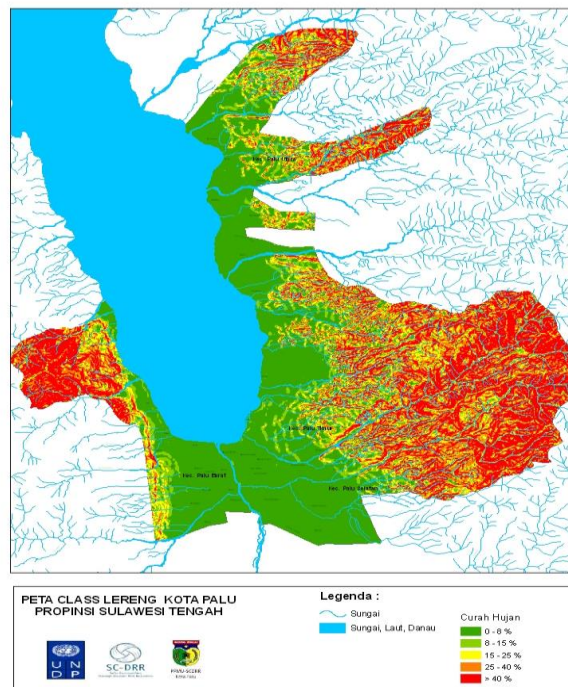
Topografi wilayah Kota Palu adalah datar sampai berombak-ombak dengan beberapa daerah yang berlembah. Keadaan topografi secara tak langsung merupakan kendala aktif atas penggunaan lahan. Tampak daerah pedataran merupakan pusat dari berbagai sektor kehidupan, seperti misalnya permukiman, perkotaan, pesawahan dan kebun palawija. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan umumnya merupakan kawasan yang dimanfaatkan sebagai kebun-kebun, tanah tegalan, perkebunan permanen, hutan produksi dan hutan lindung, serta Taman

Hutan Raya (TAHURA).

Hasil analisis terhadap peta topografi diperoleh klasifikasi kemiringan lereng terdapat di wilayah Kota Palu sebagaimana yang terlihat pada gambar 2.2, sebagai berikut :

1. Daerah pedataran berkemiringan lereng kurang dari 0% - 8% dan 8% - 15%, meliputi seluruh wilayah kecamatan yang tersebar di wilayah Kota Palu, termasuk semua kelurahan yang ada didalamnya.
2. Daerah landai dengan kemiringan lereng antara 15% - 25%, meliputi seluruh wilayah kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan Kota Palu.
3. Daerah agak terjal berkemiringan lereng 25% - 40%, meliputi wilayah yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, kebun kopi, Buluri, Watusampu, Kabonena, dan Donggala Kodi dll.
4. Daerah terjal berkemiringan lereng $> 40\%$, meliputi wilayah Pegunungan di wilayah Timur, Utara dan Barat Kota Palu yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, kebun kopi, Buluri dan Watusampu.

Gambar 2.2. Peta Class Kelerengan



Sumber : Bappeda Kota Palu, 2010

Pada dasarnya wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi tiga zona

ketinggian, yaitu:

1. Sebagian daerah bagian barat sisi timur memanjang dari utara ke selatan, bagian timur arah utara dan bagian utara sisi barat yang memanjang dari utara ke selatan merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0-100 meter di atas permukaan laut (mdpl).
2. Daerah bagian barat sisi barat dan selatan, daerah bagian timur ke arah selatan dan bagian utara ke arah timur dengan ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan laut (mdpl).
3. Daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl).

d). Geologi

Geologi tanah dataran lembah Palu ini terdiri dari bahan-bahan alluvial dan colluvial yang berasal dari metamorfosis yang telah membeku. Disamping itu tanahnya kemungkinan bertekstur sedang. Secara umum batuan yang menyusun daerah penelitian terdiri atas Aluvium muda, berasal dari endapan sungai, Aluvium, endapan kipas aluvial, koluvium, Andesit basalt, batu pasir, konglomerat, batu lumpur, Granit, granodiorit, riolit, Quartzite, filit, serpih dan schist yang kesemuanya tersebar pada daerah di wilayah Kota Palu.

Secara geologis, orientasi fisiografi Kota Palu berhubungan dengan proses struktur yang terjadi serta jenis batuan yang menyusun Kota Palu, di mana sisi kiri dan kanan Kota Palu merupakan jalur patahan utama, yaitu patahan Palu-Koro serta wilayahnya di susun oleh batuan yang lebih keras dibanding material penyusun bagian lembah.

Berdasarkan hubungan geologi tersebut, geomorfologi Kota Palu dapat dibagi kedalam tiga satuan geomorfologi, yaitu :

1. Satuan Geomorfologi Dataran, dengan kenampakan morfologi berupa topografi tidak teratur, lemah, merupakan wilayah dengan banjir musiman, dasar sungai umumnya meninggi akibat sedimentasi fluvial. Morfologi ini disusun oleh material utama berupa aluvial sungai dan

pantai. Wilayah tengah Kota Palu didominasi oleh satuan geomorfologi ini.

2. Satuan Geomorfologi Denudasi dan Perbukitan, dengan kenampakan berupa morfologi bergelombang lemah sampai bergelombang kuat. Wilayah kipas aluvial (aluvial fan) termasuk dalam satuan morfologi ini. Di wilayah Palu morfologi ini meluas di wilayah Palu Timur, Palu Utara, membatasi antara wilayah morfologi dataran dengan morfologi pegunungan.
3. Satuan Geomorfologi Pegunungan Tebing Patahan, merupakan wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi. Kenampakan umum berupa tebing-tebing terjal dan pelurusan morfologi akibat proses patahan. Arah pegunungan ini hampir utara-selatan, baik di timur maupun di barat dan menunjukkan pengaruh struktur/tektonik terhadap bentuk kini morfologi Kota Palu berupa lembah. Umumnya wilayah ini bukan merupakan wilayah hunian.

Berdasarkan Peta Geologi Tinjau (Dit. Geologi Bandung, 1998), Kota Palu dibentuk dari formasi dasar, yaitu: tanah Alluvium dan endapan pasir yang memanjang di sepanjang pantai sebelah utara kota dicirikan oleh banyaknya material pasir untuk bahan bangunan. Molasa Celebes dan Sarasin berupa konglomerat, batu pasir, batu lumpur, batu gamping, koral, dan napal yang tersebar dari arah utara sampai selatan Kota Palu.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan studi terhadap laporan-laporan terdahulu, stratografi dan litologi yang menyusun wilayah Kota Palu terdiri dari Kompleks Batuan Metamorf, Batuan Molase, Granit dan Granodiorit, Endapan Sungai dan pantai.

➤ **Komplek Batuan Metamorf**

Batuan ini terdapat di sekitar perbatasan timur Kota Palu dengan Kabupaten Parimo, umumnya bersusunan sekis dan sebagian kecil genes. Batuan sekis pada umumnya terkekalkan dengan tingkat pelapukan permukaan yang lebih intensif dibanding batuan genes. Batuan lain penyusun formasi ini adalah kuarsit dan pualam dengan umur formasi adalah Pra Tersier.

➤ **Formasi Tinombo**

Formasi ini disusun oleh batuan-batuan berupa serpih, batu pasir, batu lanau, konglomerat, batuan vulkanik, batu gamping dan rijang, termasuk pula filit, batu sabak dan kuarsit. Umur formasi Eosen – Oligosen, formasi ini terdapat di wilayah Palu barat bagian barat.

➤ **Batuan Vulkanik**

Batuan gunung api umumnya bersifat andesitik, tersebar di banyak tempat namun tidak meluas. Ukuran kristal batuan umumnya halus. Juga terdapat batuan lain berupa lava, breksi andesit dan basal. Di sekitar wilayah Kota Palu dan kabupaten Donggala batuan ini terdapat di Lolioge yang selanjutnya menerus ke wilayah Kabupaten Donggala. Umur batuan ini diperkirakan menjemari dengan Formasi Tinombo, yaitu pada skala Eosen.

➤ **Batuan intrusi**

Batuan intrusi yang terbentuk di Kota Palu berkomposisi granit-granodioritik. Penyebaran utama adalah di bagian barat (sisi timur . Gawalise), di Watutela dan sekitar perbukitan Poboya. Sifat fisik batuan telah terkekarkan dan sebagian telah mengalami pelapukan kuat. Batuan ini relatif tidak terpetakan namun dapat dijumpai singkapan setempat-setempat.

➤ **Formasi Molase Sarasin dan Sarasin**

Formasi ini terdiri dari konglomerat, batu pasir, batu lanau dan batu lempung. Penyebarannya yang cukup luas adalah dibagian utara, timur, selatan dan barat. Batuan ini merupakan penyusun utama material di wilayah pinggiran Kota Palu. Sifat perlapisan pada batuan ini sangat buruk sampai dengan tidak nampak perlapisannya.

➤ **Aluvium dan Endapan Pantai**

Material ini merupakan penyusun utama wilayah lembah Palu. Komposisi material penyusun berupa pasir, lanau, kerikil dan kerakal dengan komposisi/prosentasi ukuran material yang tidak seragam antara tempat satu dengan lainnya.

e). Hidrologi

Berdasarkan peta hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS) Palu serta hasil analisis kondisi fisik tanah, diketahui bahwa pada daerah-daerah yang tanahnya terdiri atas lapisan rembes air seperti daerah berpasir pada umumnya kerapatan sungainya kecil. Akan tetapi pada daerah-daerah yang terdiri dari tanah kedap air, kerapatan sungainya besar. Kerapatan sungai di daerah berhutan dan padang rumput tampak lebih besar dibandingkan dengan daerah yang gundul. Kerapatan sungai pada dataran tinggi dan terutama di lereng-lereng pegunungan lebih besar dibandingkan dengan dataran rendah. Angka kerapatan pada daerah yang banyak hujan lebih besar dibandingkan dengan di daerah kering. Umumnya wilayah DAS Palu memiliki pola aliran sungai berbentuk dendritik dan parallel. Wilayah DAS besar umumnya memiliki pola aliran sungai dendritik, sedangkan sungai-sungai kecil polanya parallel.

Sistem jaringan sumber daya air Kota Palu meliputi: (a) wilayah sungai; (b) jaringan irigasi; (c) jaringan air baku dan (d) sistem pengendalian banjir di wilayah kota. Adapun wilayah Sungai di Kota Palu meliputi: Sungai Palu, Sungai Tipo, Sungai Watusampu, Sungai Buluri, Sungai Lewara, Sungai Kawatuna, Sungai Poboya, Sungai Watutela, Sungai Taipa, Sungai Tawaeli dan Sungai Lambagu.

Jaringan irigasi di wilayah Kota Palu meliputi: Daerah Irigasi Kawatuna, Daerah Irigasi Kayu Malue Ngapa, Daerah Irigasi Lambara, Daerah Irigasi Mamboro, Daerah Irigasi Pantoloan, Daerah Irigasi Poboya, Daerah Irigasi Tanamodindi, Daerah Irigasi Mpanau, Daerah Irigasi Duyu, dan Daerah Irigasi Donggala Kodi. Identifikasi/pemantauan kualitas air diarahkan pada sumber-sumber air seperti sungai, danau dan mata air yang airnya banyak dimanfaatkan untuk masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Sumber-sumber mata air dimaksud antara lain:

- ✚ Sungai Kawatuna dan Sungai Mamara di wilayah DAS Palu Timur. Aliran sungai diduga telah tercemar akibat adanya aktivitas penambangan emas oleh sekelompok masyarakat. Sungai Kawatuna

adalah sumber air bersih bagi masyarakat Kota Palu dibagian selatan, termasuk Lasoani.

- ✚ Sungai Lewara di wilayah DAS Palu Barat. Sungai menjadi penyumbang sedimenter besar apabila terjadi hujan di daerah hulu.
- ✚ Sumber mata air Ranjori Desa Beka Kecamatan Dolo Barat DAS Palu Barat. Sumber air ini menjadi sumber air utama bagi masyarakat Desa Beka dan desa sekitarnya.
- ✚ Sungai Wuno dan Sungai Paneki. Sungai ini menjadi sumber air bersih dan irigasi bagi masyarakat Biromaru.
- ✚ Sungai Ngia di Desa Ngatabaru. Sungai menjadi sumber air bersih bagi masyarakat Desa Ngatabaru.
- ✚ Sumber mata air panas Bora. Sumber mata air ini digunakan masyarakat Bora untuk kebutuhan MCK.
- ✚ Sumber mata air panas Mantikole. Sumber mata air ini dimanfaatkan masyarakat untuk irigasi dan MCK.
- ✚ Sungai Gumbasa. Sungai merupakan penyumbang terbesar bagi irigasi Gumbasa untuk budidaya pertanian padi sawah, perikanan (kolam), dan MCK.
- ✚ Danau Lindu. Danau ini merupakan daerah potensial pengembangan usaha perikanan darat (danau), selain itu airnya dimanfaatkan pula untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Lindu.

f). Klimatologi

Berdasarkan Peta Agroiklimat dan Oldemen, Kota Palu mempunyai Tipe iklim E₃. Puncak curah bulan kering berlangsung pada bulan Februari dan Mei sampai bulan Oktober. Bulan basah hanya terjadi pada bulan Juni, Oktober dan November. Sedangkan, menurut kriteria (Schmidt-Ferguson), tipe iklim Kota Palu adalah bertipe iklim F dengan nilai $Q = 188,24$

Kota Palu seperti halnya daerah lain di Indonesia, memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musimhujan. Musim panas terjadiantara bulan April – September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Oktober – Maret. Curah hujan tertinggi yang tercatat pada Stasiun

Meteorologi Mutiara Palu tahun 2010 terjadi pada bulan Juni yaitu 123, 0mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Maret yaitu 11,7 mm. Sementaraitu kecepatan angin pada tahun 2010 rata-rata 3,7 knots. Posisi Kota Palu yang berada di garis khatulistiwa, juga memberikan kontribusi penting terhadap iklim mikro yang ada. Tentunya kondisi geografis seperti demikian akan membuat Kota Palu cukup banyak menerima sinar matahari dengan waktu yang lama sehingga daerahnya menjadi lebih panas dibandingkan dengan kota-kota lain. Persentase penyinaran matahari, curah hujan dan kecepatan angin di Kota Palu tercantum pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2.
Penyinaran Matahari, Curah Hujan dan Kecepatan Angin Pada Stasiun Meterologi Mutiara Palu Menurut Bulan Tahun 2010

No.	Kecamatan	Penyinaran Matahari (%)	Curah Hujan (mm)	Kecepatan Angin (Knots)
1.	Januari	52	58.9	4
2.	Pebruari	72	32.1	4
3.	Maret	69	11.7	5
4.	April	63	80.2	4
5.	Mei	67	81.5	4
6.	Juni	70	123	3
7.	Juli	62	112.4	3
8.	Agustus	63	100.3	3
9.	September	71	144.3	3
10.	Oktober	62	66.6	3
11.	Nopember	63	44.2	4
12.	Desember	46	38.6	4
Rata-Rata		63.50	-	3.7

Sumber : BPS Kota Palu, 2010

Berdasarkan data suhu udara pada Stasiun Udara Mutiara Palu tahun 2010, rata-rata suhu udara adalah 27,7°C. Suhu udara terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 26,7°C, sedangkan bulan-bulan

lainnya suhu udara berkisar antara 26,7-28,8°C. Kelembaban udara rata- rata adalah 76,7 persen. Tabel 2.3 memperlihatkan data parameter cuaca di Kota Palu.

Tabel 2.3
Rata-rata Parameter Cuaca pada Stasiun Meteorologi
Mutiara Palu menurut Bulan

No.	Kecamatan	Suhu Udara (°C)	Tekanan Udara (mb)	Kelembaban Udara (%)
1.	Januari	27.4	10,115	76
2.	Pebruari	28.1	10,116	72
3.	Maret	28.7	10,113	70
4.	April	28.8	10,111	73
5.	Mei	28.2	10,094	79
6.	Juni	27.1	10,109	82
7.	Juli	27.1	10,106	80
8.	Agustus	26.7	10,109	82
9.	September	27	10,105	81
10.	Oktober	27.7	10,094	76
11.	Nopember	28.2	10,094	74
12.	Desember	27.6	1,008.0	75
Rata-Rata		27.7	1008.0	76.7

Sumber : BPS Kota Palu, 2011

g). Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi. Daerah perkotaan mempunyai kondisi penggunaan lahan dinamis, sehingga perlu terus di pantau perkembangannya, karena seringkali pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak memenuhi syarat.

Bentuk penggunaan lahan suatu wilayah terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan semakin intensifnya aktivitas penduduk di suatu tempat berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan lahan.

Pertumbuhan dan aktivitas penduduk yang tinggi terutama terjadi di daerah perkotaan seperti Kota Palu, sehingga daerah perkotaan pada umumnya mengalami perubahan penggunaan lahan yang cepat

Jenis penggunaan lahan oleh masyarakat di wilayah Kota Palu meliputi ; perumahan/permukiman, lahan basah, perkebunan, kawasan hutan, ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Adapun luas masing-masing jenis penggunaan lahan disajikan pada Tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4.
Luas Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Kota Palu

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Palu Barat (Ha)	Palu Timur (Ha)	Palu Utara (Ha)	Palu Selatan (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Perumahan/Pemukiman	593.50	518.47	538.76	854.32	2,505.05
2	Lahan Basah	171.88	81.58	537.01	524.38	1,314.84
3	Perkebunan	63.17	314.48	203.64	29.35	610.64
4	Perkantoran	1.61	3.52	2.66	4.18	11.97
5	Sarana Pendidikan	35.93	208.25	11.76	24.66	280.60
6	Sarana Kesehatan	1.41	4.79	1.42	4.08	11.70
7	Sarana Peribadatan	8.25	2.07	1.19	5.60	17.10
8	Perdagangan	26.92	9.66	0.89	25.66	63.13
9	Kawasan Wisata	7.37	63.70	9.72	15.38	96.17
10	Kawasan Industri	5.41	17.10	69.15	2.91	94.57
11	Kawasan Lapangan Olahraga	6.84	4.00	3.96	0.86	15.66
12	Kawasan Peternakan	0.53	5.63	-	5.63	11.79
13	Kawasan Pemakaman	3.79	8.66	0.11	2.80	15.36
14	TPA dan IPLT	-	1.915	-	7.037	8.95
15	Hutan Produksi Terbatas	-	2,358.22	2,017.77	-	4,375.99
16	Hutan Lindung	2,512.91	3,728.19	-	899.88	7,140.98
17	Lahan Terbuka Hijau	0.021	226.91	0	4.91	231.841
18	Tahura Palu	-	4,253.76	-	1,535.24	5,789.00
19	Lain-lain	2,307.45	6,844.11	5,570.96	2,188.13	16,910.65
	Jumlah	5,747.00	18,655.00	8,969.00	6,135.00	39,506.00

Sumber: Dokumen RP-RHL Kota Palu, 2010.

Rencana Pola Ruang Kota mencakup rencana pengembangan kawasan budi daya dan lindung yang meliputi wilayah daratan sekitar

39.504 Ha dan wilayah laut sekitar 10.460 Ha. Adapun klasifikasi pola ruang wilayah kota Palu yang terdiri atas kawasan budidaya dan kawasan lindung dengan rincian sebagai berikut:

❖ **Kawasan Budidaya**

Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Di Kota Palu kawasan budi daya wilayah darat seluas ± 17.216 Ha dan kawasan budi daya wilayah laut seluas ± 10.460 Ha. Kawasan ini meliputi:

- ✓ Kawasan perumahan yang terdiri atas perumahan dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah;
- ✓ Kawasan perdagangan dan jasa, diantaranya adalah pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- ✓ Kawasan perkantoran yang diantaranya adalah perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta;
- ✓ Kawasan industri meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan;
- ✓ Kawasan pariwisata, yang diantaranya adalah pariwisata budaya, pariwisata alam serta pariwisata buatan;
- ✓ Kawasan ruang terbuka non hijau;
- ✓ Kawasan ruang evakuasi bencana yang meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi *melting point* ketika bencana terjadi;
- ✓ Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- ✓ Kawasan peruntukan lainnya, antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

❖ **Kawasan lindung**

Kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat meliputi; sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempada sekitar mata air, kawasan pelestarian alam seperti taman hutan raya serta kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana alam.

Kawasan lindung Kota Palu dengan luas sekitar 22.290 Ha, terdiri atas:

- ✓ Hutan lindung;
- ✓ Kawasan perlindungan setempat, yang meliputi sem padan pantai, sem padan sungai, kawasan sekitar mata air;
- ✓ Ruang terbuka hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan permakaman;
- ✓ Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- ✓ Kawasan rawan bencana alam, yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir; dan
- ✓ Kawasan lindung lainnya.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Kota Palu terdapat berbagai komoditas unggulan lokal, baik yang berasal dari komoditas pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, industri, dsb. Pengembangan segenap potensi lokal termasuk komoditas pertanian unggulan harus terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing ditengah serbuan produk sejenis dari wilayah lain bahkan mancanegara. Komoditi khas yang menjadi unggulan di Kota Palu diantaranya dari sektor pertanian yaitu bawang goreng, rumput laut dan kakao serta domba ekor gemuk. Sementara dari sektor industri diantaranya industri hasil pertanian dan industri kerajinan.

a) Pertanian

Produk pertanian dan kehutanan meliputi produk tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan yang merupakan produk sektor primer yang mempunyai sifat mudah rusak dan tergantung pada musim, namun hingga saat ini masih merupakan kebutuhan pokok yang berpotensi untuk dikembangkan.

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir di Kota Palu, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan ditunjukkan pada Tabel 2.5. Data pada tabel tersebut menunjukkan umumnya komoditas pangan memiliki *trend* peningkatan baik luas panen, produksi maupun produktivitas, kecuali tanaman jagung dan ubi jalar yang luas tanamnya cenderung menurun masing-masing sebesar 1,0% dan 0,7% per tahun.

Tabel 2.5.
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kota Palu

No	Komoditi	Tahun						%
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Luas Panen (ha)		349	507	530	369	932	
	1. Padi Sawah	215	491	652	605	491	885	20,44
	2. Jagung	550	0	19	1	20	8	-1,00
	3. Kedelai	0	160	171	267	174	250	329
	4. Kacang Tanah	119	80	61	65	73	106	15,66
	5. Kacang Hijau	59	102	111	114	87	159	7,68
	6. Ubi Kayu	75	87	97	114	79	121	5,96
	7. Ubi Jalar	88						-0,70
2	Produksi (ton)							
	1. Padi Sawah	806	1363	1984	2102	1577	3709	23,91
	2. Jagung	1334	1128	1518	1465	1498	2182	4,47
	3. Kedelai	0	0	20	1	23	9	388
	4. Kacang Tanah	141	235	240	390	299	366	26,99
	5. Kacang Hijau	44	60	46	50	58	82	9,43
	6. Ubi Kayu	792	1214	1232	1308	1089	1826	11,05
	7. Ubi Jalar	792	809	905	1069	791	1150	1,53
3	Produktivitas (ku/ha)							
	1. Padi Sawah	37,50	39,5	39,13	39,66	42,74	39,80	3,36
	2. Jagung	22,30	22,95	23,28	24,22	30,50	24,66	8,58
	3. Kedelai	-	-	10,53	11,14	11,45	11,14	1,47
	4. Kacang Tanah	11,9	14,69	14,04	14,61	17,19	14,65	10,18
	5. Kacang Hijau	7,50	7,50	7,54	7,63	7,93	7,70	1,41
	6. Ubi Kayu	102,30	119,00	110,99	114,78	125,20	114,80	5,52
	7. Ubi Jalar	90,0	93,00	93,30	93,77	100,16	95,00	2,74

Sumber : BPS. 2009 dan 2010

Jumlah tanaman buah-buahan Kota Palu didominasi oleh pisang, mangga dan nangka yang masing-masing sebanyak 10.849; 3887 dan 2547 pohon. Produksi buah-buahan Kota Palu didominasi pepaya, pisang, mangga dan nangka. Secara umum *trend* pertumbuhan produksi buah-buahan meningkat dalam lima tahun terakhir meskipun tidak linear dari tahun ke tahun. Rata-rata produksi terbesar terjadi pada komoditi mangga, anggur, nangka, pisang dan jambu air mencapai lebih dari sepuluh kali lipat setiap tahun.

b) Perkebunan

Komoditi kakao merupakan salah satu andalan bidang perkebunan yang tidak tergantung dari ketersediaan luas lahan karena melalui UPTD Kakao sebagai aset daerah memiliki beberapa program pengembangan diantaranya pengembangan kebun induk sumber entris, kebun percontohan dan koleksi klon-klon unggul serta menjadi pusat penyediaan bibit unggul melalui penerapan teknik kultur jaringan termasuk bibit yang dihasilkan dari kultur *somatic embryogenesis* (SE). Di masa yang akan datang, UPTD Kakao ini diharapkan mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan bibit untuk daerah-daerah lain yang ada di propinsi Sulawesi Tengah atau bahkan di luar wilayah propinsi.

Tabel 2.6.
Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan Kota Palu

No	Jenis Komoditas	T a h u n				
		2006	2007	2008	2009	2010
A.	Luas Areal (ha)					
1	Kelapa	638	491	260	320,8	419,7
2	Kakao	3	14	138	166	185,5
3	Kopi	2	-	-	1,2	10,2
4	Jambu Mete	360	360	21	15,4	14
5	Kemiri	-	16	15,7	15,7	101,2
B	Produksi (ton)					
1	Kelapa	240,3.	240,4	240	178	194,58
2	Kakao	33	33,4	34,5	56	58,23
3	Kopi	2	-	-	-	1,75
4	Jambu Mete	-	-	1,5	1,2	8,98
5.	Kemiri	-	-	4,2	4,2	38,9

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

c) Kehutanan

Kota Palu memiliki kawasan hutan seluas 17.257 ha atau 43,68% dari luas wilayah daratan (39.506 ha). Tabel berikut menggambarkan kawasan lindung dan kawasan budidaya bidang kehutanan dan non kehutanan.

Tabel 2.7.
Luas Pola Pemanfaatan Ruang Menurut Fungsinya di Kota Palu

No.	Fungsi Lahan	Luas(Ha)	Persentase (%)
I.	KAWASAN LINDUNG	12.887	32,62
1	Kawasan Kawasan Pelestarian Alam (KPA): TAHURA PALU	5.746	14,54
2	Hutan Lindung (HL)	7.141	18,08
II.	KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN	4.370	11,06
1	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	4.370	11,06
2	Hutan Produksi Tetap (HP)	0,00	0,00
3	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	0,00	0,00
	Jumlah I + II		
III.	KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN	22.249	56,32
1	Areal Penggunaan Lain (APL)	22.249	56,32
	Jumlah Luas Wilayah (I + II + III)	39.506	100,00

Sumber: BPS Kota Palu, 2009

d) Peternakan

Potensi pengembangan ternak di kota Palu cukup tinggi, baik ternak besar maupun kecil serta unggas. Kambing merupakan ternak dengan populasi terbesar di kota Palu, khususnya pada tahun 2010, di mana populasinya mencapai 354.761 ekor meningkat tajam dari tahun sebelumnya yakni 136.424 ekor. Adapun ternak domba yang ada di Kota terkategori sebagai komoditas unggulan dan merupakan domba dengan ciri khusus, yakni berekor gemuk.

Untuk populasi dari ternak besar dan kecil di kota Palu dari tahun 2006 sampai dengan 2010 terlihat pada Tabel 2.8 sebagai berikut.

Tabel 2.8
Populasi Ternak Besar dan Kecil di Kota Palu Tahun 2006 – 2010

Jenis Ternak	Tahun (ekor)				
	2006	2007	2008	2009	2010
Kerbau	11	13	13	10	3
Sapi	6.358	6.835	6.703	8.531	9.168
Kuda	521	528	1.030	1.591	2.801
Kambing	18.956	18.032	51.087	136.424	354.761
Domba	3.985	3.941	9.601	22.519	55.712

Sumber: BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

Sementara itu populasi unggas terbesar di Kota Palu adalah ayam pedaging. Hal ini disebabkan ayam pedaging merupakan ternak yang paling mudah menyediakan daging sebagai bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan. Populasi ternak unggas di Kota Palu tercantum pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Populasi Ternak Unggas di Kota Palu Tahun 2006 – 2010

Jenis Ternak	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Ayam Pedaging	53.250	1.009.240	918.400	3.766.348	4.239.774
Ayam Petelur	112.378	107.224	142.667	159.260	168.834
Ayam Buras	169.933	437.278	527.946	553.774	1.475.560
Itik	1.184	764	1.436	2.623	4.523

Sumber: BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

e) Perikanan dan Kelautan

Kota Palu mempunyai potensi dengan jumlah produksi perikanan sebesar 2.382 ton pada tahun 2008, yang terdiri atas 1.982,8 ton perikanan tangkap dan 56 ton perikanan budidaya. Tabel 2.10 dan 2.11. menyajikan jumlah produksi perikanan di Kota Palu.

Tabel 2.10
Produksi Perikanan di Kota Palu pada tahun 2007 – 2008

Tahun	Produksi (ton)		
	Perikanan tangkap	Kolam	Rumput laut
2007	1.982,8	6,9	62,48
2008	2.325,7	28,25	28,2

Sumber: Statistik Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Palu 2009

Berdasarkan potensi perikanan di kota Palu, produksi dan pengembangan sektor ini diarahkan di Kecamatan Palu Utara dan Palu Selatan, mengingat kedua kecamatan tersebut sebagian besar wilayahnya terletak di wilayah pesisir sehingga untuk menyesuaikan potensi perikanan, pengembangan dan intensifikasi difokuskan pada dua kecamatan tersebut.

Tabel 2.11
Produksi Perikanan Kota Palu tahun 2005-2009

Tahun	Perikanan	Perairan	Perikanan Darat				Budidaya Laut (Ton Kering)
	Laut	Umum	Tambak	Kolam	Sawah	Karamba	
2005	1.522,7	-	-	6,9	-	-	-
2006	1.787,5	-	-	16,7	-	-	-
2007	1.982,8	-	-	17,1	-	-	62,8
2008	2.325,7	-		28,2	-	-	-
2009	2.789,6	-		35	-	-	94

Sumber: Statistik Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kota Palu 2009

f) Potensi Lahan Kota Palu

Jenis penggunaan lahan oleh masyarakat di wilayah Kota Palu meliputi perumahan/permukiman, lahan basah, perkebunan, kawasan hutan, ruang terbuka hijau dan lain-lain. Adapun luas masing-masing jenis penggunaan lahan disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Luas Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Kota Palu

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Palu Barat (Ha)	Palu Timur (Ha)	Palu Utara (Ha)	Palu Selatan (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Perumahan/Pemukiman	593.50	518.47	538.76	854.32	2,505.05
2	Lahan Basah	171.88	81.58	537.01	524.38	1,314.84
3	Perkebunan	63.17	314.48	203.64	29.35	610.64
4	Perkantoran	1.61	3.52	2.66	4.18	11.97
5	Sarana Pendidikan	35.93	208.25	11.76	24.66	280.60
6	Sarana Kesehatan	1.41	4.79	1.42	4.08	11.70
7	Sarana Peribadatan	8.25	2.07	1.19	5.60	17.10
8	Perdagangan	26.92	9.66	0.89	25.66	63.13
9	Kawasan Wisata	7.37	63.70	9.72	15.38	96.17
10	Kawasan Industri	5.41	17.10	69.15	2.91	94.57
11	Kawasan Lapangan Olahraga	6.84	4.00	3.96	0.86	15.66
12	Kawasan Peternakan	0.53	5.63	-	5.63	11.79
13	Kawasan Pemakaman	3.79	8.66	0.11	2.80	15.36
14	TPA dan IPLT	-	1.915	-	7.037	8.95
15	Hutan Produksi Terbatas	-	2,358.22	2,017.77	-	4,375.99
16	Hutan Lindung	2,512.91	3,728.19	-	899.88	7,140.98
17	Lahan Terbuka Hijau	0.021	226.91	0	4.91	231.841
18	Tahura Palu	-	4,253.76	-	1,535.24	5,789.00
19	Lain-lain	2,307.45	6,844.11	5,570.96	2,188.13	16,910.65
Jumlah		5,747.00	18,655.00	8,969.00	6,135.00	39,506.00

Sumber: Dokumen RP-RHL Kota Palu, 2010.

f.1. Potensi Pertambangan

Terdapat berbagai potensi pertambangan di Kota Palu yaitu galian C, emas, gipsum, andesit, dll.

✓ **Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil)**

Bahan galian ini terdapat di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Layana Indah (sekitar Vatutela) di Kecamatan Palu Timur dan Kelurahan Mamboro di Kecamatan Palu Utara. Sedangkan Pasir dan Batu (Sirtu) tersebar di semua sungai di Kota Palu. Lokasi potensi material ini umumnya terdapat di sekitar wilayah sungai, baik sungai permanen maupun sungai tadah hujan.

Berdasarkan data UPT Pertambangan Dinas PU Kota Palu (2006), Ijin Pengusahaan Bahan Galian C Sirtu di Kota Palu saat ini terdapat pada lokasi-lokasi, yaitu :

- S. Lambagu, Kelurahan Pantoloan (10 Ha)
- S. Sombe Lewara, Kelurahan Pengawu (19 Ha)
- S. Nyoli, Kelurahan Watusampu (6 Ha)
- S. Wala, Kelurahan Watusampu (7 Ha)
- Bukit Buluri Ipi, Kelurahan Watusampu (21 Ha)
- S. Nggolo, Kelurahan Buluri (17 Ha)
- S. Taipa, Kelurahan Taipa (4 Ha)

✓ **Granit dan Andesit**

Granit dan andesit merupakan batuan beku insitu yang dalam penambangannya berbeda dengan cara penggalan tasirtu. Mengingat sifat yang keras dan tubuh batuan yang besar maka penambangan bahan galian ini akan memerlukan energi yang besar guna memungkinkan bagi adanya jalur retakan untuk kemudahan penggalan. Granit terdapat di daerah Silae sampai dengan Watusampu serta di Vatutela Tondo. Sedangkan batuan andesit terdapat wilayah antara Buluri dan Watusampu.

✓ **Lempung dan Gypsum**

Lempung yang dimaksud adalah lempung merah yang dapat digunakan sebagai bahan baku batubata yang banyak terdapat di bagian tengah dan selatan Kota Palu. Adapun gipsum, dijumpai di wilayah perbukitan dusun Vatutela kelurahan Tondo.

✓ **Garam (KCI)**

Garam banyak dijumpai di sepanjang pantai di Kota Palu, khususnya di Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur.

✓ **Emas**

Di wilayah Kota Palu, bahan galian yang termasuk golongan B ini terdapat di Kelurahan Poboya. Luas areal pertambangan emas di Kelurahan tersebut sekitar 7.120 Ha. Secara rinci potensi bahan tambang di Kota Palu dapat dilihat pada Tabel 2.13. berikut

Tabel 2.13
Lokasi dan Potensi Bahan tambang di Kota Palu

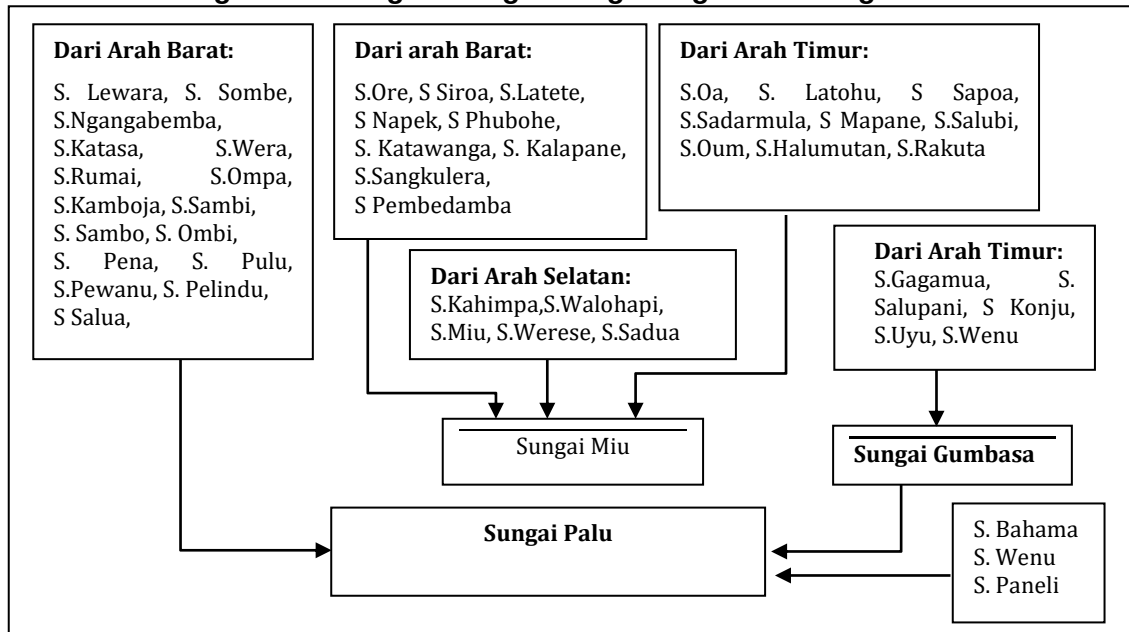
N o.	Nama Bahan Galian	Lokasi	Potensi/Sebaran	Keterangan
1.	Pasir Batu Kerikil (Sirtukil)	S. Labuan, S. Taipa, S. Paboya, S. Kawatuna, S. Palu, S. Tawaeli, S. Pantoloan, S. Lambagu, S. Layana, S. Sombe Lewara, S. Palupi, S. Rato, S. Nggolo, S. Pokove, S. Watusampu, Bukit Watusampu dan Bukit Nyoli.	Sangat berpotensi dengan cadangan yang sangat besar, terutama S.Labuan, S.Taipa, S. Tawaeli dan S. Watusampu	Eksplorasi saat ini dilakukan S. Tawaeli (46,65 Ha), S.Watusampu (14,3 Ha), S. Lambagu (10 Ha), Bukit Watusampu (15 Ha), S. Nggolo (5 Ha) dan Bukit Nyoli (14 Ha)
2.	Emas	Desa Poboya., Palu Timur	Terdapat sebagai urat-urat dalam granit	Ijin eksplorasi oleh PT. Citra Palu Minerals
3.	Granit	Silae, Watusampu, Buluri, Kabonena, Donggala Kodi, dan Watutela	Cukup di Silae, Watusampu, Buluri, Donggala Kodi, Kabonena dan hanya setempat di Watutela	Sebaran granit merupakan batas litologi bagian timur dan meluas sampai wilayah Kab. Donggala.
4.	Andesit	Buluri dan bagian barat Watusampu, Kec. Palu Barat	Sedang	Umumnya terletak dibawah lapisan pelapukan perbukitan, kecuali areal sepanjang sungai dan jalan. Sebaran meluas hingga wilayah Kab. Donggala
5.	Lempung	Kel. Tatura Utara dan Birobuli Selatan (Palu Selatan) dan Kawatuna (Palu Timur)	Sedang	Sebagian telah menjadi areal pemukiman
6.	Gipsum	Dusun Watutela, Tondo Kec. Palu Timur	Terbatas	Dijumpai setempat dalam formasi batuan molase

Sumber : Draft RTRW Kota Palu, 2011

f.2. Potensi Sungai

Aliran sungai di Kota Palu umumnya bersumber dari arah yang variatif yaitu dari Selatan mengalir ke Utara, dari Barat Ketimur, dari Timur ke barat yang kesemuanya bermuara pada teluk Palu, sebagaimana terlihat pada gambar 2.2. Sungai-sungai tersebut membentuk pola subtrellis dan dendritik ditunjukkan oleh cabang anak-anak sungai, sedangkan pola radier ditemukan di daerah pegunungan.

Gambar 2.3
Bagan Alir Sungai- Sungai Yang Mengalir ke Sungai Palu



f.3. Potensi Pariwisata

Wilayah Kota Palu mempunyai beberapa kawasan wisata yang merupakan tujuan wisatawan domestik maupun manca negara. Potensi wisata tersebut terdiri atas :

❖ Museum Sulawesi Tengah

Museum Sulawesi Tengah yang terletak di Kota Palu sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Tengah menyimpan sekitar 7.000 koleksi. Sebagian koleksi ditata dalam dua Gedung Pameran Tetap dan sebagian lainnya masih tersimpan dalam Gedung Penyimpanan Koleksi (*Storage*). Dalam gedung Pameran Tetap dapat disaksikan aneka kebudayaan dari 12 etnis seperti upacara daur hidup, pembuatan kain tenun donggala, meramu sagu dan pembuatan kain kulit kayu.

❖ Sou Raja

Rumah raja atau Sou Raja atau juga disebut Banua Mbaso yang berarti rumah besar. Rumah berbentuk panggung ini merupakan warisan nenek moyang keluarga para bangsawan suku Kaili. Saat ini Banua Mbaso masih dapat dilihat di Kabupaten Sigi,

Tavaili, Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Khusus Kota Palu dapat dilihat keberadaan rumah Sou Raja yang masih terawat sebagai salah satu cagar budaya terdapat di kelurahan Lere kecamatan Palu Barat.

❖ **Pantai Talise**

Pantai Talise merupakan obyek wisata bahari yang memiliki panorama indah yang terbentang sepanjang jalan Raja Moili dan Jalan Cut Mutiah. Di pantai ini pengunjung dapat menikmati terbenamnya matahari di sela sela gunung Gawalise sambil menyaksikan para nelayan menjala ikan. Sedangkan pada malam hari, pantai yang terletak di tengah kota Palu banyak dikunjungi masyarakat untuk menikmati makanan dan minuman tradisional khas Kota Palu.

❖ **Sarung Tenun Donggala**

Sarung Donggala adalah kain tenun tradisional diproduksi dalam bentuk tenun ikat yang memiliki ciri dan motif spesifik. Teknik pembuatannya masih secara manual dengan peralatan tradisional atau ATBM. Bahan baku Sarung Donggala berasal dari benang baik sutra maupun non sutra. Benang-benang itu biasanya sudah diberi zat pewarna. Sarung tenun ini dapat dijumpai di beberapa toko di Kota Palu, sedangkan atraksi penenunan dapat disaksikan langsung oleh pengunjung di Kelurahan Watusampu Kecamatan Palu Utara, Desa Towale Kecamatan Banawa Selatan dan Desa Wani di Kecamatan Tawaili, Kabupaten Donggala.

❖ **Makanan Khas**

Kota Palu, seperti halnya wilayah lainnya di Indonesia mempunyai beragam makanan khas telah dikenal oleh masyarakat. Makanan tersebut antara lain Kaledo, Uta Dada, Bau Tunu dan Uta Kelo yang bisa dijumpai di beberapa rumah makan yang menjual makanan khas tersebut.

❖ Makam Datok Karamah

Salah satu saksi sejarah masuknya agama Islam pertama di Sulawesi Tengah adalah Makam Dato Karama yang terletak di Kampung Lere, Kota Palu. Nama asli Dato Karama adalah Abdullah Raqie, seorang tokoh agama Islam asal Minangkabau, Sumatera Barat. Sekitar abad XVII Abdullah Raqie tiba di Palu untuk menyebarkan agama. Beliau diberi gelar Dato Karama karena memiliki kesaktian. Masyarakat mengaguminya dan memeluk agama Islam termasuk Raja Kabonena bernama ***I Pue Njidi. Dato Karama*** menikah dengan ***Ince Jille*** dan dikaruniai dua anak perempuan, ***Ince Dongho*** dan ***Ince Saharibanong***. Karena dianggap memiliki kesaktian makam Dato Karama hingga kini selalu diziarahi, bahkan banyak orang datang melepaskan nazarnya di makam tersebut. Profil dan potensi pengembangan pariwisata di Kota Palu secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Profil Kepariwisataan Kota Palu

a. Potensi Obyek Dan Daya Tarik Wisata		
1. Objek dan daya tarik wisata alam		Teluk Palu (Pantai Talise, Pantai Karampe, Taman Ria, Pantai Tumbelaka, Taipa Beach, Nikki Beach, Pantai Mamboro, Kampoenng Nelayan), Danau Sibili, Wisata Ekologi di Poboya
2. Objek dan daya tarik wisata budaya		Pertunjukan Seni – Budaya (Musik Kakula, Seni Sastra Dadendate), Ritual Balia, Taman Budaya, Gedung Graha Hasan Bahasyuan
3. Objek dan daya tarik wisata buatan/khusus		Paralayang (Bukit Matantimali), Motocross dan Golf (Tondo), Jet Ski (Teluk Palu)
b. Profil kunjungan wisatawan (Wisnus/Wisman)		
1. Wisatawan Nusantara		
• Jumlah kunjungan		54.786 orang (2008)/128.615 (2009)
• Trend pertumbuhan		Meningkat 57,40%
• Asal wisatawan		Jakarta, Surabaya, Bandung, Manado, Makassar dll
• Tujuan/motivasi kunjungan		Naturalisme kondisi alam, Keunikan alam dan Hasanah Budaya, Eksotisme alam, Riset dan kajian ilmu pengetahuan, Interaksi dengan

		masyarakat local
	• Lama tinggal	2 s/d 5 hari
	• Tingkat pembelanjaan	Rata-rata Rp. 1 Juta s/d 5 Juta/Hari
2. Wisatawan Mancanegara		
	• Jumlah kunjungan	2.177 orang (2008)/758 (2009)
	• Trend pertumbuhan	Menurun 187,20%
	• Asal wisatawan	Jerman, Italia, Prancis, Belanda, USA, Jepang, Spanyol, Inggris, Belgia, Swiss, China, Australia, Austria, Korea selatan
	• Tujuan/motivasi kunjungan	Naturalisme kondisi alam, Keunikan alam dan Hasanah Budaya, Eksotisme alam, Riset dan kajian ilmu pengetahuan, Interaksi dengan masyarakat local
	• Lama tinggal	2 s/d 5 hari
	• Tingkat pembelanjaan	Rata-rata Rp. 1 Juta s/d 5 Juta/Hari
c. Fasilitas pendukung wisata		
1. Akomodasi		
	• Jumlah akomodasi bintang dan non bintang	3 unit bintang, 55 unit non bintang
	• Kapasitas kamar/room	212 bintang, 932 non bintang
	• Tingkat hunian	54,42 % bintang, 25,99 %
	• Lokasi sebarannya	Wilayah Kota Palu
2. Rumah makan dan Restoran		
	• Jumlah rumah makan lokal dan spesifikasi menu	263 unit
	• Jumlah rumah makan internasional dan spesifikasi menu	51 Unit
	• Kapasitas	Rata-rata 50 – 200 Orang dan khusus Swiss Bell Resto 750 Orang
3. Agen Perjalanan		45 unit
4. Biro Perjalanan Wisata		19 Nit
5.Artshop/Toko Cenderamata		6 Unit
6.Fasilitas Hiburan/ <i>Entertainment</i>		Karaoke, Cafe, Diskotik, Live Music, Bilyar
	a. Jumlah	62 unit
7. Fasilitas kesehatan		
	a. Jumlah	8 RSU yaitu; 2 RSU Pemerintah, 4 RSU Swasta dan 2 RSU ABRI

d. Aksesibilitas		
	Transportasi Udara	
	a. Jumlah dan status bandara (Internasional/ Domestik)	1 Buah (domestik)
	b. Peta lokasi bandara	
	c. Spesifikasi teknis dan fasilitas bandara/terminal	Panjang Landasan Pacu: 2.067 meter, Kelas II, Jenis Pesawat Boeing 737, F 100 dan sejenis lainnya
	d. Profil statistik bandara (5 tahun)	
	1. Data keberangkatan penerbangan	Berangkat 2.707 Orang
	2. Data kedatangan penerbangan	Datang 2.707 Orang
	e. Maskapai Penerbangan	
	1. Maskapai penerbangan nasional	1. Garuda Jumlah penerbangan 7 kali per hari/minggu 2. Lion/Wing Air Jumlah penerbangan 7 kali per hari/minggu 3. Batavia Air Jumlah penerbangan 7 kali per hari/minggu 4. Sriwijaya Air Jumlah penerbangan 7 kali per hari/minggu 5. Merpati Airlines Jumlah penerbangan 3 kali per hari/minggu 6. Express Air Jumlah penerbangan 3 kali per hari/minggu
	Transportasi Darat (Terminal Bus)	Terminal Mambo, Terminal Tipo dan Terminal Petobo
	a. Jumlah stasiun (Internasional/ Domestik)	3 Buah (Domestik)
	e. Armada Bus	Jumlah 1.768
	1. Nama armada bus	PO. Jawa Indah, PO. Honda Jaya, PO. Batutumunga, PO. Touna Indah, PO. Togean Indah, PO. Sahabat Anda, PO. New Armada, PO. Alugoro, PO. Sinar Wahyu, PO. Imam Stanless, PO. Cahaya Bone, PO. Andaria, PO. Herlina Kiki, PO. Lemans dll
	Transportasi Air (Pelabuhan)	
	a. Jumlah dan status pelabuhan (Penumpang/Barang)	1 pelabuhan penumpang, 1 pelabuhan barang
	b. Peta Lokasi Pelabuhan	Pelabuhan Pantoloan dan Pelabuhan Ferry Taipa, Kecamatan Palu Utara
	c. Spesifikasi teknis dan fasilitas pelabuhan	Ruang Tunggu calon Penumpang
	e. Armada Kapal	1. KM. Nggapulu Jumlah pelayaran 1 per 2 (dua) minggu

	2. Ferry KMP Pradipta Dharma Taipa
Data Fasilitas dan Moda Transportasi Umum Lainnya	Rental Mobil dalam berbagai merk dan jenis kendaraan

Sumber : Survei Parawisata Kota Palu 2011 (diolah kembali)

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

a) Banjir

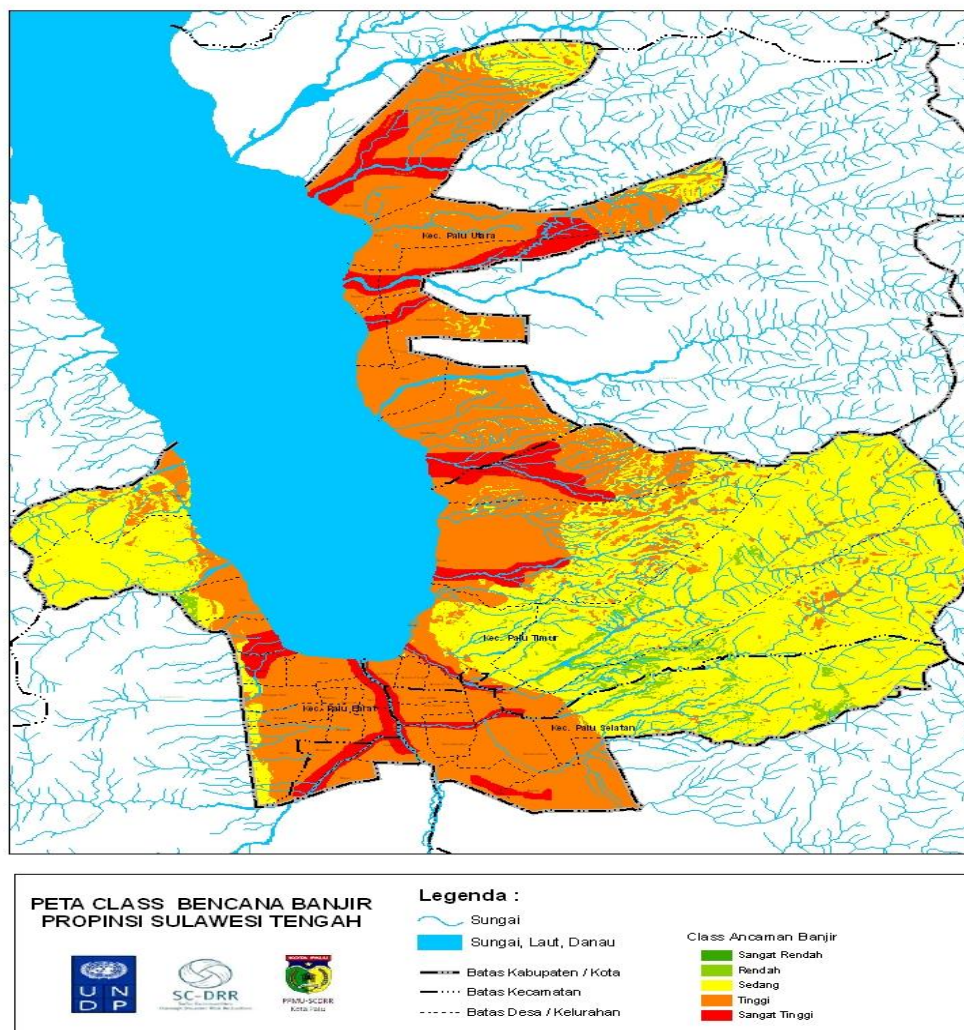
Kota Palu mempunyai beberapa kawasan yang rawan terhadap bencana banjir. Disamping faktor curah hujan, faktor topografi sangat berpengaruh, termasuk diantaranya beda tinggi dasar sungai dan tanah setempat relatif kecil. Karakteristik banjir di Kota Palu adalah berupa banjir bandang dengan periode genangan singkat. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi permukaan lahan tandus serta topografi wilayah yang memiliki kelerengan. Tiga arah aliran utama sungai serta karakteristik banjir di Kota Palu adalah :

- Sungai yang berhulu di timur berarah timur-barat bermuara di Teluk Palu, secara topografi potensi banjir genangan relatif kecil tetapi mengingat adanya beda tinggi yang cukup besar maka dapat menimbulkan banjir debris yang membawa sedimentasi material yang cukup besar. Sungai Tawaeli (Kelurahan Lambara dan Kelurahan Panau), Sungai Taipa (Kelurahan Taipa), Sungai Layana (Kelurahan Mamboro dan Kelurahan Layana Indah), Sungai Watutela (Kelurahan Tondo) dan Sungai Pondo (Kelurahan Poboya, Kelurahan Lasoani, Kelurahan Tanamodindi dan Kelurahan Talise).
- Sungai yang berhulu di barat berarah barat-timur bermuara di Teluk Palu, secara topografi potensi banjir relatif kecil tetapi mengingat adanya beda tinggi yang cukup besar maka dapat menimbulkan banjir debris yang membawa sedimentasi material yang cukup besar. Sungai Uwenumpu, Sungai Kalora (Kelurahan Donggala Kodi, Kelurahan Kabonena, Kelurahan Silae dan Kelurahan Tipo), Sungai Buluri (Kelurahan Tipo dan Kelurahan Buluri).
- Sungai yang berhulu di barat, timur dan selatan menyatu di S. Palu. Kearah pusat kota sungai ini sangat berpotensi menimbulkan banjir

genangan karena gradien kelerengan yang rendah serta adanya kawasan hunian yang terletak pada lokasi yang memiliki ketinggian mendekati elevasi bantaran sungai. Kawasan tersebut terdapat di kecamatan Palu Barat (Kelurahan Nunu, Kelurahan Ujuna, Kelurahan Baru dan Kelurahan Lere), Kecamatan Palu Selatan (Kelurahan Pengawu, Kelurahan Palupi, Kelurahan Tavanjuka, Kelurahan Birobuli Selatan, Kelurahan Tatura Selatan, Kelurahan Lolu Utara dan Kelurahan Lolu Selatan), Kecamatan Palu Timur (Kelurahan Besusu Barat).

Gambar 2.3. menyajikan peta tentang ancaman banjir pada pada wilayah Kota Palu sebagai berikut :

Gambar 2.4
Peta Kelas Ancaman Bencana Banjir



b) Gempa Bumi

Di Kota Palu, gempa bumi yang potensial terjadi adalah jenis gempa bumi tektonik. Gempa jenis ini diakibatkan oleh pergeseran didalam bumi. Magnitude gempa bumi berkisar kecil sampai besar, daerahnya luas, kedalaman sumber gempa bisa dangkal, menengah hingga dalam. Aktivitas gempa bumi di Kota Palu dan sekitarnya terutama dikarenakan oleh patahan aktif Palu Koro dan Patahan Pasternoster.

Jalur gempa sangat berkaitan dengan jalur patahan. Kota Palu dilalui/dipengaruhi oleh tiga jalur patahan yang saling sejajar berarah barat laut –tenggara, yaitu :

1. Patahan vertikal di sebelah timur melewati jalur perbukitan
2. Patahan vertikal di bagian tengah Kota Palu, melewati Tondo, Talise, Biromaru, Bora dan memanjang ke arah Palolo.
3. Patahan vertikal di sebelah barat. Jalur patahan secara relatif terdapat memanjang dari tepi pantai Kabonga melewati Loli, Buluri, Watusampu, Balane dan selanjutnya memanjang ke selatan yang kemudian akan bersambung dengan patahan Matano.

Ketiga patahan tersebut secara regional merupakan akibat gravitasi dari proses patahan geser Palu-Koro. Berdasarkan letak dan orientasi garis patahan tersebut maka wilayah yang sangat dekat akan jalur patahan rawan kerusakan akibat gempa adalah : Watusampu, Buluri, Silae, Kabonena, Donggala Kodi dan Duyu.

c) Tanah Longsor

Longsor adalah pergerakan massa batuan/tanah dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Longsor mudah terjadi pada wilayah yang relatif terjal dengan formasi batuan yang telah mengalami pelapukan dan erosi berat, dan juga pada wilayah rawan gempa. Agen utamanya adalah hujan dan kadang-kadang dipicu oleh beban dan getaran serta akar tunggang. Lokasi longsor dan rawan longsor banyak ditemui di sisi-sisi jalan, tebing-tebing dekat sungai (di

bagian hulu), tebing sungai dan lahan perkebunan.

Wilayah di Kota Palu yang teridentifikasi rawan longsor adalah wilayah sebelah barat Silae, Kabonena dan Donggala Kodi, hulu sungai Watutela, dan tebing bukit di Poboya. Pengamatan di wilayah bantaran sungai menunjukkan kondisi rawan gerusan tebing sungai di S. Taipa, S. Watutela dan S. Poboya. Gerusan pada tebing sungai Poboya ke arah Talise bahkan mengancam struktur jalan dan jembatan dan kawasan perumahan pada bantaran sungai.

d) Tsunami

Tsunami pada prinsipnya diawali oleh gempa bumi, yang menimbulkan gangguan impulsif terhadap air laut karena adanya perubahan bentuk dasar laut.

Proses terjadinya tsunami dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Gempa bawah laut merenggutkan massa besar air laut dalam satu hentakan kuat.
- Gelombang balik air menerjang dengan kecepatan hingga 800 Km/jam
- Mendekati pantai, gelombang melambat namun mendesak ke atas
- Gelombang menghempas ke daratan dan menghancurkan apapun di belakang pantai

Wilayah Selat Makassar dimana Kota Palu terdapat memiliki frekuensi yang tinggi kejadian tsunami. Selat ini memiliki aktivitas seismik akibat adanya konvergensi empat lempeng tektonik yang menghasilkan struktur yang kompleks. Kenampakan *tsunamigenic* utama di Selat Makassar adalah zone patahan Palu-Koro dan Pasternoster, yang membentuk batas cekungan Selat Makassar. Analisis seismisitas, tektonik dan sejarah tsunami menunjukkan kedua zona patahan ini memiliki karakteristik yang berbeda.

Zone patahan Palu-Koro memicu gempa dangkal yang menghasilkan tsunami dengan kekuatan konsisten dengan kekuatan gempa. Sedangkan zone patahan Pasternoster menghasilkan gempa

dengan kekuatan tsunami yang lebih besar daripada kekuatan gempa. Hal ini disebabkan oleh adalah longsor di bawah laut akibat gempa.

Perairan pantai Kota Palu berpeluang terjadi tsunami, dikarenakan gempa-gempa yang berpusat di barat laut Kota Palu, yaitu Selat Makassar dan sekitarnya. Gempa bumi yang terjadi di wilayah ini memiliki magnitudo $> 6,3$ SR, kedalaman dangkal (kurang dari 60 km), bentuk patahan naik, turun atau terbelah dan bentuk pantai yang cekung memungkinkan energi gelombang yang terjadi dapat terakumulasi menjadi lebih besar di Teluk Palu, yaitu kemungkinan terjadinya gelombang tsunami bisa mencapai $U_p > 15\text{m}$ (berkategori berbahaya, *BMG Palu, 2004*). Berdasarkan data BMG Palu tersebut, wilayah Kota Palu yang rawan tsunami ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Wilayah Kota Palu Rawan Gelombang Pasang Tsunami

No.	Kecamatan	Kelurahan
1	Palu Utara	Panau, Kayumalue, Baiya, Lambara, Mamboro dan Taipa dan Pantoloan.
2	Palu Timur	Talise, Tondo, Layana Indah, Besusu Barat
3	Palu Selatan	Dataran banjir S. Palu di Lolu Utara dan Lolu Selatan
4	Palu Barat	Ujuna, dataran banjir S. Palu di Nunu, Silae, Tipo, Buluri, Watusampu dan Lere

Sumber : *BMKG Kota Palu, 2004*

e) Abrasi dan Sedimentasi

Istilah digunakan untuk menunjukkan erosi yang terjadi di pantai. Diduga kuat penyebab utama abrasi ini adalah karena hilang atau rusaknya terumbu karang di perairan sekitar pantai dan hutan mangrove di zone pasang-surut (pasang-surut) pantai. Gejala abrasi di wilayah Kota Palu sangat jelas terlihat di pantai Talise dan Taman Ria. Abrasi tersebut telah merusak tanggul pantai, bahkan telah merusak badan jalan.

Sedimentasi adalah proses pengendapan material batuan ataupun fosil-fosil tumbuhan dan binatang. Dalam peristiwa yang

tampak dalam pandangan sehari-hari, sedimentasi dapat dikatakan sebagai proses akhir dari erosi, longsor dan abrasi. Sedimentasi umumnya terjadi pada tempat-tempat yang rendah seperti lembah, dasar danau, dasar laut dan dasar sungai.

Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh sedimentasi adalah pendangkalan. Jika terjadi di dasar sungai maka daya tampung sungai tersebut berkurang, sehingga pada waktu musim penghujan dapat menyebabkan banjir. Sedangkan, jika terjadi di pantai dapat mematikan terumbu karang, mangrove dan aktivitas pelayaran dekat pantai. Gejala sedimentasi di wilayah Kota Palu sangat jelas terlihat di sepanjang badan Sungai Palu, Sungai Lewara dan beberapa sungai lainnya, di muara sungai Palu dan Tanjung Tondo.

2.1.4. Aspek Demografis

a). Jumlah dan Rasio Penduduk

Penduduk Kota Palu berdasarkan hasil proyeksi SUPAS tahun 2010 adalah 336,532 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kota Palu pada tahun 2010 adalah sebesar 102 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki atau jumlah penduduk perempuan relatif lebih kecil daripada penduduk laki-laki.

Tabel 2.16
Jumlah dan Rasio Penduduk Kota Palu
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Palu Barat	49,791	48,948	98,739	102
2.	Palu Selatan	61,870	60,882	122,752	102
3.	Palu Timur	38,526	37,441	75,967	103
4.	Palu Utara	19,691	19,383	39,074	102
Kota Palu 2010		169,878	166,654	336,532	102

Sumber : BPS Kota Palu, 2011

b). Tingkat Kepadatan Penduduk

Kota Palu merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi di Propinsi Sulawesi Tengah yaitu rata-rata 852 orang per kilometer persegi. Secara rinci tingkat kepadatan penduduk per kecamatan yang di wilayah Kota Palu tercantum pada tabel berikut

Tabel 2.17
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Palu
Menurut Kecamatan Tahun 2010

No.	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1.	Palu Barat	57.47	98,739	1,718
2.	Palu Selatan	61.35	122,752	2,001
3.	Palu Timur	186.55	75,967	407
4.	Palu Utara	89.69	39,074	436
Kota Palu 2010		395.06	336,532	852

Sumber : BPS Kota Palu, 2011

c). Komposisi Umur Penduduk

Komposisi atau struktur umur penduduk Kota Palu selama tahun 2009 hampir 70,00 persen berada pada kelompok umur 0-34 tahun, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu berada pada kelompok penduduk usia muda.

Berdasarkan perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif dengan penduduk usia produktif, dapat diketahui besarnya angka ketergantungan pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,40 artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebanyak kurang lebih 49 orang penduduk usia tidak produktif (0-14) tahun dan 65 tahun ke atas.

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kota Palu Tahun 2009 - 2010

No.	Kelompok Umur	2009		2010	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	Muda (0 - 14 Tahun)	92,162	29.43	96,360	28.63
2	Produktif (15 - 64 Tahun)	210,068	67.08	232,034	68.95
3	Tua (65 Tahun ke atas)	10,949	3.5	8,138	2.42
4	Tidak Produktif (1) + (3)	103,111	32.92	104,498	31.05
5	Penduduk Kota Palu	313,179	100	336,532	100
6	Rasio Ketergantungan	0.49		0.45	

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah Kembali)

2.2. ASPEK KESEJAHTRAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a). Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah pergeseran dan struktur perekonomian daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi.

Di Kota Palu Pembangunan perekonomian menunjukkan kemajuan yang berarti, kondisi ini ditunjang dengan perbaikan iklim makroekonomi Kota Palu yang semakin membaik. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir (periode 2006-2009) dengan penilaian terbaru tahun dasar 2000, menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan ditandai dengan tingginya angka pertumbuhan ekonomi yaitu 7,59 persen dengan total PDRB atas dasar harga berlaku saat ini sebesar 5.332.677 juta rupiah. Indikator ini memperlihatkan bahwa serangkaian kebijakan mendasar yang

telah digariskan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja sektor-sektor ekonomi telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam pembangunan di Kota Palu. Pertumbuhan ekonomi Kota Palu terus mengalami peningkatan hingga mencapai 7,23 persen pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 yaitu menjadi 7,59 persen.

Berdasarkan distribusi PDRB atas dasar Harga Berlaku tahun 2009 struktur perekonomian Kota Palu selama ini ditunjang oleh 9 (sembilan) sektor pembentuk PDRB. Data perkembangan distribusi setiap sector usaha terhadap PDRB kota Palu tahun 2006 – 2009 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2006 – 2009
Atas Dasar Harga Konstan Kota Palu

No.	Sektor	Tahun							
		2006		2007		2008		2009	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Pertanian	83,065	2.50	91,85	2.40	100,351	2.16	126,375	2.37
2	Penggalian	141,704	4.27	158,811	4.15	192,619	4.14	230,641	4.33
3	Industri Pengeloa	489,586	14.74	542,797	14.20	610,198	13.11	672,287	12.61
4	Listrik dan Air Bersih	97,545	2.94	118,298	3.09	138,424	2.97	161,542	3.03
5	Bangunan	325,056	9.78	360,3	9.43	467,545	10.04	545,992	10.24
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	451,029	13.58	528,386	13.82	639,713	13.74	738,597	13.85
7	Angkutan dan Komunikasi	417,772	12.58	497,09	13.01	605,895	13.02	690,497	12.95
8	Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	403,229	12.14	468,042	12.25	558,004	11.99	627,206	11.76
9	Jasa-Jasa	913,21	27.49	1,056,718	27.65	1,333,501	28.65	1,539,540	28.87
PDRB		3,322,197	100	3,822,292	100	4,655,152	100	5,332,677	100

Sumber: BPS Kota Palu, 2011

Berdasarkan peranan dari masing-masing sektor tersebut, jelas terlihat bahwa perekonomian Kota Palu telah didominasi oleh sektor tersier (sektor Jasa-jasa, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Angkutan dan Komunikasi dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan) dengan peranan sebesar 67,43 persen terhadap total

pendapatan regional Kota Palu. Adapun perkembangan kontribusi sektor PDRB atas dasar harga kostan dan berlaku tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Perkembangan Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2006 – 2009
ADH Konstan dan ADH Berlaku Kota Palu

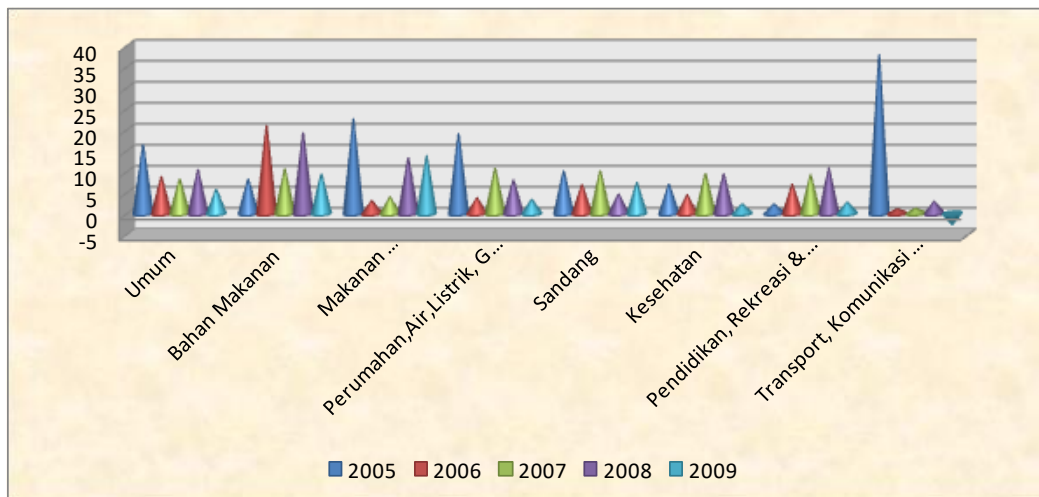
No.	Sektor	Tahun							
		2006		2007		2008		2009	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1	Pertanian	2.90	2.50	2.89	2.40	2.91	2.16	2.84	2.37
2	Penggalian	4.31	4.27	4.33	4.15	4.36	4.14	4.50	4.33
3	Industri Pengelola	13.61	14.74	13.40	14.20	13.05	13.11	12.81	12.61
4	Listrik dan Air Bersih	2.32	2.94	2.32	3.09	2.33	2.97	2.33	3.03
5	Bangunan	9.40	9.78	9.19	9.43	9.20	10.04	9.25	10.24
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13.27	13.58	13.36	13.82	13.35	13.74	13.28	13.85
7	Angkutan dan Komunikasi	12.23	12.58	12.81	13.01	12.93	13.02	13.05	12.95
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	12.33	12.14	12.38	12.25	12.56	11.99	12.52	11.76
9	Jasa-Jasa	29.41	27.49	29.31	27.65	29.30	28.65	29.41	28.87
PDRB		100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah Kembali)

b). Laju Inflasi

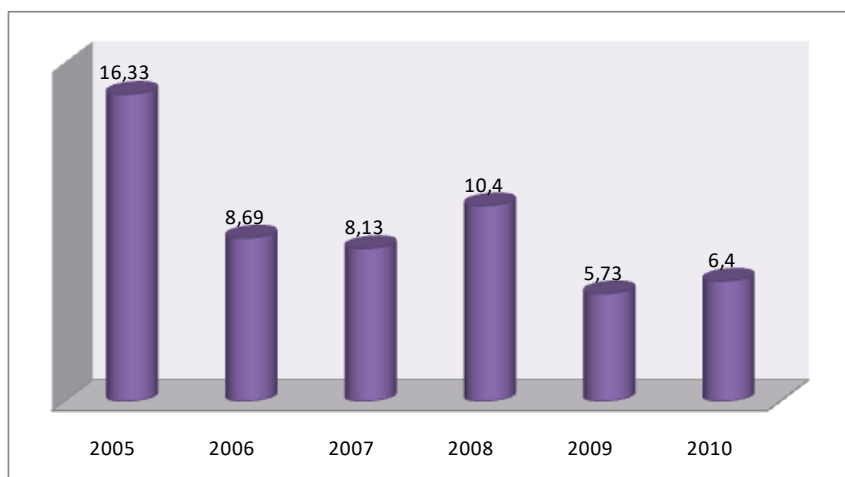
Pembangunan sektor ekonomi sangat tergantung pada keadaan fiskal dan moneter. Apabila keadaan tersebut tidak terkendali akan mengakibatkan tingginya inflasi sehingga daya beli masyarakat terhadap barang menurun, atau sebagai pertanda bahwa nilai uang semakin merosot. Secara rinci laju inflasi Kota Palu berdasarkan kelompok terlihat pada Tabel 2.20, sedangkan grafik perkembangan inflasi dari tahun ke tahun tercantum pada Gambar 2.4.

Tabel 2.21
Laju Inflasi Kota Palu Berdasarkan Kelompok
Tahun 2005 – 2009



Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (di olah kembali)

Gambar 2.5
Perkembangan Laju Inflasi Kota Palu Tahun 2005-2010



Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan pada dinamika perubahan kehidupan sosial yang demikian tinggi, berimplikasi terhadap pembangunan pendidikan yang senantiasa membutuhkan adaptasi dan akomodasi kebutuhan dengan

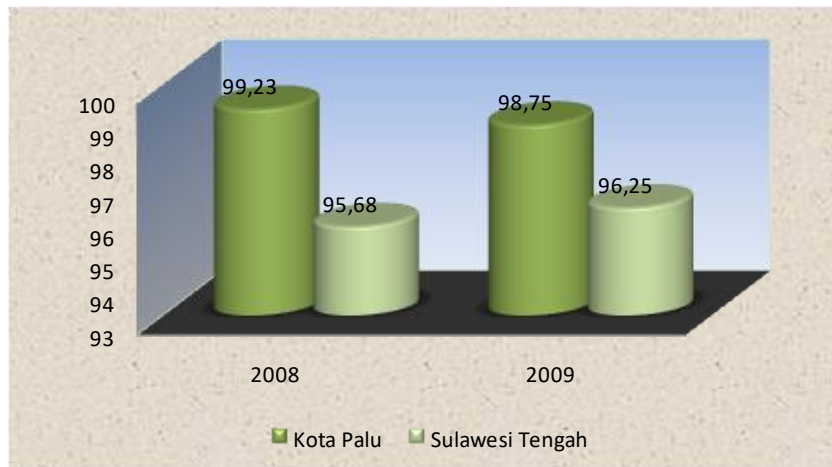
dunia kehidupan sosial tersebut. Dalam konteks demikian pada masa kini dan masa depan peran pendidikan semakin penting, terutama dalam mereorientasikan pola berfikir, bersikap dan bertindak yang sesuai dengan tatanan nilai sosial baru dalam rangka mengantisipasi dinamika perubahan pada segenap aspek kehidupan.

Kondisi daerah terkait fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat pada indikator berikut.

a) Angka Melek Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa. Kemampuan baca tulis ini tercermin dari data angka melek huruf (AMH) yang diartikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Keterampilan baca tulis ini dibutuhkan untuk mempelajari dan menguasai keterampilan lainnya. Adanya kemampuan membaca dan menulis akan meningkatkan peluang untuk mendapat pekerjaan maupun pelayanan yang lebih baik. Olehnya itu indikator ini tidak hanya digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan bidang pendidikan tapi juga sebagai indeks keberhasilan pembangunan secara umum. Gambar 2.6 berikut menyajikan gambaran angka melek huruf secara umum di Kota Palu, di mana penduduk Kota Palu dengan angka melek huruf periode 2008-2009 mencapai 98,75 persen.

Gambar 2.6
Persentase Angka Melek Huruf Di Kota Palu dan Propinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2008 – 2009



Sumber : Bappeda & PM Kota Palu, 2010

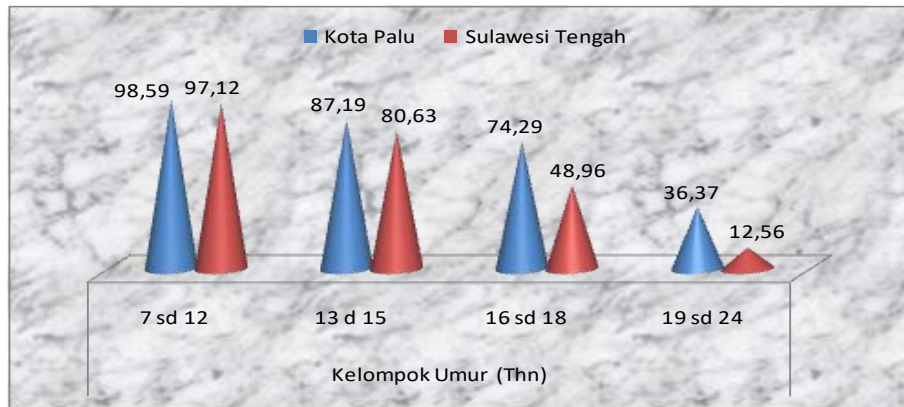
AMH Kota Palu dalam kurun waktu dua tahun terakhir, menunjukkan trend yang cukup tinggi dibandingkan dengan AMH Sulawesi Tengah sebesar 96,25 persen. Tingginya capaian angka melek huruf di Kota Palu pada periode tersebut antara lain disebabkan berhasilnya program kejar paket sebagai upaya penuntasan buta huruf, serta Kota Palu sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Tengah sehingga akses informasi dan fasilitas komunikasi relatif lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya di wilayah Sulawesi Tengah. AMH antara lain dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, maka melek huruf berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

b) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APK Kota Palu lebih tinggi dibandingkan APK Sulawesi Tengah dan semakin tinggi jenjang

pendidikan, semakin rendah APK sebagaimana tercantum pada gambar berikut.

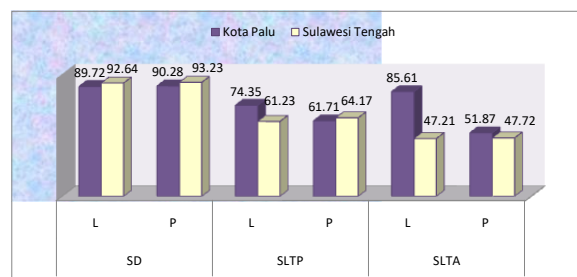
Gambar 2.7
Persentase APK Di Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008



Sumber : Dinas Pendidikan Sulteng, 2009

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan adalah ukuran banyaknya penduduk dibandingkan tingkat partisipasi penduduk sesuai sekolah. Persentase APM di Kota pada jenjang pendidikan SD lebih rendah dibandingkan APM Sulawesi Tengah baik perempuan maupun laki-laki seperti terlihat pada Gambar 2.7. Hal yang menarik yakni pada jenjang pendidikan SD, laki-laki dan perempuan relatif sama, akan tetapi pada tingkat SLTA, partisipasi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi disparitas gender.

Gambar 2.8
Persentase APM Di Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 – 2009



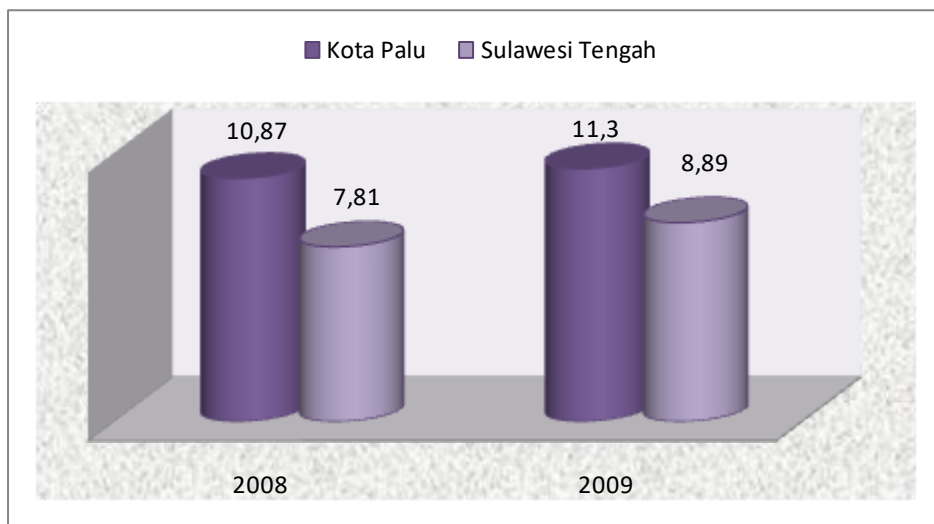
Sumber : BPS Sulteng 2008, IPM Sulteng dan PSW Untad 2008 (diolah kembali).

c) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang dijalani penduduk berusia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Palu pada keadaan tahun 2008 tercatat 10,87 tahun, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,43 menjadi 11,30 tahun keadaan tahun 2009. Selain itu, rata-rata lama sekolah di Kota Palu lebih tinggi dibandingkan rata-rata lama sekolah tingkat Sulawesi Tengah. Hal ini dapat disebabkan Palu merupakan pusat pendidikan di Sulawesi Tengah sehingga akses dan fasilitas pendidikannya relatif lengkap.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dan makin meningkat. Hal tersebut terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.9
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2008 – 2009



Sumber : Bappeda & PM Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

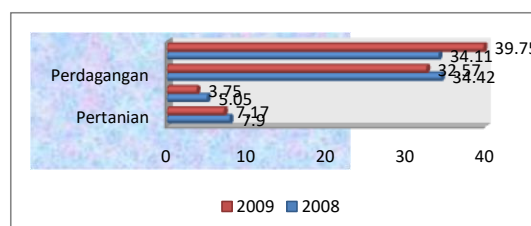
d) Ketenagakerjaan

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Namun tidak semua

penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain. Sekitar 66% dari total penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) di Kota Palu, termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan selama periode 2007-2009 dari 59, 67% menjadi 60,92%.

Berdasarkan grafik pada gambar 2.9. terlihat bahwa lapangan usaha di Kota Palu didominasi sektor jasa kemasyarakatan diikuti sektor perdagangan. Sedangkan sektor pertanian hanya menyerap sekitar 7,17% tenaga kerja. Hal ini disebabkan Kota Palu sebagai ibukota propinsi yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan pendidikan, sedangkan potensi lahan pertanian relatif terbatas. Adapun sektor industri paling sedikit menyerap tenaga kerja karena terbatasnya infrastruktur industri di Kota Palu. Masyarakat sebagian besar mengirimkan produk setengah jadi ke daerah lainnya, karena industri pengolahan bahan jadi masih terbatas.

Gambar 2.10
Persentase Penduduk Kota Palu Yang Bekerja
Berdasarkan Sektor Tahun 2008-2009



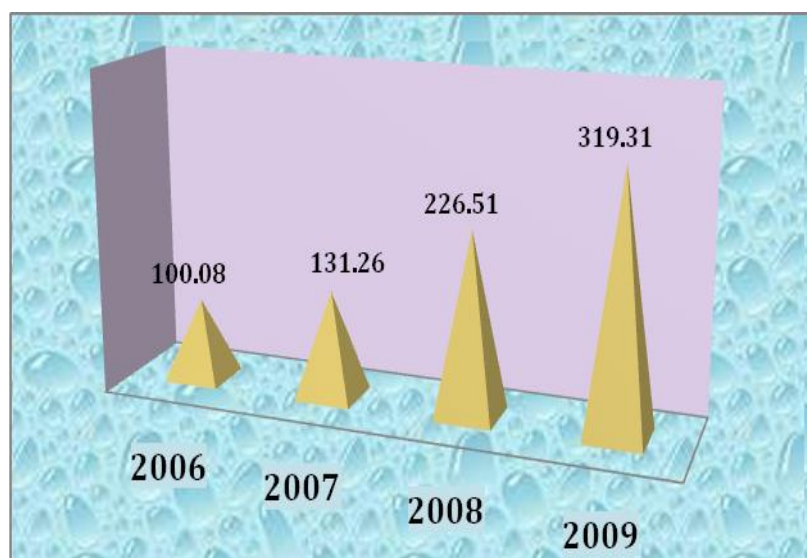
Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Kebudayaan daerah merupakan salah satu aset yang perlu dilestarikan sehingga dapat menjadi salah satu potensi lokal yang mampu menarik wisatawan baik lokal maupun asing. Kesadaran akan budaya lokal memberikan arah bagi perwujudan jati diri yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif.

Pengembangan seni dan budaya Kota Palu semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai seni dan budaya lokal. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk bidang tersebut adalah rasio grup kesenian yaitu jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. Adapun perkembangan grup kesenian di kota Palu dari tahun ke tahun terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.11
Perkembangan Grup Seni Kota Palu Tahun 2006 – 2009



Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah Kembali)

Pembinaan olah raga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan olah raga tingkat SD, SMP hingga SMA. Selain itu, pembinaan bagi atlet yang berprestasi terus dilakukan sehingga atlet Kota Palu mampu bersaing dalam pada skala regional bahkan nasional. olah raga Karate, sepak bola dan bola basket merupakan cabang olahraga yang banyak diminati di Kota Palu sebagaimana terlihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.22
Jumlah Induk Olahraga dan Atlet Menurut Jenis Kelamin
di Kota Palu Tahun 2009

No	Cabang Olahraga	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Anggar	16	8	24
2.	Atletik	38	19	57
3.	Biliyard	16	0	16
4.	Bola Basket	41	32	73
5.	Bola Volly	15	11	26
6.	Bridge	24	0	24
7.	Bulu Tangkis	21	11	32
8.	Catur	20	9	29
9.	Karate	83	15	98
10.	Kempo	37	0	37
11.	Pencak Silat	23	13	36
12.	Sepak Bola	80	0	80
13.	Sepak Takraw	20	18	38
14.	Taekondow	20	8	28
15.	Tenis	17	8	25
16.	Tenis Meja	11	10	21
17.	Tinju	24	0	24
Total		400	174	574

Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah terdiri dari beberapa urusan, antara lain:

a) Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subyek sekaligus obyek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, menciptakan kualitas masyarakat maju dan mandiri, bertumpu pada perspektif tersebut, maka upaya untuk mengembangkan kualitas sumberdaya manusia jelas sangat strategis. Terdapat beberapa indikator kinerja dalam bidang pendidikan yaitu:

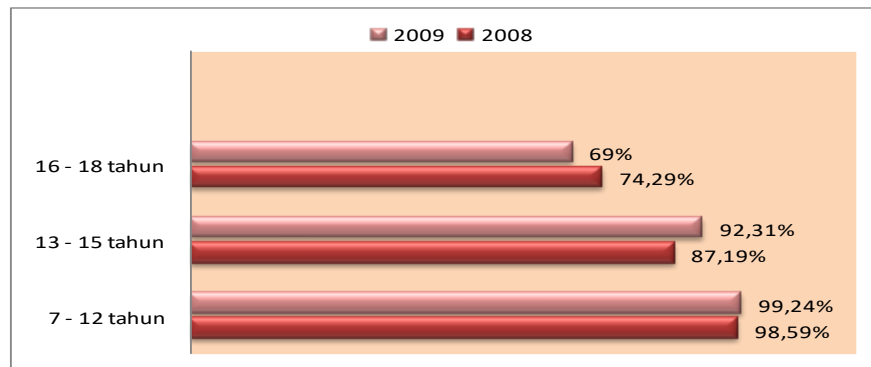
a.1). Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Suatu ukuran untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dinamakan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meningkatnya APS berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan layanan pendidikan. Gambar 2.101 memperlihatkan APS Kota Palu pada jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Berdasarkan grafik tersebut, pada jenjang pendidikan SD, APS mencapai hampir 100% dan semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah APS

Penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan social budaya (yaitu penduduk miskin, memiliki hambatan geografis, daerah perbatasan, dan terpencil serta pasca konflik maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik).

Untuk itu perlu strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah serta putus sekolah.

Gambar 2.12
Angka Partisipasi Sekolah Kota Palu Tahun 2008 – 2009



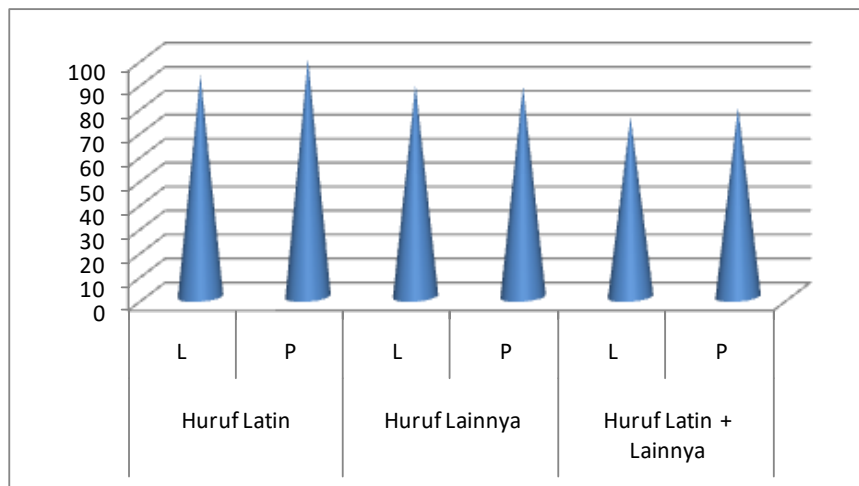
Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

a.2) Kemampuan Baca Tulis

Penduduk Kota Palu merupakan masyarakat yang heterogen sehingga penggunaan bahasa Indonesia relatif tinggi, meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari. Peranan bahasa nasional dalam suatu masyarakat majemuk seperti di Kota Palu sangat penting. Selain itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar.

Kemampuan baca tulis yang mencerminkan kemampuan untuk berkomunikasi secara tertulis dan kemampuan berbahasa Indonesia mencerminkan kemampuan berkomunikasi verbal, terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.13
Persentase Penduduk Umur 10 Tahun Ke Atas dan Kemampuan
Membaca dan Menulis Berdasarkan Jenis Kelamin



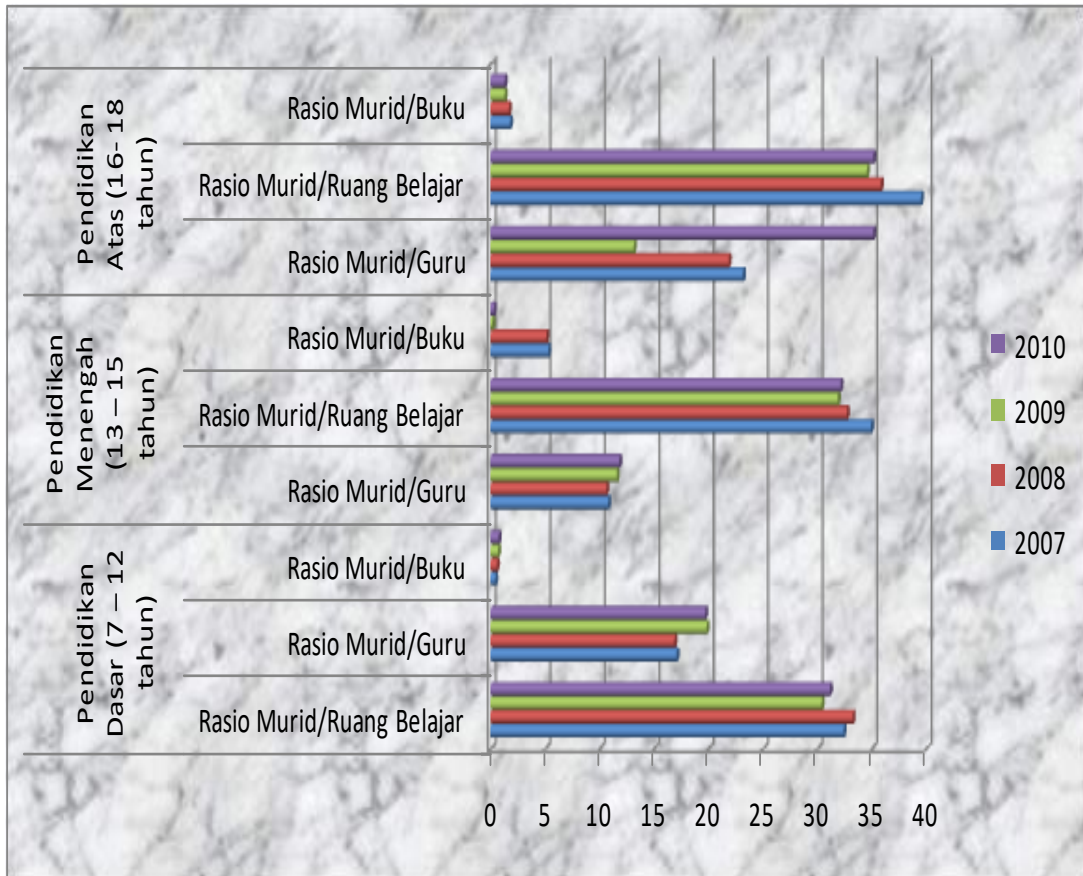
Sumber : PSW, 2009

a.3) Rasio Guru/Murid

Semakin meningkatnya APS, khususnya untuk jenjang pendidikan harus diikuti dengan meningkatnya fasilitas pendidikan, antara lain daya tampung ruang kelas serta rasio guru murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini selain mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Gambar berikut mencantumkan dengan rinci rasio antara murid dan guru, murid dan buku serta murid dan ruang belajar dalam kurun waktu 2007-2010.

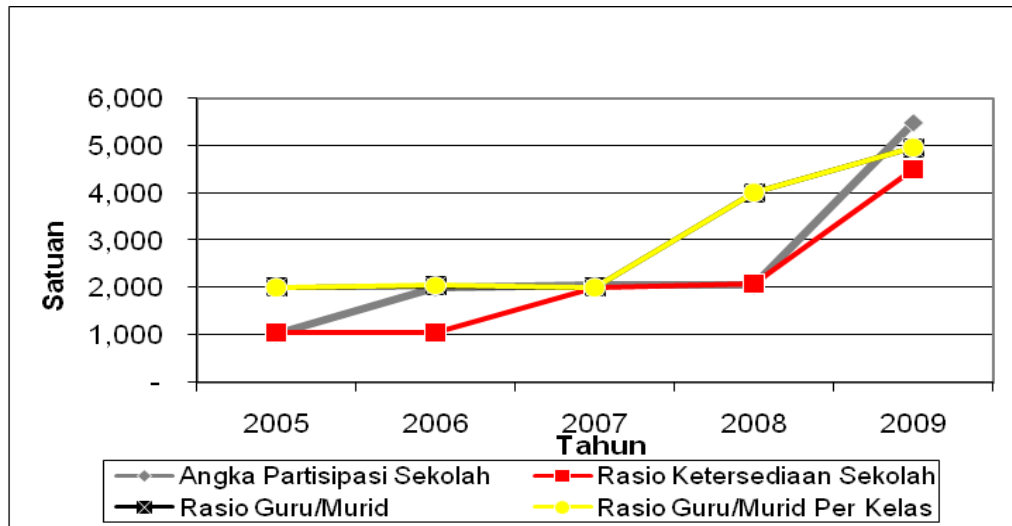
Gambar 2.14
Rasio Murid/Guru; Murid/Buku & Murid/Ruang Belajar
di Kota Palu Tahun 2007 – 2010



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palu, 2011

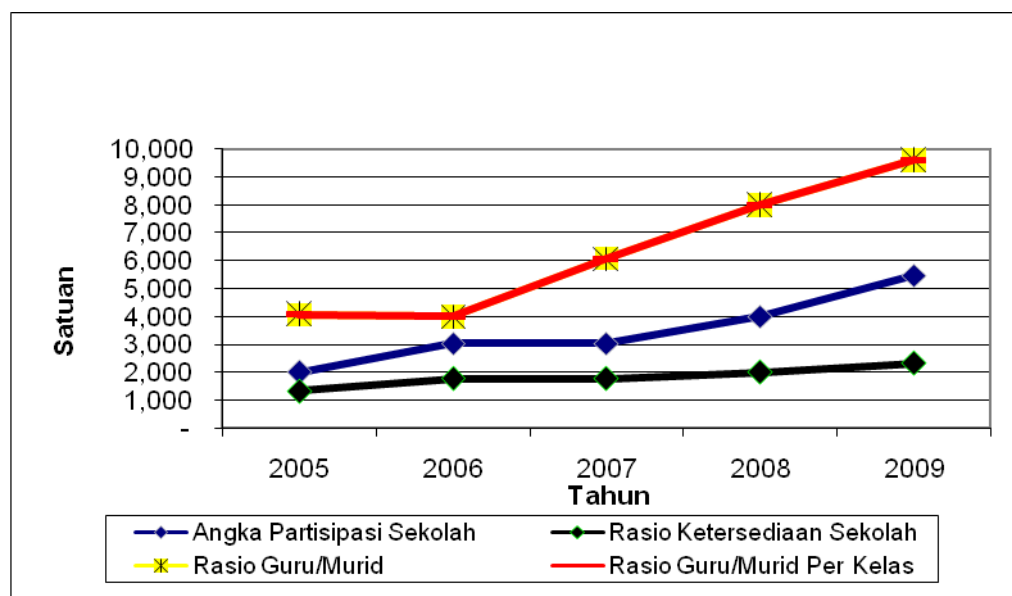
Gambaran pelayanan umum dalam konsep pendidikan dasar dan menengah di Kota Palu tercantum pada gambar 2.15 dan 2.16. Pada keempat indikator ini, baik dalam konsep Pendidikan Dasar maupun dalam konsep Pendidikan Menengah, secara umum menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Gambar 2.15
Persentase Pelayanan Umum Dalam Konsep Pendidikan Dasar



Gambar 2.16

Persentase Pelayanan Umum Dalam Konsep Pendidikan Menengah



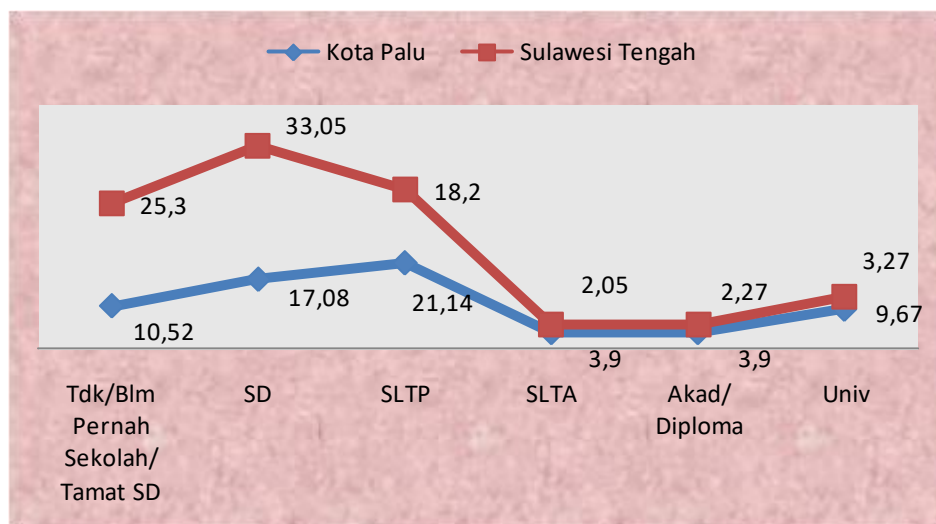
a.4) Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu indikator dampak yang menggambarkan tingkat pendidikan yang dicapai (ditamatkan) penduduk berumur 5 tahun keatas yang pernah sekolah. Secara umum penduduk Kota Palu dilihat dari tingkat pendidikan relatif semakin membaik. Tingkat

pendidikan yang ditamatkan penduduk Kota Palu sebagian besar masih tamat SD, sementara jenjang pendidikan yang semakin tinggi mempunyai persentase semakin kecil.

Rendahnya proporsi penduduk yang tamat diploma dan perguruan tinggi diduga karena; (1) Biaya pendidikan yang relatif tinggi, (2) Sarana pendidikan yang masih terbatas, (3) Program Universitas Terbuka, walaupun telah dirasakan tapi masih relatif terbatas, (4) Peran pemerintah yang sangat besar masih ditujukan pada pendidikan dasar.

Gambar 2.17
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Ditamatkan dan Status Pendidikan di Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009



Sumber : Bappeda & PM Kota Palu, 2010

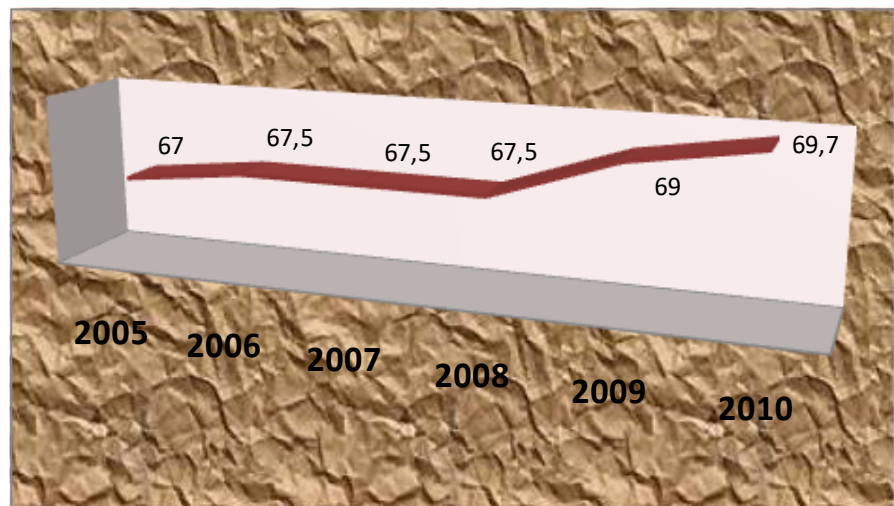
b) Kesehatan

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan serta perbaikan status gizi masyarakat.

b.1) Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) yang sangat ditentukan oleh peningkatan taraf hidup dan status kesehatan masyarakat. UHH dari tahun ke tahun bila diperhatikan terjadi peningkatan meskipun relatif kecil, ini dapat dilihat dari *OR Collectional of Baseline* data kerjasama DHS-BPS di mana pada tahun 2005 UHH Kota Palu adalah 67 tahun. Pada Tahun 2006, Tahun 2007 maupun Tahun 2008 UHH Kota Palu menjadi 67,5 tahun, pada Tahun 2009 menjadi 69,0 tahun, dan Tahun 2010 meningkat menjadi 69,7 tahun.

Gambar 2.18
Umur Harapan Hidup Masyarakat Kota Palu
Tahun 2005-2010



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palu, 2010

Meningkatnya usia harapan hidup menyebabkan peningkatan jumlah usia lanjut sehingga berdampak terhadap masalah penyakit degeneratif yang sering menyertai para usia lanjut, bersifat kronis dan multi patologis, serta dalam penanganannya memerlukan waktu lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan merupakan masalah utama bagi para Usila oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan upaya melalui pencegahan, pemeliharaan

dan peningkatan kesehatan disamping upaya penyembuhan dan pemulihan.

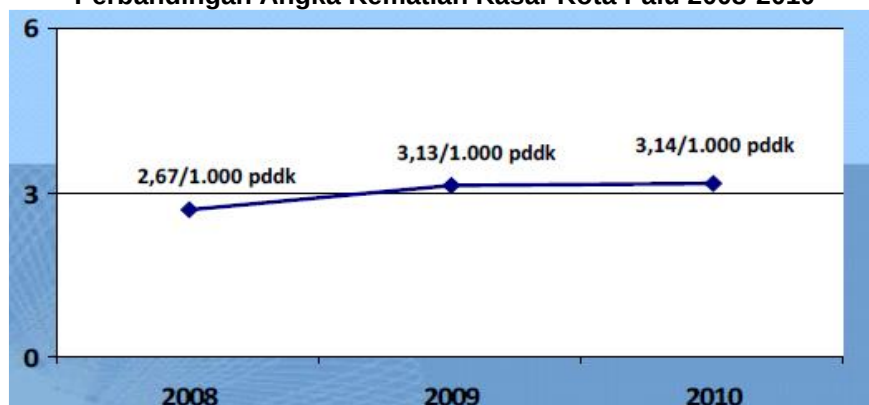
b.2) Angka Kematian

Angka kematian sangat erat kaitannya dengan angka kesakitan, dimana kematian merupakan variabel dependen (dipengaruhi) sedangkan kesakitan merupakan faktor independen (berpengaruh). Keberhasilan program pembangunan kesehatan dapat dilihat dengan adanya perubahan terhadap angka kematian, semakin tinggi angka kematian mengindikasikan kurang bagusnya program pembangunan kesehatan demikian pula sebaliknya.

❖ *Angka Kematian Kasar*

Angka kematian kasar di Kota Palu selama Tahun 2010 berdasarkan laporan Puskesmas sebanyak 982 orang atau sebesar 3,14 per 1.000 penduduk, sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 sebanyak 965 orang atau sebesar 3,13 per 1.000 penduduk dan Tahun 2008 sebanyak 826 orang atau sebesar 2.67 per 1.000 penduduk. Data ini jika dilihat dalam bentuk trend tiga tahunan menunjukkan terjadinya peningkatan CDR yang cukup signifikan.

Gambar 2.19
Perbandingan Angka Kematian Kasar Kota Palu 2008-2010



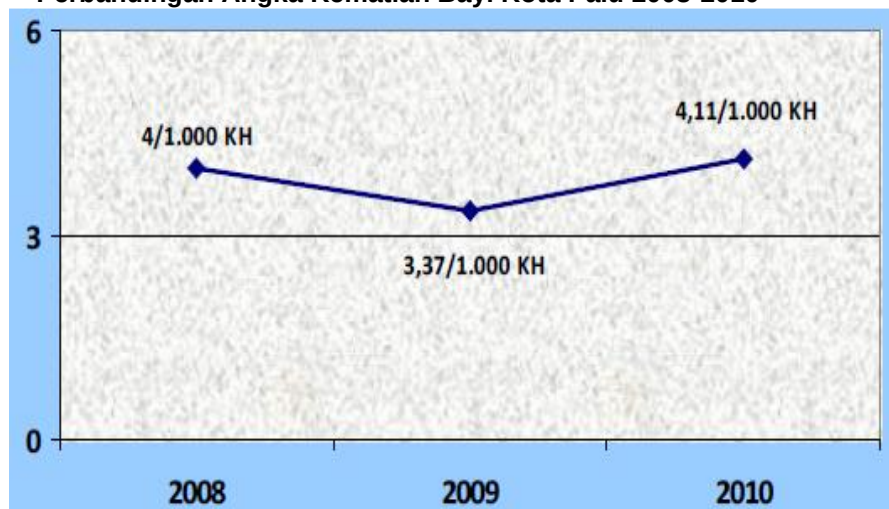
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu, 2010

❖ *Angka Kematian Bayi*

Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat. Upaya menurunkan Angka Kematian Bayi dan Balita tidak dapat dipisahkan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu, perbaikan gizi, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pelayanan rujukan serta dukungan lintas sektor, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat.

Hal-hal yang mempengaruhi kematian bayi antara lain adalah tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIAKB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Angka kematian bayi di Kota Palu selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya sebagai amana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.20
Perbandingan Angka Kematian Bayi Kota Palu 2008-2010



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu, 2010

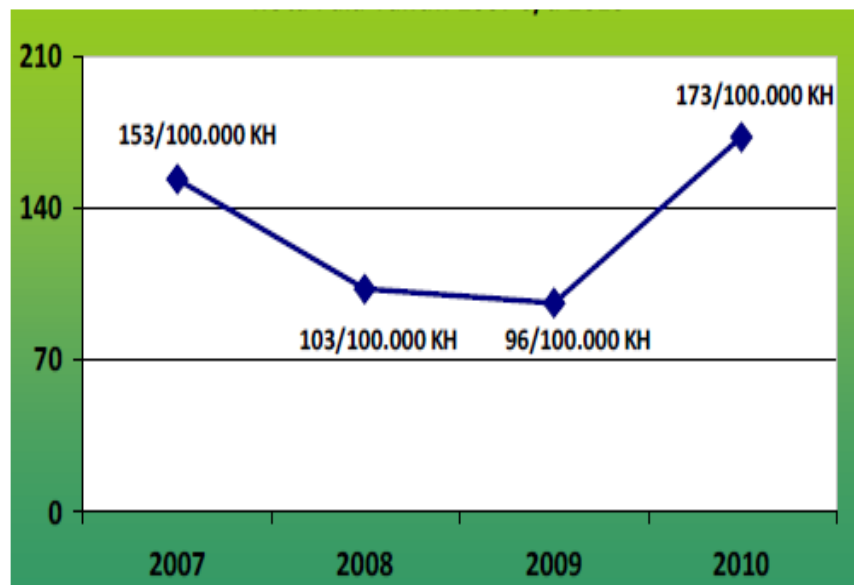
❖ **Angka Kematian Ibu**

Angka kematian ibu adalah indikator kesehatan yang menggambarkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan. Ada 3 golongan yang termasuk dalam kematian maternal yaitu kematian ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas (menyusui).

Faktor-faktor yang mempengaruhi angka ini diantaranya keadaan sosioekonomi, status kesehatan ibu selama masa kehamilan serta ketersediaan dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan perinatal dan obstetrik.

Angka kematian ibu (maternal) yaitu kematian ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas di Kota Palu berdasarkan laporan dari Puskesmas cenderung berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Hal tersebut terlihat pada gambar berikut

Gambar 2.21
Perbandingan Angka Kematian Ibu Kota Palu 2007-2010



b.3) Status Kesehatan

Status kesehatan menggambarkan derajat kesehatan masyarakat sebagai hasil upaya pembangunan bidang kesehatan. Indikator yang dapat digunakan ialah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Hasil Susenas 2009 menunjukkan sekitar 29,41 persen penduduk Kota Palu mendapat keluhan kesehatan, lebih rendah dibandingkan Propinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan angka sekitar 37,63 persen (Tabel 2.23). Indikator lain yang dapat menunjukkan status kesehatan ialah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan

merasa terganggu (sakit). Berbeda dengan indikator sebelumnya, indikator ini lebih spesifik karena keluhan penduduk yang diperhatikan tidak hanya yang mengeluh, akan tetapi juga berakibat terganggunya kegiatan yang biasa dilakukan.

Tabel 2.22
Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan
di Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2008 – 2009

Kabupaten/Kota	Tahun	
	2008	2009
Kota Palu	28.48	29.41
Sulawesi Tengah	39.65	37.63

Sumber : Bappeda & PM Kota Palu Tahun, 2010

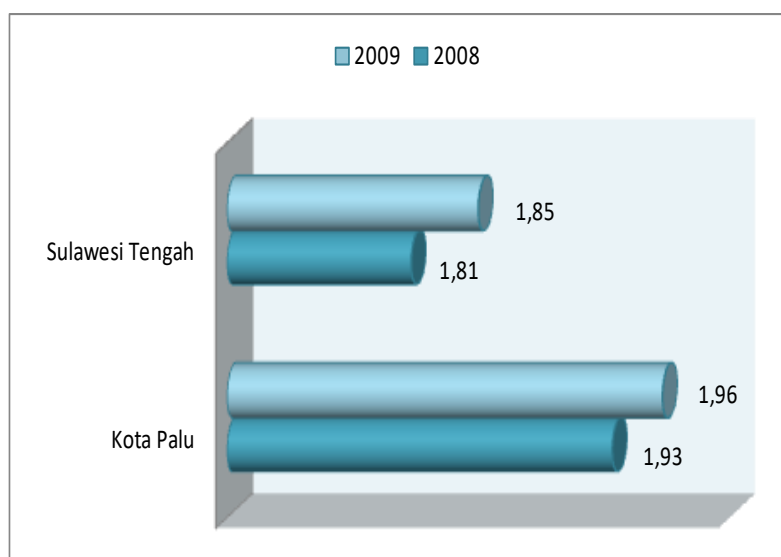
b.4) Akses Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan mutlak diperlukan. Semakin sulit akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan, akan semakin jelek status kesehatan penduduk tersebut.

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan ialah besarnya angka kunjungan selama sebulan ke fasilitas kesehatan yang diperoleh dari hasil Susenas. Rata-rata frekuensi kunjungan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan ke fasilitas kesehatan di Kota Palu tahun 2009 cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Hal ini menunjukkan semakin baiknya tingkat kesadaran penduduk Kota Palu terhadap kunjungan kesehatan ke fasilitas kesehatan di Kota Palu.

Gambar 2.22
Rata-rata Frekuensi Kunjungan Penduduk yang Mengalami

Keluhan Kesehatan di Kota Palu dan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 – 2009



Sumber : Bappeda & PM Kota Palu, 2010

Indikator lainnya yang menunjukkan akses terhadap fasilitas kesehatan ialah angka kontak pada fasilitas pelayanan kesehatan. Indikator ini menggambarkan besarnya proporsi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan yang melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan dari penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama periode sebulan survei dilakukan.

b.5) Rasio Puskesmas & Pustu per Satuan Penduduk

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan penyediaan sarana kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan. Sejak Tahun 2001 s/d 2009, jumlah Puskesmas yang ada di Kota Palu sebanyak 12 buah yang terdiri dari 11 Puskesmas non perawatan dan 1Puskesmas perawatan. Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk pada Tahun 2010 adalah 3,83.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Perkembangan jumlah Puskesmas, Pustu dan Puskesmas Keliling serta

Rasionya terhadap Penduduk di Kota Palu Tahun 2006 s/d 2010

Thn	Jumlah sarana					Ratio thd 100.000 pddk		
	Puskesmas			Pustu	Puskel	Pusk.	Pustu	Puskel
	Prw	Non Prw	Juml.					
2006	1	11	12	29	14	3,88	9,37	4,53
2007	1	11	12	29	14	3,94	9,52	4,59
2008	1	11	12	29	14	3,88	9,06	4,53
2009	1	11	12	28	14	3,89	9,40	4,54
2010	1	11	12	29	14	3,83	9,26	4,47

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu, 2010

b.6) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, jumlah rumah sakit di Kota Palu pada tahun 2009 sebanyak 9 unit, terdiri dari rumah sakit daerah sebanyak 2 unit, rumah sakit swasta sebanyak 5 unit serta rumah sakit ABRI dan POLRI sebanyak 2 unit. Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Palu tahun 2009 mencapai 0,003. Hal ini berarti bahwa untuk 1.000 jumlah penduduk Kota Palu pada tahun 2009 dilayani oleh rumah sakit sebanyak 0,003.

Perkembangan Rumah Sakit dapat diketahui melalui perkembangan fasilitas perawatan yang diukur dengan jumlah RS dan sarana penunjangnya, yaitu tempat tidur dan rasionya terhadap penduduk sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Jumlah RS dan Tempat Tidur Serta Rasio Tempat Tidur Per 1000 Penduduk Tahun 2010

No.	Jenis RS	Jml	TT	Ratio TT/10.000 pddk
1.	RS Umum	8	1.007	329,15
2.	RS Bersalin	6	111	3,54
3.	RS Khusus	1	25	0,80

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu, 2010

b.7) Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Penyajian data ketenagaan ini, tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi 7 kategori, di mana pada Tahun 2010 jumlah tenaga kesehatan yang ada di kota Palu sebanyak 1.213 orang dengan rincian tenagamedis (dokter, dokter gigi, dr/drg. Spesialis) 114 orang, tenaga perawat dan bidan (termasuk lulusan DIII dan S1) 815 orang, tenaga farmasi (Apoteker dan Asisten Apoteker) 70 orang, tenaga gizi (lulusan DI dan DIII) 17 orang, tenaga teknisi medis (analisis, teknik elektromedik, penata rontgen, penata anestesi, fisioterapi) 41 orang, Tenaga sanitasi (lulusan SPPH dan Akademi Kesehatan Lingkungan) 78 orang dan tenaga kesehatan masyarakat (SKM, MPH, dll) 78 orang. Jumlah dan proporsi tenaga kesehatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Proporsi Tenaga Kesehatan menurut 7 Kategori di Kota Palu Tahun 2010

No.	Kategori Tenaga Kesehatan	Jumlah	Proporsi	Ratio/100.000 pddk
1.	Medis	114	9,40	36,40
2.	Perawat dan bidan	825	67,46	263,43
3.	Farmasi	70	5,77	22,35
4.	Gizi	17	1,40	5,43
5.	Teknisi medis	41	3,38	13,09
6.	Sanitasi	78	6,43	24,91
7.	Kesehatan masyarakat	78	6,43	24,91
Jumlah		1.223	100	390,51

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palu, 2010

c) Pekerjaan Umum

Terdapat beberapa indikator kinerja terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum yaitu antara lain:

c.1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kota Palu mengalami penurunan, di mana pada tahun 2009 proporsi jalan kondisi baik mencapai 702.29 Km, namun pada tahun 2010 kondisi tersebut menurun menjadi 694.81 Km. Demikian halnya dengan proporsi jalan kondisi sedang, rusak dan rusak berat. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai panjang Jaringan jalan di Kota Palu berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2006-2010.

Tabel 2.27
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Di Kota Palu
Berdasarkan Kondisi Tahun 2009 – 2010

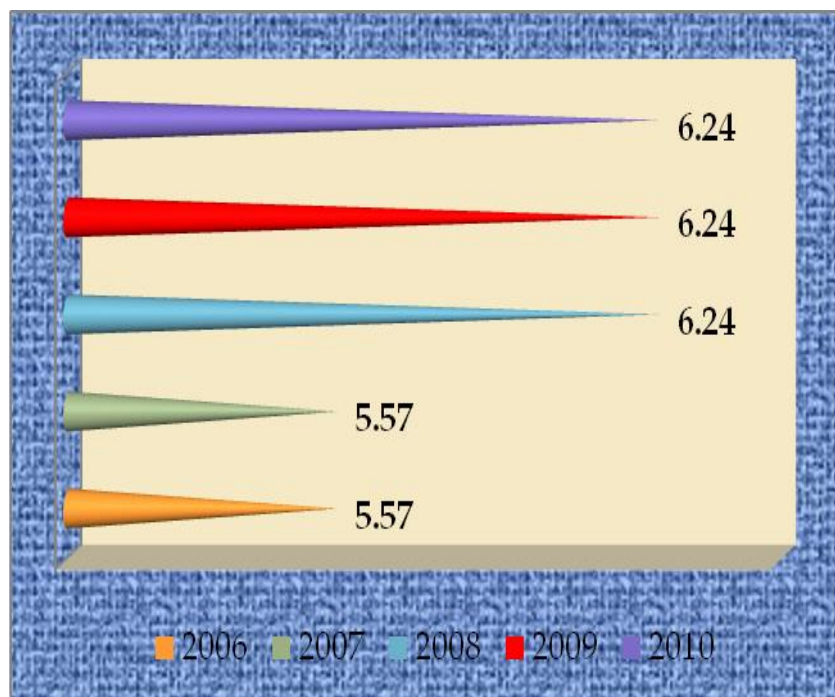
No.	Uraian	Panjang Jalan	
		2009	2010
1.	Kondisi Baik	702.29	694.81
2.	Kondisi Sedang	27.20	91.88
3.	Kondisi Rusak	301.79	211.52
4.	Kondisi Rusak Berat	310.00	23.59
5.	Jalan Secara Keseluruhan	1,341.28	1,021.80
6.	Poporsi kondisi baik (%)	52.36	68.00
7.	Poporsi Kondisi Sedang Rusak (%)	2.03	8.99
8.	Poporsi Kondisi Rusak (%)	22.50	20.70
9.	Poporsi Kondisi Rusak Berat (%)	23.11	2.31

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

c.2) Rasio Jaringan Irigasi

Ketersediaan irigasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas pertanian di suatu wilayah. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan pertanian.

Gambar 2.23
Rasio Jaringan Irigasi Kota Palu
Tahun 2006 – 2010

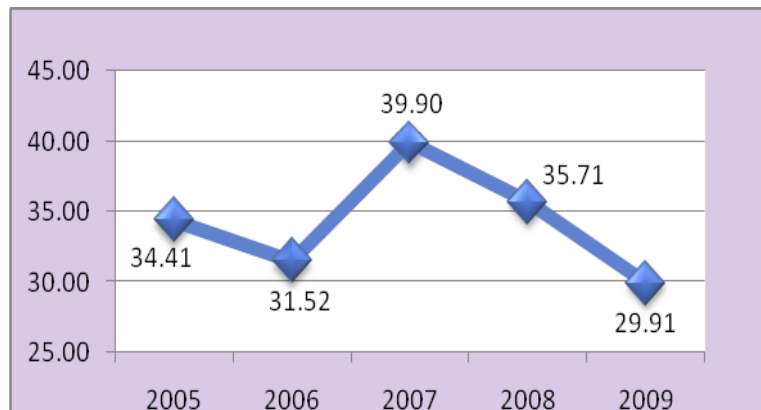


Sumber: BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

d) Perumahan

Persentase rumah tinggal bersanitasi menggunakan parametrik sanitasi dalam tiap rumah sehingga pembangunan MCK melalui program pemberdayaan masyarakat untuk penggunaan masal tidak terhitung. Gambar berikut memperlihatkan bahwa makin bertambahnya jumlah rumah tinggal di Kota Palu yang mempunyai akses sanitasi (MCK). Berikut adalah gambaran kondisi rumah tinggal berakses sanitasi di Kota Palu selama kurun waktu 2005 - 2009.

Gambar 2.24
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Palu
Tahun 2006 – 2010



Sumber : BPS Kota Palu, 2010

e) Penataan Ruang

Perencanaan wilayah, ruang adalah tempat hidup manusia dan tempat manusia melakukan aktivitas hidupnya serta tempat yang dapat mensejahterakan hidup manusia, sehingga dikenal dua kawasan, yakni kawasan budidaya dan non-budidaya. Penataan ruang perlu didasarkan pada pemahaman potensi dan keterbatasan alam, perkembangan kegiatan sosial ekonomi yang ada, serta tuntutan kebutuhan peri kehidupan saat ini dan kelestarian lingkungan hidup di masa yang akan datang. Upaya pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan ini dituangkan dalam suatu kesatuan rencana tata ruang.

Perencanaan pembangunan dan pengembangan ruang di Kota Palu menjadi salah satu problem yang cukup kompleks dan membutuhkan tidak saja review kebijakan tata ruang pemda, tetapi juga membutuhkan upaya dan dukungan yang sinergis dari berbagai pihak maupun pelaku pembangunan di Kota Palu dalam konteks penyelarasan pembangunan itu sendiri. Kompleksitas ini dapat dilihat dari tumpang tindihnya pemanfaatan ruang antara kepentingan ruang pemukiman, ruang perkantoran, ruang investasi perkotaan atau bahkan ruang public itu sendiri.

Penetapan kawasan lindung dan jalur hijau oleh Pemerintah kota Palu berdasarkan RTRW Kota Palu tahun 1999 dan PP No.36 tahun 2005, juga berdasarkan kebutuhan akan pentingnya ruang terbuka kota, tentunya juga sebagai pemenuhan kebutuhan luas standar minimal ruang terbuka kota. Berdasarkan data penggunaan lahan kota Palu tahun 2005. Taman kota (0.006%), lapangan olah raga (0,007%) dan lahan kosong (3,925%) dianggap bagian dari ruang terbuka, maka perbandingan peruntukan ruang terbuka kota Palu kurang dari 30% sebagai mana standar perbandingannya.

Penurunan lahan terbuka hijau akan berdampak pada fungsi tumbuhan sebagai penghasil oksigen semakin berkurang sejalan dengan menurunnya proses fotosintesis dari vegetasi. Sebaliknya kandungan gas CO₂ semakin tinggi karena asap kendaraan bermotor dan aktifitas lainnya dari penduduk kota semakin meningkat. Pertumbuhan populasi manusia yang terus meningkat berimplikasi pada peningkatan aktivitas yaitu; industri, kendaraan bermotor serta dari sisi manusia itu sendiri.

e.1) Ruang Terbuka Hijau

Secara umum ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbukahijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagiandari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Ruang terbuka non-hijau dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi.

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman

nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga.

Undang-undang RI no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menggariskan Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Keberadaan ruang terbuka hijau ini harus tetap dipertahankan sebagai daerah tangkapan air, konservasi kehati, media pendidikan dan bahkan dapat didorong menjadi salah satu kawasan yang berkontribusi terhadap penurunan emisi terkait pemanasan global.

Ditinjau dari segi kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik yang dimiliki oleh umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau RTH privat (pribadi) yang berupa taman-taman yang ada pada lahan-lahan pribadi.

Ruang terbuka hijau publik yang telah ada di Kota Palu meliputi kawasan seluas ± 5.794 Ha atau sekitar $\pm 14,7$ persen dari luas wilayah kota Palu yang meliputi :

- Taman Kota yang terdistribusi di Kecamatan Palu Timur, Palu Selatan, dan Palu Barat, dengan luas ± 6 Hektar
- Hutan Kota di Kecamatan Palu Timur dengan luas ± 2.676 Ha, dan di Kecamatan palu Selatan ± 1.957 Hektar
- Pemakaman umum & Taman Makam Pahlawan seluas ± 76 ha,
- Arboretum di Kelurahan Talise seluas ± 95 Hektar
- Daerah penyangga Tahura di Kelurahan Poboya seluas ± 22 ha
- Daerah penyangga hutan di Kecamatan Palu Barat seluas ± 208 Hektar
- Daerah penyangga hutan di Kecamatan Palu Timur seluas ± 135 Hektar
- Daerah penyangga hutan di Kecamatan Palu Utara seluas ± 327 Hektar
- Daerah penyangga kawasan industri hilir di Kecamatan Palu Timur seluas ± 79 Hektar

- Daerah penyangga kawasan industri hilir di Kecamatan Palu Selatan seluas $\pm$ 58 Hektar
- Daerah penyangga kawasan perkandangan ternak di Kecamatan Palu Selatan seluas $\pm$ 95 Hektar
- Lapangan terbuka hijau terdapat di 4 Kecamatan Kota Palu seluas $\pm$ 60 Hektar

Ruang terbuka hijau privat meliputi pekarangan rumah tinggal dan halaman perkantoran. Strategi dalam pengembangan ruang terbuka Hijau Kota Palu direncanakan dengan meliputi ;

- Pengembangan taman RT dan RW yang akan didistribusikan pada pusat unit-unit pengembangan perumahan.
- Pengembangan taman kota yang akan didistribusikan di setiap Kelurahan dan Kecamatan pada wilayah Kota Palu.
- Pengembangan hutan kota di Kelurahan Kawatuna Kecamatan Palu Selatan seluas $\pm$ 100 ha dan kebun raya di Kecamatan Palu Utara seluas $\pm$ 200 ha
- Pengembangan fungsi-fungsi kawasan lindung lainnya menjadi ruang terbuka hijau.

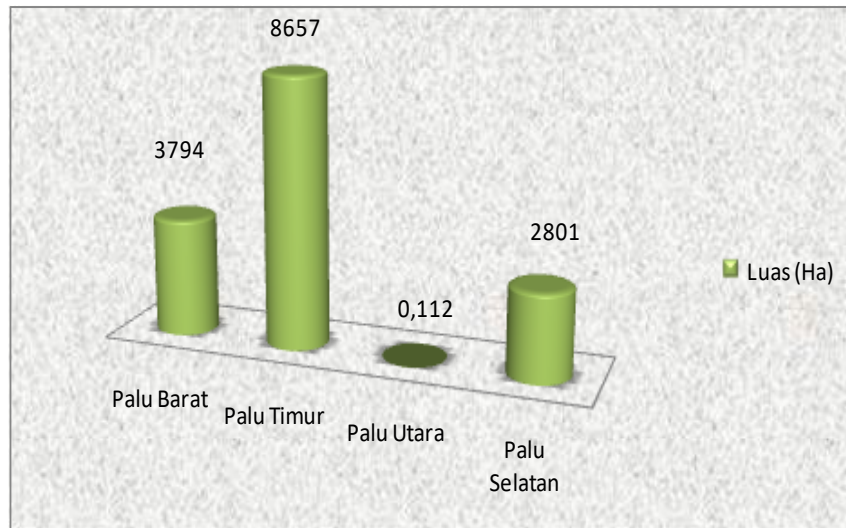
e.2) Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Areal pemakaman pada umumnya terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu 1) Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah; 2) Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan; 3) Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Kawasan pemakaman yang ada di Kota Palu terdiri dari

beberapa Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan 1 Taman Makam Pahlawan (TMP) yang total luasnya 15.36Ha. Berikut ini secara lengkap mengenai kondisi area pemakaman di Kota Palu.

Gambar 2.25
Luas Lahan Pemakaman Kota Palu



Sumber : Draft RTRW Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

f) Perencanaan Pembangunan

Capaian indikator kinerja urusan perencanaan pembangunan dapat diketahui dari pengukuran terhadap empat indikator kinerja kunci (IKK), yaitu :

- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD (2005 – 2025)
Pemerintah Kota Palu sejak tahun 2005 telah menyusun dokumen perencanaan RPJPD, akan tetapi sampai dengan tahun 2010 belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD
- Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD
- Renstra SKPD dan Renja SKPD pada tahun 2006-2010

g) Perhubungan

Capaian indikator kinerja urusan perhubungan dapat diketahui dari pengukuran terhadap beberapa indikator kinerja kunci (IKK), yaitu :

g.1). Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji kelayakan operasional angkutan umum wajib dilakukan sebelum kendaraan dioperasikan baik kendaraan yang dibuat atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Jumlah angkutan umum yang telah melakukan uji kir pada tahun 2010 sebanyak 7.061 unit kendaraan meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 6.524 unit. Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan Uji Kir di Kota Palu selama kurun waktu tahun 2006-2010.

Tabel 2.28
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kota Palu

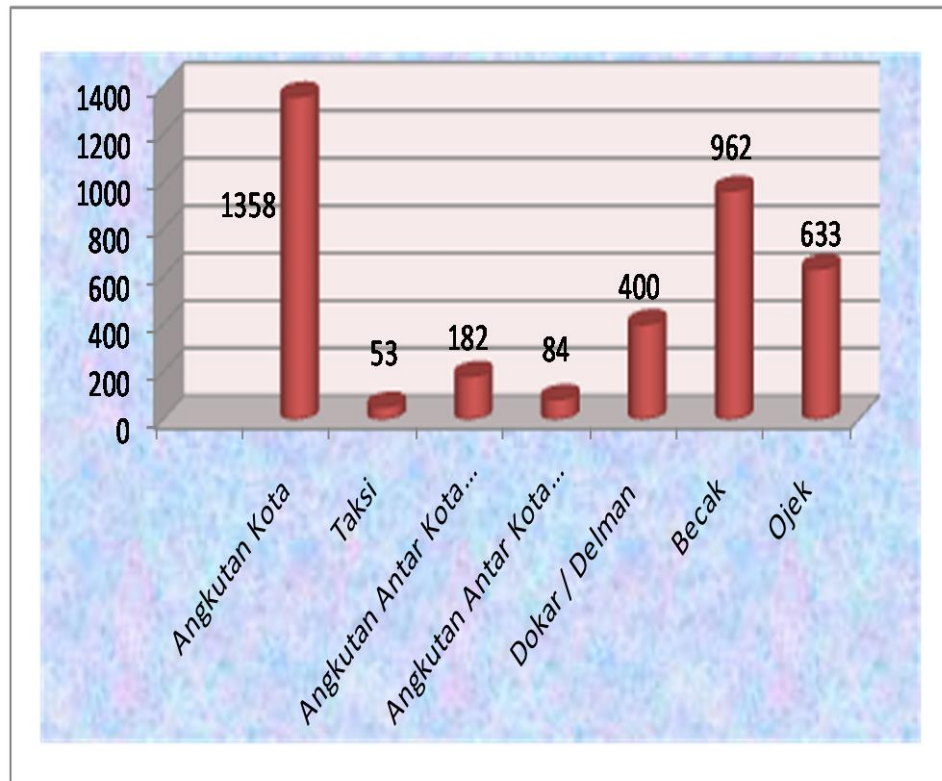
No	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Mobil Penumpang Umum	243	269	284	326	350
2.	Mobil Bus	1724	1745	1757	1768	1794
3.	Mobil Barang	2928	3299	3755	4359	4843
4.	Kendaraan Khusus Bukan Umum	16	17	30	30	33
5.	Kereta Gandengan	22	27	30	33	41
6.	Kendaraan Bermotor Tiga Roda	0	3	6	8	0
Jumlah		4933	536	5862	6524	7061

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

Adapun keberadaan angkutan umum yang merupakan salah satu sarana transportasi darat yang banyak digunakan oleh masyarakat, perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah setempat karena selain membantu masyarakat, juga memberikan

kontribusi keuangan terhadap Pemerintah melalui izin trayek dan uji kir. Data pada berikut menampilkan banyaknya angkutan umum di Kota Palu tahun 2008-2009.

Gambar 2.26
Data Angkutan Umum Dalam Kota Palu
Tahun 2008 Sampai Pertengahan Tahun 2009



Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Palu, 2010

g.2) Rasio Izin Trayek

Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk di kota Palu. Seluruh angkutan umum yang beroperasi di wilayah kota, wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum.

Gambar 2.27
Jumlah Izin Trayek di Kota Palu Tahun 2005 – 2009



Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

g.3) Pelabuhan Laut dan Udara

Fasilitas Jaringan Prasarana Modal Laut berupa pelabuhan Laut yang tersebar secara proporsional di seluruh kabupaten/kota di propinsi Sulawesi Tengah untuk melayani pergerakan penumpang/barang lintas kabupaten/kota, lintas propinsi bahkan lintas negara. Di Kota Palu terdapat Pelabuhan Pantooan dengan fasilitas sebagai berikut:

- Panjang dermaga : 250 M (150 + 100)M
- Lebar : 13M dan 15M
- Kapasitas : 4 Ton/M²

Tabel 2.27
Data-data Realisasi Trafik Pelabuhan Pantoloan Tahun 2008

Data data Realisasi Frang Pelabuhan Pantoloan Tahun 2008				
No	Uraian	Satuan	Realisasi	Ket.
Tahun 2008				
1	Dermaga Umum	Call	574	Call : Kunjungan Gt : Kapasitas
		Gt	2,644,933	
2	Dermaga Khusus	Call	1,138	Dari Data Kapal Yang Bertambat Didermaga Pelabuhan Pantoloan Rata-Rata Untuk Tahun 2008 Adalah 48 Call/Bulan
		Gt	1,063,544	
3	Pelabuhan Khusus	Call	106	
		Gt	119,891	
Jumlah		Call	1,818	
		Gt	3,828,368	

Sumber: Dephubkominfo Kota Palu, 2010

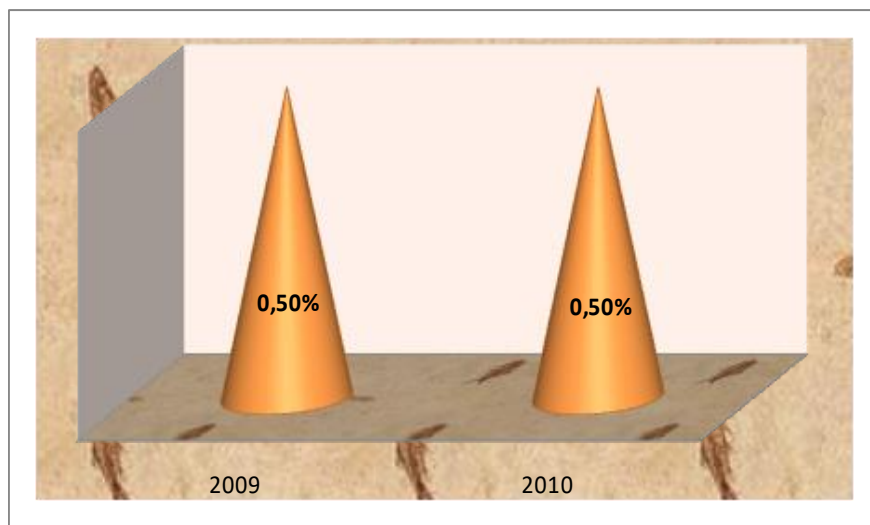
Pelabuhan udara di Kota Palu dengan nama bandara Mutiara, termasuk bandara kelas I dengan kemampuan operasi 40/F/C/X/T dan berjarak sekitar 5Km dari pusat kota. Panjang dan lebar fasilitas landasan hingga tahun 2008 adalah 2.067 x 45 M-eksisting, dimana sampai dengan tahun 2009 landasannya diperpanjang menjadi 2.317m. Saat ini bandara tersebut sedang dalam proses pembangunan.

h) Lingkungan Hidup

h.1) Rasio Tempat Pembuangan Sampah

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Palu nilai capaian kinerjanya rata-rata 0,5 % pada tahun 2009 dan 2010 . Nilai capaian kinerja ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah daya tampung TPS (m³) dengan jumlah penduduk dikalikan 100.

Gambar 2.28
Rasio TPS di Kota Palu Tahun 2005 - 2009



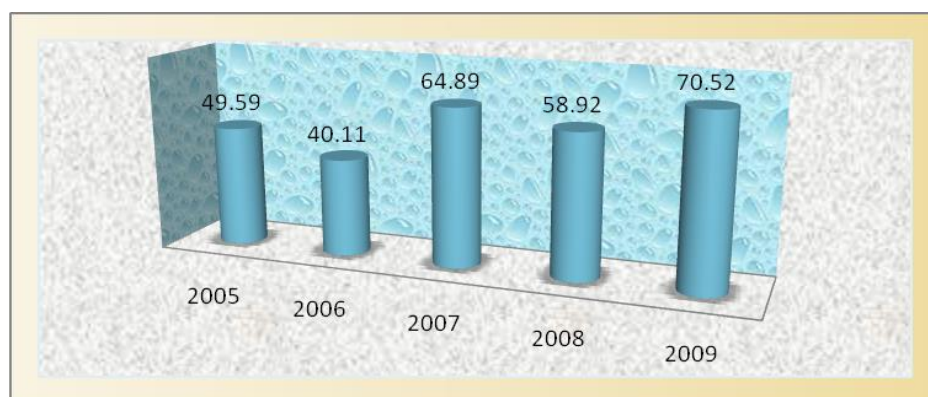
Sumber : BLHD Kota Palu, 2011

h.2) Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih

Penyediaan air bersih di Kota Palu ditangani oleh PDAM yang memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan dan mata air dan sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi. Berdasarkan

gambar berikut terlihat bahwa peningkatan persentase rumah tangga yang bisa mengakses air bersih masih fluktuatif dari tahun ke tahun, tetapi secara umum menunjukkan peningkatan karena nilai penurunan yang masih lebih rendah di banding nilai peningkatannya.

Gambar 2.29
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Bersih
di Kota Palu Tahun 2005 - 2009

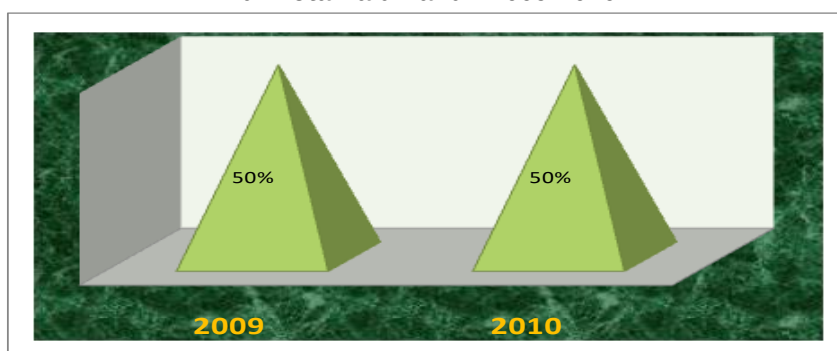


Sumber : Kota Palu dalam Angka 2010 (diolah kembali)

h.3) Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL

Rasio cakupan kinerja dari indikator kinerja kunci cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di wilayah Kota Palu mencapai 50 %. Nilai capaian ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi dengan jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL. Data mengenai hal tersebut tercantum pada gambar berikut.

Gambar 2.30
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL
di Kota Palu Tahun 2009-2010

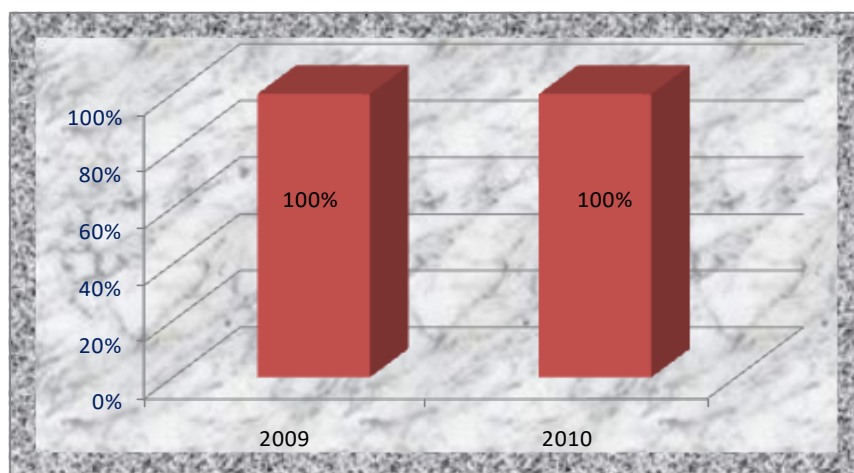


Sumber : BLHD Kota Palu, 2011

h.4) Penegakan Hukum Lingkungan

Rasio capaian kinerja untuk indikator kinerja kunci penegakan hukum lingkungan di Kota Palu memperoleh nilai capaian kinerja maksimal yaitu 100 %. Nilai capaian ini diperoleh dengan perbandingan antara jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemerintah daerah dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Aspek penegakan hukum lingkungan antara lain meliputi : pembinaan kepada para pelaku usaha yang potensial menjadi sumber pencemaran lingkungan, pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan upaya pengelolaan lingkungan serta monitoring terhadap kualitas limbah buangan kegiatan usaha.

Gambar 2.31
Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Palu
Tahun 2009-2010

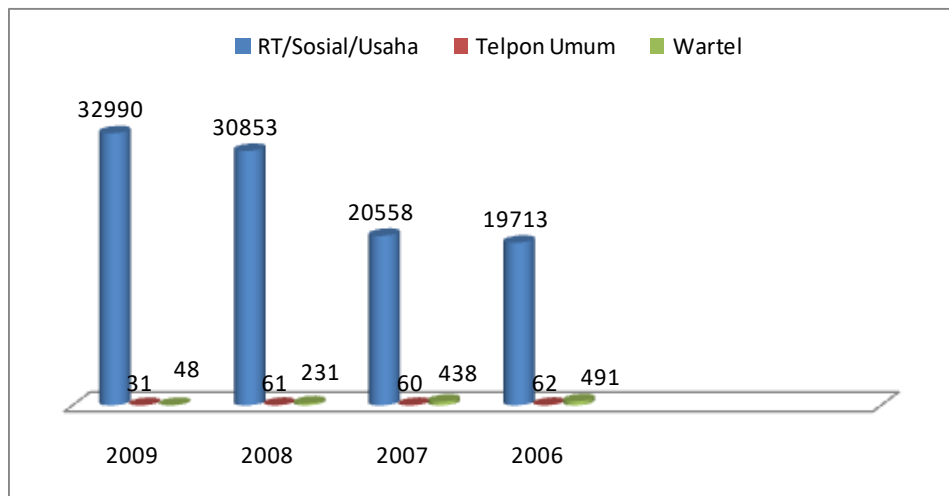


Sumber : BLHD Kota Palu, 2011

i) Komunikasi dan Informatika

Perkembangan media informasi saat ini menuntut tersedianya berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan informatika sehingga penduduk Kota Palu dapat mengakses informasi secara cepat dan akurat. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan komunikasi dan informatika di Kota Palu dapat digambarkan antara lain melalui banyaknya sarana telekomunikasi, layanan informasi layanan publik bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tercantum pada gambar dan tabel berikut.

Gambar. 2.32
Banyaknya Pelanggan dan Sarana Telekomunikasi
dan Jenis Penggunaan Tahun 2006-2009



Sumber : BPS Kota Palu, 2010

Tabel 2.28
Data Informasi Layanan Publik
Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Palu Tahun 2008

NO	URAIAN	JML	KET.
1	Jumlah Radio amatir	245 stsn	PT. Telkom PT.Telkom, PT.Telkomsel,PT.Indosat, PT.Exelkomindo
2	RAPI	87 stsn	
3	WARTEL	2 Buah	
4	WARNET	150 Buah	
5	Kantor POS	4 kantor	
6	Perusahaan	1	
7	Penyelenggara Telekomunikasi	perusahaan	
	Perusahaan operator seluler	4 perusahaan	

Sumber : Dephubkominfo Kota Palu, 2010

j) **Pertanahan**

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanahan salah satunya diukur melalui persentase luas lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar persentase luas

lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.

k) Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil, salah satunya dapat dilihat dari indikator akta catatan sipil yang diterbitkan di Kota Palu sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa akta kelahiran merupakan akte yang paling banyak diterbitkan karena akte tersebut merupakan salah satu identitas anak yang juga merupakan hak anak/penduduk. Jumlah penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran pada tahun 2008 sebanyak 3.445 jiwa, jumlah ini menurun menjadi 2.724 pada tahun 2009.

Tabel 2.29
Jumlah Akta Catatan Sipil yang Diterbitkan di Kota Palu
Tahun 2007 – 2010

Jenis akte	Tahun			
	2007*	2008*	2009*	2010*
Akte Kelahiran	6961	3445	2724	51457
Akte Kematian	272	233	197	1508
Akte Perkawinan	310	292	199	1993
Akte Perceraian	11	13	11	99
Akte Adopsi	9	8	0	42
Akte Ganti Nama	0	2	0	11

Sumber : BPS Kota Palu, 2010 dan Dukcapil Kota Palu, 2011

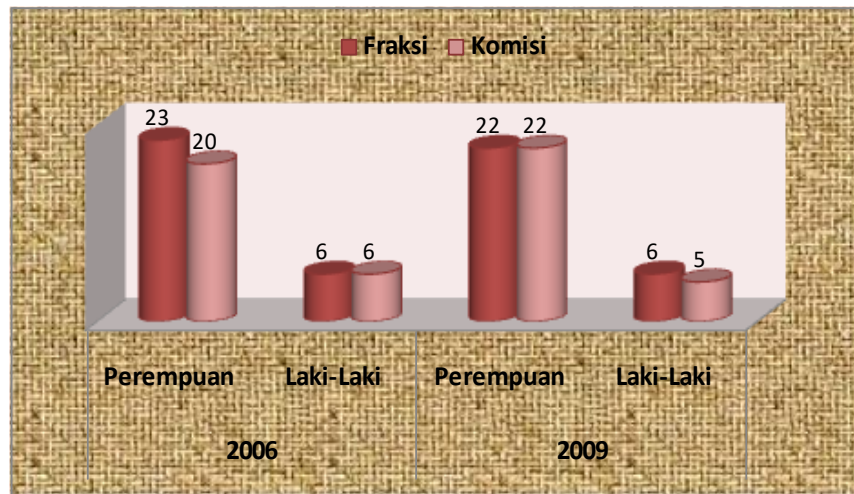
l) Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

I.1) Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Jumlah perempuan sebagai anggota legislatif di Kota Palu terlihat pada grafik berikut. Pada tahun 2006, jumlah anggota legislatif perempuan 20,7% dan pada tahun 2009 menjadi 21,4%.

Gambar. 2.33
Jumlah Anggota Legislatif Perempuan di Kota Palu
Tahun 2006 dan 2009

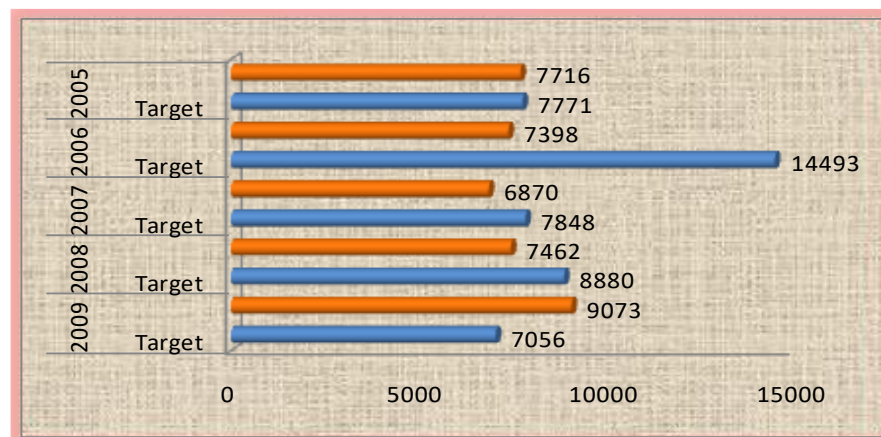


Sumber : BPS Kota Palu, 2009 dan PSW, 2010

I.2) Keluarga Berencana

Pada tahun 2010 jumlah klinik KB di Kecamatan Palu Barat 20 buah Palu Selatan 25 buah, Palu Timur sebanyak 20 buah, dan Kecamatan Palu Utara 12 buah. Target dan pencapaian jumlah akseptor baru, tidak terlepas dari keberadaan petugas KB di lapangan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.34
Jumlah Target dan Pencapaian Akseptor Baru
di Kota Palu Tahun 2006 – 2010



Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

m) Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.

Pada tahun 2009 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Palu mencapai 66.51 persen dengan rincian yaitu; laki-laki sebesar 79.84 persen dan perempuan mencapai 53.23 persen. Sementara Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2009 sebesar 10.91 persen yang terdiri atas Laki-laki sebesar 7.88 persen sedangkan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk perempuan sebesar 15.44 persen. Berikut adalah gambaran lengkap mengenai data ketenagakerjaan Kota Palu tahun 2009 berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2.30
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Di Kota Palu
Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
Serta Jenis Kelamin Tahun 2009

Jenis Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	95,013	63,560	158,573
Bekerja	87,528	53,745	141,273
Pengangguran	7,485	9,815	17,300
Bukan Angkatan Kerja	23,986	55,851	79,837
Jumlah	118,999	119,411	238,410
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	79.84	53.23	66.51
Tingkat Pengangguran Terbuka	7.88	15.44	10.91

Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

n) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Indikator kinerja urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat diketahui dari pengukuran terhadap indikator kinerja yaitu :

n.1) Koperasi Aktif

Di Kota Palu pembentukan dan aktivitas kelembagaan koperasi cukup berkembang sejalan dengan prinsip pembinaan yang selama ini dilakukan oleh dinas daerah Kota Palu. Keberadaan koperasi ditengah masyarakat Kota Palu telah menyebar di setiap wilayah kecamatan, baik itu yang beranggotakan pegawai negeri, karyawan dan komunitas tertentu yang lain. Namun demikian, hingga akhir tahun 2009 terdapat koperasi yang tidak aktif dan sebagian koperasi mengalami perkembangan dari segi kuantitas serta permodalan. Data lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Koperasi Aktif Di Kota Palu Tahun 2006 – 2010

No		2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah Koperasi Aktif				155	155
2	Jumlah Koperasi	309	315	320	323	323

Sumber: BPS Kota Palu, 2011 dan Dinas Perindagkop dan UKM Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

Berdasarkan hasil telaahan, bahwa ketidakaktifan aktivitas perkoperasian disebabkan oleh faktor kepengurusan dan juga aktivitas keanggotaan koperasi itu sendiri. Faktor yang menyebabkan operasional perkoperasian tidak berjalan efektif, memberikan arti penting perlunya pembinaan pengurus koperasi terutama pada aspek manajerial maupun pada aspek teknis pengelolaan lembaga koperasi. Hakikat penting yang perlu dibangun adalah aspek kredibilitas pengelolaan koperasi secara menyeluruh, sehingga bermuara pada kepercayaan seluruh

masyarakat terhadap eksistensi lembaga koperasi. Secara rinci, keaktifan lembaga dan keanggotaan koperasi pada tahun 2009 tercantum pada tabel berikut.

Tabel. 2.32
Komposisi Aktivitas Lembaga dan Keanggotaan Koperasi Terhadap Total Aktivitas Lembaga dan Keanggotaan Masing–Masing Kecamatan Kota Palu Tahun 2009

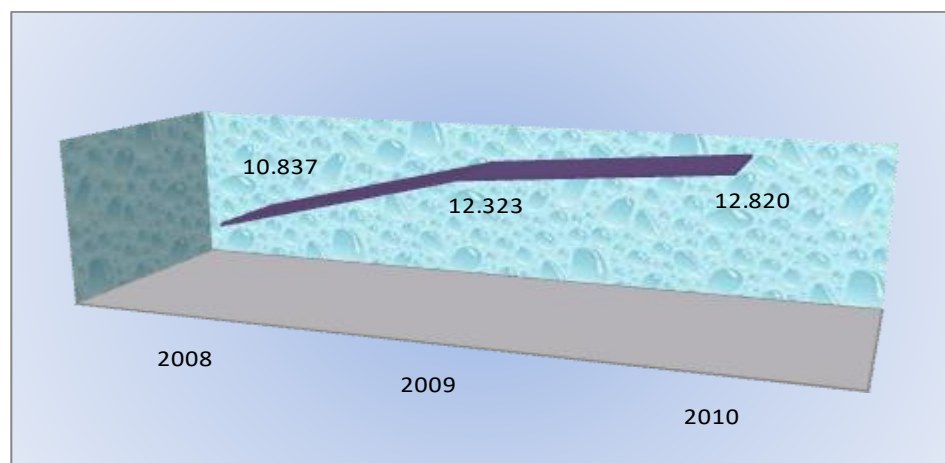
No	Kecamatan	Lembaga Koperasi		Keanggotaan (orang)		Prosentase Kelembagaan		Prosentase Keanggotaan	
		Aktif	Tdk aktif	Aktif	Tdk aktif	Aktif	Tdk aktif	Aktif	Tdk aktif
1.	Palu Selatan	72	51	7015	3155	46,45	32,48	36,16	25,55
2.	Palu Timur	45	63	9276	6260	29,03	40,12	50,13	50,71
3.	Palu Barat	26	37	1507	2350	16,77	23,56	7,76	19,03
4.	Palu Utara	12	6	1150	579	7,74	3,82	5,92	4,69
	Jumlah	155	157	18948	12344	49,67	50,32	60,55	39,44

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Kota Palu, 2010

n.2) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Informasi terhadap pemetaan data berkenaan dengan jumlah UMKM yang dibina di Kota Palu sejak tahun 2008 hingga 2010 oleh dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada berikut.

Gambar 2.35
Jumlah UMKM yang Dibina di Kota Palu tahun 2008-2010



Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

o) Penanaman Modal

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor.

Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kota Palu.

p) Kebudayaan dan Pariwisata

Indikator kinerja urusan kebudayaan dan pariwisata antara lain Festival Teluk Palu pertama kali digelar pada tahun 2003 yang kala itu dilaksanakan di Pantai Talise Kota Palu. Pada pelaksanaan event ini berikutnya lalu berganti nama menjadi PestaRakyat Teluk Palu, yang selama tiga tahun berturut-turut dilaksanakan di Taman Ria Kota Palu. Oleh karena beberapa kendala teknis, ditahun 2007, 2008 dan 2009 tidak dapat dilaksanakan. Tahun 2010 dan pada tahun ini, 2011 kembali digelar.

Tabel. 2.33
Pelaksanaan Festival Teluk Palu 2005 - 2010

No	Tahun	Pelaksanaan
1	2005	√
2	2006	√
3	2007	X
4	2008	X
5	2009	X
6	2010	√

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palu, 2010

q) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Indikator kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain sebagai berikut:

q.1) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan

kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

q.2) Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah linmas dapat menggambarkan kapasitas Pemerintah dalam memelihara ketentraman/ketertiban masyarakat, serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

q.3) Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos siskamling per desa/kelurahan dapat menggambarkan ketersediaan pos siskamling pada setiap desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling, akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

q.4) Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat yang Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang dititik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

Besarnya jumlah LSM aktif dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

r) Ketahanan Pangan

Indikator kinerja urusan ketahanan pangan yakni mengukur produktifitas atau bahan pangan lokal yang terdiri dari tanaman pangan seperti komoditas padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, sebagaimana tercantum pada grafik berikut.

Gambar 2.36
Produktifitas Bahan Pangan Lokal di Kota Palu
Tahun 2008-2009



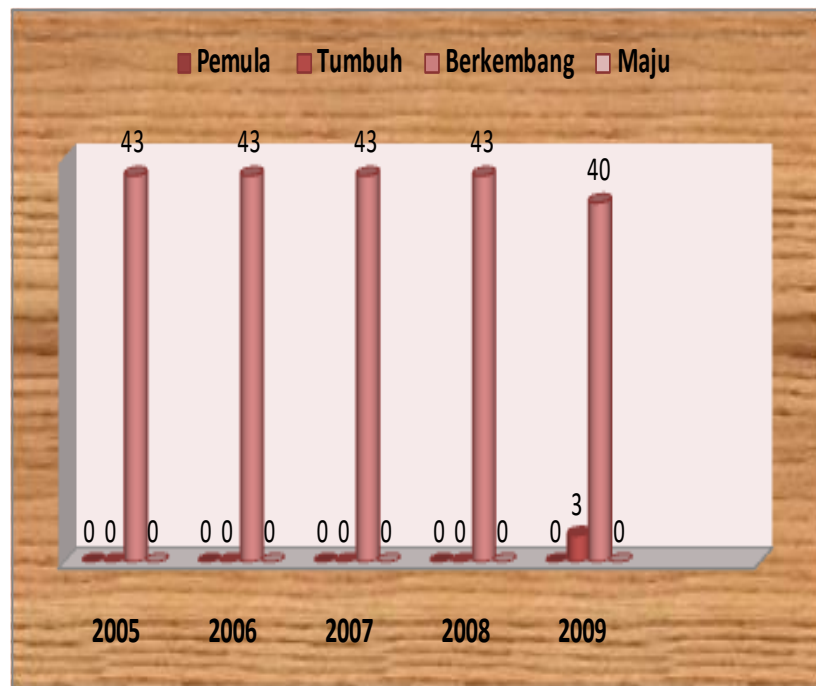
Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa produktifitas bahan pangan lokal meningkat secara signifikan dari tahun 2008 ke tahun 2009.

s) Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan antara lain Kelompok binaan LPM yang merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Gambar 2.37
Banyaknya LPM Menurut Tingkat Perkembangannya
di Kota Palu Tahun 2006-2010



Sumber : BPS Kota Palu, 2010

t) Statistik

Kondisi daerah terkait dengan urusan statistik salah satunya dapat dilihat dari Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan

Capaian indikator kinerja urusan statistik dapat dilihat dari kinerja kunci sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Ketersediaan Dokumen Statistik
di Kota Palu Tahun 2006-2010

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1.	PDRB	√	√	√	√	√
2.	IPM	√	√	√	√	√
3.	Suseda	√	√	√	√	√
4.	KBDA	√	√	√	√	√
5.	Indeks Gini Ratio	√	√	√	√	√
6.	Input Ouput	√	√	√	√	√
7.	IKM	√	√	√	√	√
8.	IHK	√	√	√	√	√

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

u) Perpustakaan

Indikator kinerja urusan perpustakaan antara lain sebagai berikut:

u.1) Koleksi Bahan Pustaka di Perpustakaan

Banyaknya koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

u.2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah.

u.3) Jumlah Kendaraan Perpustakaan

Rangka memudahkan masyarakat untuk mengakses bahan pustaka yang ada di Perpustakaan milik Pemda, saat ini Pemerintah daerah Kota Palu telah menyediakan kendaraan yang berfungsi sebagai perpustakaan keliling. Adanya kendaraan perpustakaan keliling, kendaraan layanan internet dan motor pintar diharapkan masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses perpustakaan serta akan memberikan nilai tambah bukan saja sebagai peningkatan pengetahuan, namun akan mewujudkan masyarakat Kota Palu yang cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian.

v) Kearsipan

Indikator kinerja urusan kearsipan yakni sistem Pengelolaan Arsip Secara Baku. Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan kembali peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu memerlukan pengelolaan secara baku.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah terdiri urusan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata dan perindustrian dan perdagangan.

a). Pertanian

Indikator kinerja urusan pertanian terkait dengan kondisi daerah antara lain sebagai berikut :

a.1) Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan

Jenis tanaman pangan yang dicakup dalam sajian ini hanya meliputi tanaman padi dan palawija serta sayur-sayuran. Luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan di Kota Palu dalam 6 tahun terakhir, ditunjukkan pada Tabel 2.35. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa komoditas pangan memiliki *trend* peningkatan baik luas panen, produksi maupun

produktivitas, kecuali tanaman jagung dan ubi jalar yang luas tanamnya cenderung menurun masing-masing sebesar 1,0% dan 0,7% per tahun dalam kurun lima tahun terakhir.

Tabel 2.35
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
Kota Palu Tahun 2004 – 2009

No	Komoditi	Tahun						%
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	Luas Panen (ha)		349	507	530	369	932	
	1. Padi Sawah	215	491	652	605	491	885	20,44
	2. Jagung	550	0	19	1	20	8	-1,00
	3. Kedelai	0	160	171	267	174	250	329
	4. Kacang Tanah	119	80	61	65	73	106	15,66
	5. Kacang Hijau	59	102	111	114	87	159	7,68
	6. Ubi Kayu	75	87	97	114	79	121	5,96
	7. Ubi Jalar	88						-0,70
2	Produksi (ton)							
	1. Padi Sawah	806	1363	1984	2102	1577	3709	23,91
	2. Jagung	1334	1128	1518	1465	1498	2182	4,47
	3. Kedelai	0	0	20	1	23	9	388
	4. Kacang Tanah	141	235	240	390	299	366	26,99
	5. Kacang Hijau	44	60	46	50	58	82	9,43
	6. Ubi Kayu	792	1214	1232	1308	1089	1826	11,05
	7. Ubi Jalar	792	809	905	1069	791	1150	1,53
3	Produktivitas (ku/ha)							
	1. Padi Sawah	37,50	39,5	39,13	39,66	42,74	39,80	3,36
	2. Jagung	22,30	22,95	23,28	24,22	30,50	24,66	8,58
	3. Kedelai	-	-	10,53	11,14	11,45	11,14	1,47
	4. Kacang Tanah	11,9	14,69	14,04	14,61	17,19	14,65	10,18
	5. Kacang Hijau	7,50	7,50	7,54	7,63	7,93	7,70	1,41
	6. Ubi Kayu	102,30	119,0	110,9	114,7	125,2	114,8	5,52
	7. Ubi Jalar	90,0	0	9	8	0	0	2,74
			93,00	93,30	93,77	100,16	95,00	

Sumber : BPS Kota Palu, 2010

Aspek produktivitas tanaman pangan menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang cukup menggembirakan untuk semua komoditi kecuali kedelai dan kacang hijau yang mengalami peningkatan hanya sebesar 1,47 dan 1,41 persen per tahun dalam kurun lima tahun terakhir. Peningkatan produktivitas tanaman pangan tertinggi dicapai komoditi kacang tanah dan jagung dengan pertumbuhan masing-masing 10,18 dan 8,58 persen per tahun dalam lima tahun terakhir.

a.2) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Berdasarkan distribusi PDR batas dasar Harga Berlaku tahun 2009 struktur perekonomian Kota Palu selama ini ditunjang oleh 9 (sembilan) sektor pembentuk PDRB. Adanya perbedaan pertumbuhan yang oleh masing-masing sektor ekonomi menyebabkan berubahnya struktur perekonomian. Berdasarkan harga berlaku, diketahui bahwa sektor ekonomi yang paling berperan adalah sektor Jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 28,87 persen, sedangkan sektor pertanian dengan kontribusi 2,37 persen.

Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Palu pada tahun 2009 baik berdasarkan Harga Berlaku maupun berdasarkan Harga Konstan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Palu tahun 2006 dan 2007. Di mana pada tahun 2006 persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Palu berdasarkan Harga Berlaku mencapai 2,50 persen dan berdasarkan Harga Konstan mencapai 2,90 persen. Pada tahun 2007 persentase kontribusi pertanian terhadap PDRB Kota Palu berdasarkan Harga Berlaku mencapai 2,40 persen dan berdasarkan Harga Konstan mencapai 2,89 persen.

Secara rinci kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Palu selama kurun waktu tahun 2006-2009 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Tahun 2006 – 2009

No	Uraian	Dalam Jumlah Rupiah			
		2006	2007	2008	2009
1.	Kontribusi Sektor Pertanian				
	-ADH Berlaku	83,065	91,850	100,351	126,375
	-ADH Konstan	59,483	63,769	68,823	72,328
2.	Jumlah PDRB				
	-ADH Berlaku	3,322,19	3,822,29	4,646,25	5,332,67
		6	2	0	7
	-ADH Konstan	2,048,55	2,207,06	2,366,70	2,546,30
		3	4	2	2
3.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (persen)				
	-ADH Berlaku	2.50	2.40	2.16	2.37
	-ADH Konstan	2.90	2.89	2.91	2.84

Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

b). Kehutanan

Kota Palu memiliki kawasan hutan seluas 17.257 ha atau 43,68% dari luas wilayah daratan (39.506 Ha). Mengacu data BPS 2010, maka rincian luas masing-masing fungsi hutan disajikan pada Tabel 2.36. Pada tabel tersebut terlihat bahwa luas pemanfaatan ruang terluas adalah kawasan budidaya di luar kawasan hutan Negara, yaitu seluas 56,32% dari luas wilayah daratan Kota Palu. Sementara itu, kawasan hutan produksi terbatas sebesar 11,06%, kawasan hutan lindung sebesar 18,08%, dan kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Palu sebesar 14,54% dari luas wilayah daratan Kota Palu.

Tabel 2.37

Luas Pola Pemanfaatan Ruang Menurut Fungsinya di Kota Palu

No.	Fungsi Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
I.	KAWASAN LINDUNG	12.887	32,62
1	Kawasan Kawasan Pelestarian Alam (KPA): TAHURA PALU	5.746	14,54
2	Hutan Lindung (HL)	7.141	18,08
II.	KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN	4.370	11,06
1	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	4.370	11,06
2	Hutan Produksi Tetap (HP)	0,00	0,00
3	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	0,00	0,00
	Jumlah I + II		
III.	KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN	22.249	56,32
1	Areal Penggunaan Lain (APL)	22.249	56,32
	Jumlah Luas Wilayah (I + II + III)	39.506	100,00

Sumber: BPS Kota Palu, 2009

c). Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan terkait dengan kondisi daerah antara lain sebagai berikut:

c.1) Produksi Perikanan

Pada tahun 2010, produksi perikanan di Kota Palu 2.966,3 ton, yang terdiri atas perikanan laut sebesar 1.710,1 ton dan perikanan budidaya sebesar 38,3 ton. Produksi ini menurun jika dibanding dengan produksi tahun sebelumnya sebesar 3.028,2 ton.

Selanjutnya perkembangan produksi perikanan dari tahun 2006 hingga tahun 2010 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.38
Produksi Perikanan di Kota Palu
Tahun 2006-2010 (ton)



Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

c.2) Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Perikanan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB kota Palu, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB tahun 2006-2009

No	Uraian	Dalam Jumlah Rupiah			
		2006	2007	2008	2009
1	Kontribusi Sektor Perikanan				
	- ADH Berlaku	13,782	17,135	21,779	26,018
	- ADH Konstan	11,525	13,579	16,195	17,407
2	Jumlah PDRB				
	- ADH Berlaku	3,322,196	3,822,292	4,646,250	5,332,677
	- ADH Konstan	2,048,553	2,207,064	2,366,702	2,546,302
3	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (persen)				
	- ADH Berlaku	0.41	0.45	0.47	0.49
	- ADH Konstan	0.56	0.62	0.68	0.68

Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

d). Energi dan Sumberdaya Mineral

Salah satu Indikator kinerja urusan energi dan sumberdaya mineral terkait dengan kondisi daerah antara lain yakni Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kota Palu berdasarkan Harga Berlaku pada tahun 2006 sebesar 4,27% meningkat 0,06% pada tahun 2009, yakni mencapai 4,33%. Adapun kontribusi sektor ini berdasarkan Harga Konstan, pada tahun 2006 mencapai 4,32% dan pada tahun 2009 mencapai 4,50%, dimana terjadi kenaikan sebesar 0,18%.

Secara rinci kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kota Palu selama kurun waktu tahun 2006-2009 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Terhadap PDRB Tahun 2006-2009

No	Uraian	Dalam Jumlah Rupiah			
		2006	2007	2008	2009
1	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian				
	- ADH Berlaku	141,704	158,811	192,619	230,641
	- ADH Konstan	88,526	95,584	103,152	114,659
2	Jumlah PDRB				
	- ADH Berlaku	3,322,196	3,822,292	4,646,250	5,332,677
	- ADH Konstan	2,048,553	2,207,064	2,366,702	2,546,302
3	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB (%)				
	- ADH Berlaku	4.27	4.15	4.15	4.33
	- ADH Konstan	4.32	4.33	4.36	4.50

Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

e). Pariwisata

Kunjungan Wisata menjadi Indikator kinerja urusan pariwisata. terkait dengan kondisi daerah Kota Palu yang merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Tengah, dikenal sebagai kota multi dimensi yang wilayahnya terdiri dari pesisir pantai, daratan, perbukitan, lembah dan sungai. Kota Palu memiliki kekayaan potensi kebudayaan dan pariwisata yang tidak kalah menarik dengan daerah lain di Indonesia,

sehingga apabila potensi tersebut dikelola secara optimal, dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu perkembangan pariwisata akan mendorong perkembangan sektor lainnya seperti jasa, perdagangan, hotel, restoran, serta angkutan dan komunikasi.

Sektor pariwisata selain merupakan salah satu penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Upaya pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor pariwisata sangat diharapkan. Selain itu pelibatan multi *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di kota ini mutlak diperlukan sehingga Kota Palu dapat menjadi tujuan wisatawan baik domestik maupun asing.

f). Industridan Perdagangan

Indikator kinerja urusan industri dan perdagangan terkait dengan kondisi daerah antara lain sebagai berikut:

f.1) Pertumbuhan Industri

Pada tahun 2010, jumlah perusahaan industri sebanyak 3.040 perusahaan yang terdiri dari : Industri Aneka 645 perusahaan, Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia sebanyak 1.038 perusahaan, dan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan sebanyak 1.357 perusahaan. Tenaga kerja yang terserap pada sektor ini mencapai 15.274orang.

Fenomena ini menunjukkan bahwa karakteristik industri Kota Palu mulai bertumbuh secara variatif antara industri berskala kecil dan menengah. Secara umum, serapan tenaga kerja yang mengalami pertumbuhan pada tiga klasifikasi industri mencerminkan adanya transisi aktivitas masyarakat dari penduduk agraris ke arah penduduk yang berorientasi pada sektor jasa dan industri sebagai ciri khas daerah perkotaan. Tabel berikut menggambarkan pertumbuhan industri di Kota Palu kurun waktu 2005-2009.

Tabel 2.40
Pertumbuhan Industri di Kota Palu Tahun 2005-2009

No	Uraian Indikator	2005	2006	2007	2008	2009	Pertam-Bahan	G/Year (%)
1.	Unit usaha							
	- ILMK	746	819	837	855	880	25	2,9
	- IA	554	567	608	533	543	10	1,8
	- IHPK	971	1.036	1.063	1.125	1.143	18	1,6
	Total I	2271	2422	2508	2513	2566	53	2,1
2.	Tenaga Kerja	2.789	3.126	3.190	3.404	3.512	108	
	- ILMK	2.485	2.556	2.684	2.767	2.863	96	
	- IA	6.805	7.177	7.455	7.844	7.923	79	
	- IHPK							
	Total II	12079	12859	13329	14015	14298	283	2,0
3.	Investasi (Rp.000)	26.613,	33.752,7	34.295,9	34.605,9	36.360,1		
	- ILMK	75	0	0	0	5		
	- IA	24.439,	24.793,1	26.618,4	29.832,9	30.278,0		
	- IHPK	10	0	0	0	3		
		55.389,	59.091,5	62.532,5	64.051,0	66.334,9		
		47	3	3	7	9		
	Total III	106442,	117637,3	123446,8	128489,8	132973,1	4483,3	3,4
		32	3	3	7	7		
4.	Nilai Produksi	43.779,	52.902,0	58.192,2	66.630,1	69.961,6		
	- ILMK	59	3	3	0	0		
	- IA	193.410	20.120,9	23.139,0	24.911,5	26.157,0		
	- IHPK	,02	3	7	2	9		
		93.083,	105.637,	116.201,	133.405,	140.557,		
		88	63	39	35	56		
	Total IV	330273,	178660,5	197532,6	224946,9	236676,2	11729,28	5,2
		49	9	9	7	5		
5.	Nilai Tambah	16.254,	22.581,7	24.839,9	29.783,0	32.919,3		
	- ILMK	85	5	3	8	3		
	- IA	7.521,4	8.077,97	9.289,67	10.070,9	10.336,4		
	- IHPK	4	53.810,6	59.191,6	3	3		
		45.778,	0	6	71.681,1	75.268,3		
		73			0	2		
	Total V	69555,0	84470,32	93321,26	111535,1	118524,0	6988,97	6,2
		2			1	8		

Sumber : Deperindagkop & UKM Kota Palu, 2010

Walaupun sektor industri Kota Palu mengalami perkembangan cukup berarti pada aktivitas yang dilakukan, namun indikator-indikator ekonomi industri masih menunjukkan fluktuasi ratio pembangunan industry itu sendiri. Salah satu indikator penting adalah analisis *ratio capital-output (COR)* dan *ratio labour output (LOR)*. Analisis COR dititik beratkan pada *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* dan *Incremental Labour Output Ratio (ILOR)*. Komposisi COR dan LOR industri Kota Palu nampak dalam table dibawah ini.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator COR dan LOR Industri Kota Palu tahun 2006-2009

No	Uraian Indikator	ICOR				ILOR			
		2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
1.	ILMK	1,1	0,2	0,06	0,5	0,05	0,02	0,04	0,03
2.	IA	0,6	1,5	4,1	1,6	0,12	0,10	0,10	0,36
3.	IHPK	0,4	0,6	0,1	0,6	0,04	0,05	0,03	0,02
		0,75	1,67	0,27	17,1	0,05	0,05	0,03	0,04

Sumber : Deperindagkop & UKM Kota Palu, 2010

Analisis ICOR menginterpretasikan dampak peningkatan investasi terhadap output. Semakin besar nilai ICOR industri mencerminkan kurangnya efektifitas investasi dalam meningkatkan produksi. Sebaliknya, untuk mewujudkan pertumbuhan output diperlukan pembentukan modal yang relatif besar. Demikian pula dengan analisis ILOR, semakin besar ratio mencerminkan besarnya dampak pertambahan output akibat pertumbuhan tenaga kerja.

Informasi menunjukkan bahwa karakteristik industri Kota Palu cenderung bersifat padat modal. Hingga tahun 2009 ICOR mencapai 17,1 dengan pengertian untuk pertumbuhan satu unit output diperlukan penambahan investasi sebesar 17,1. Jika dikehendaki penambahan output yang besar, maka diperlukan penambahan modal sebanyak 17,1 kali lipat. ICOR yang cenderung meningkat hingga tahun 2009, dimungkinkan oleh adanya tenggang waktu perolehan output atas investasi yang

dibentuk selama 3 tahun terakhir. Kecenderungan demikian juga menggambarkan kondisi industri di Kota Palu berkarakteristik investasi jangka panjang dan relative peka terhadap perkembangan teknologi, serta relative kurang memperhitungkan daya dukung yang lain seperti aspek pasar dan bahan baku, olehnya ICOR cenderung fluktuatif.

f.2) Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Kontribusi sector perindustrian terhadap PDRB Kota Palu selama kurun waktu tahun 2006-2009 tersaji pada tabel berikut. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar 14,74% pada tahun 2006, menurun menjadi 12,61% pada tahun 2009. Demikian pula kontribusi PDRB berdasarkan harga konstan cenderung menurun di tahun 2009 dibandingkan tahun 2006

Tabel 2.42
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kota Palu
Tahun 2006-2009

No	Uraian	Dalam Jumlah Rupiah			
		2006	2007	2008	2009
1	Kontribusi Sektor Industri				
	- ADH Berlaku	489,586	542,797	610,198	672,287
	- ADH Konstan	279,404	295,825	308,882	326,228
2	Jumlah PDRB				
	- ADH Berlaku	3,322,196	3,822,292	4,646,250	5,332,677
	- ADH Konstan	2,048,553	2,207,064	2,366,702	2,546,302
3	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)				
	- ADH Berlaku	14.74	14.20	13.13	12.61
	- ADH Konstan	13.64	13.40	13.05	12.81

Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

f.3) Ekspor Bersih Perdagangan

Pada tahun 2010 nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Palu adalah Rp 307.048.284,87,- meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan impor relatif kecil setiap tahunnya kecuali pada tahun 2010 mencapai Rp 5.380.000,- Kecilnya volume impor Kota Palu, mencerminkan bahwa Kota Palu bukan

menjadi sasaran impor yang utama di kawasan timur Indonesia. Selain berkenaan dengan pangsa pasar yang relative terbatas, jangkauan daya beli masyarakat serta faktor akses transportasi yang masih terbatas sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi variabel impor Kota Palu

Tabel 2.43
Jumlah Ekspor Perdagangan di Kota Palu
Tahun 2007 – 2010 (000 US\$)

No	Uraian	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Nilai Ekspor	168.625,99	199,398.40	2,101,994.98	244,095.59	312,428,248.87
2.	Nilai Impor	5.407,06	0	0.02	0	5,380,000.00
3.	Nilai Ekspor Bersih	163.218,93	199,398.40	2,101,994.96	244,095.59	307,048,248.87

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

f.4) Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan dalam hal ini termasuk perdagangan, hotel dan restoran mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kota Palu. Data rincian mengenai kontribusi sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) terhadap PDRB Kota Palu selama kurun waktu tahun 2006-2009 tersaji pada berikut.

Tabel 2.44
Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran)
Terhadap PDRB Tahun 2006-2009

No	Uraian	Dalam Jumlah Rupiah			
		2006	2007	2008	2009
1	Kontribusi Sektor Perdagangan				
	- ADH Berlaku	451,029	528,386	639,713	738,597
	- ADH Konstan	272,534	294,792	315,969	338,214
2	Jumlah PDRB				
	- ADH Berlaku	3,322,196	3,822,292	4,646,250	5,332,677
	- ADH Konstan	2,048,553	2,207,064	2,366,702	2,546,302
3	Kontribusi Sektor Perdagangan (%)				
	- ADH Berlaku	13.58	13.82	13.77	13.85
	- ADH Konstan	13.30	13.36	13.35	13.28

Sumber : Kota Palu dalam Angka 2010 (diolah kembali)

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Indikator kinerja sehubungan dengan kemampuan ekonomi daerah terkait dengan kondisi daerah antara lain sebagai berikut.

a) Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi Rumah Tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih, sedangkan bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Angka konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita di Kota Palu, tersaji pada gambar berikut.

Gambar 2.39
Angka Konsumsi Rata-Rata Rumah Tangga per Kapita
di Kota Palu Tahun 2005 – 2009



Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

b) Produktivitas Daerah

Produktivitas daerah per sektor (9 sektor) merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.

Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Berdasarkan distribusi PDR batas dasar Harga Berlaku tahun 2009 struktur perekonomian Kota Palu selama ini ditunjang oleh 9 (sembilan) sektor pembentuk PDRB. Adanya perbedaan pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing sektorekonomi menyebabkan berubahnya struktur perekonomian. Berdasarkan harga berlaku, diketahui bahwa sektor ekonomi yang paling berperan adalah sektor Jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 28,87%, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Produktivitas Total Daerah per Sektor (ADH Berlaku)
di Kota Palu Tahun 2009

No	Sektor / Lapangan Usaha	Nilai(Juta Rp)
a. PDRB		
1.	Pertanian	126,375
2.	Penggalian	230,641
3.	Industri Pengolahan	672,287
4.	Listrik dan Air Bersih	161,542
5.	Bangunan	545,992
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	738,597
7.	Angkutan dan Komunikasi	690,497
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	627,206
9.	Jasa-Jasa	1,539,540
b. Jumlah Angkatan Kerja		210,068

Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Indikator kinerja sehubungan dengan fasilitas wilayah dan infrastruktur berdasarkan kondisi daerah antara lain sebagai berikut.

a) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Indikator ini penting karena dapat digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Tabel 2.46
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
di Kota Palu Tahun 2009 - 2010

No	Uraian	2009	2010
1	Panjang Jalan	790.668	790.668
2	Jumlah Kendaraan	6. 524	7.061
3	Rasio	0.12	0.11

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

b) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga Dalam Periode 1 Tahun

Lalu lintas kapal laut yang masuk dan keluar wilayah Kota Palu dilayani oleh pelabuhan Pantoloan. Jumlah penumpang yang datang pada tahun 2005 sebesar 517.405 orang, menurun 88,86% pada tahun 2009 sehingga menjadi 57.623 orang. Adapun penumpang yang berangkat menurun sebesar 23,29% dari tahun 2005 ke tahun 2009. Hal ini disebabkan semakin lancar dan intensifnya lalu lintas udara karena harga tiket relatif terjangkau. Sebaliknya barang yang dibongkar pada tahun 2005 sebesar 401.673 ton, meningkat sebanyak 27,88% pada tahun 2009. Sedangkan barang yang dimuat pada tahun 2005 sebanyak 975.621 ton meningkat 3,88% pada tahun 2009. Secara rinci lalu lintas

barang dan penumpang yang melalui pelabuhan pantoloan tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Lalu-lintas Kapal, Jumlah Penumpang yang Datang dan Berangkat, dan Jumlah Barang yang Dibongkar dan Dimuat di Pelabuhan Pantoloan

Tahun	Kapal (bh)		Penumpang (org)		Barang (ton)	
	Dalam Negeri	Luar Negeri	Datang	Berangkat	Dibongkar	Dimuat
2009	1.854	59	57.623	57.263	556.990	1.014.970
2008	1.934	75	64.085	78.630	394.442	1.344.260
2007	1.793	75	65.274	74.482	345.355	1.550.808
2006	1.656	71	71.022	82.298	92.317	1.091.548
2005	1.846	68	517.405	74.648	401.673	975.621

Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

c) Penataan Wilayah/Kawasan

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan lindung meliputi; hutan konservasi, sempadan, hutan lindung, ruang terbuka hijau dan perairan dengan luas 22.290 hektar. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi: kawasan budidaya berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, hutan rakyat); kawasan budidaya pertanian (pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, peternakan) dan kawasan budidaya non pertanian (kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pemerintahan/fasilitas umum, kawasan permukiman, kawasan perdagangan/jasa dengan luas 17.216 hektar.

d) Jumlah Bank dan Non Bank

Jumlah Kantor Bank di Kota Palu sampai dengan tahun 2009 tercatat sebanyak 61 unit yang terdiri dari 5 Kantor pusat, 17 Kantor Cabang, 11 Kantor Cabang Pembantu, 4 Kantor Kas, dan 22 Kantor Unit Pembantu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.48
Banyaknya Bank dan Cabangnya Menurut Jenis Bank
di Kota Palu Tahun 2006 – 2010

No.	Nama Bank	Status					
		KP	KC	KCP	KK	Unit	Jumlah
1.	Bank Indonesia	-	1	-	-	-	1
2.	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	-	1	2	-	-	3
3.	PT.BNI 1946 (Persero), Tbk.	-	1	3	-	-	4
4.	PT. BRI(Persero), Tbk.	-	1	1	-	22	24
5.	PT. BTN(Persero)	-	1	-	3	-	4
6.	PT. Bank Danamon Indonesi,Tbk.	-	1	3	-	-	4
7.	PT. Bank Central Asia, Tbk.	-	1	1	-	-	2
8.	PT. BPD Sulteng	1	1	-	1	-	3
9.	PT. BII, Tbk.	-	1	-	-	-	1
10.	PT. Bank Syariah Mandiri	-	1	-	-	-	1
11.	PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk.	-	1	1	-	-	2
12.	PT. Bank Panin, Tbk.	-	1	-	-	-	1
13.	PT. Bank Mega, Tbk.	-	1	-	-	-	1
14.	PT. BPR Palu Lokadana Utama	1	-	-	-	-	1
15.	PT. BPR Palu Anugerah	1	-	-	-	-	1
16.	PT. Bank Sinar Mas	-	1	-	-	-	1
17.	Bank BTPN	-	1	1	-	-	2
18.	BPR Nustria Mitra Abadi	1	-	-	-	-	1
19.	BPR Prima Artha Sejahtera	1	-	-	-	-	1
20.	Bank Mayapada	-	1	-	-	-	1

21.	Bank Mega Syariah	-	1	1	-	-	2
Kota Palu 2010		5	17	13	4	22	61
	2009	5	15	11	4	22	57
	2008	3	14	8	2	20	47
	2007	3	13	8	2	12	38
	2006	3	13	8	-	12	36

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

e) Ketersediaan air bersih

Air bersih (*cean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak, Sumber air bersih dapat dibedakan atas air sumur dan air dalam tanah.

Pada tahun 2009, jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Palu sebanyak 1,86% dari total jumlah rumah tangga yang ada di Kota Palu. Gambaran lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Palu pada tahun 2009 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih di Kota Palu Tahun 2009

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Sungai	457,662	M ³
2.	Air dalam Tanah	30,383	M ³
3.	Jumlah	488,045	M ³
4.	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih	1,411	Rumah Tangga
5.	Jumlah Rumah Tangga	75720	Rumah Tangga
6.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	1.86	Persen

Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

f) Fasilitas listrik

Kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik, salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan

listrikerlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Kota Palu
Tahun 2006 – 2010

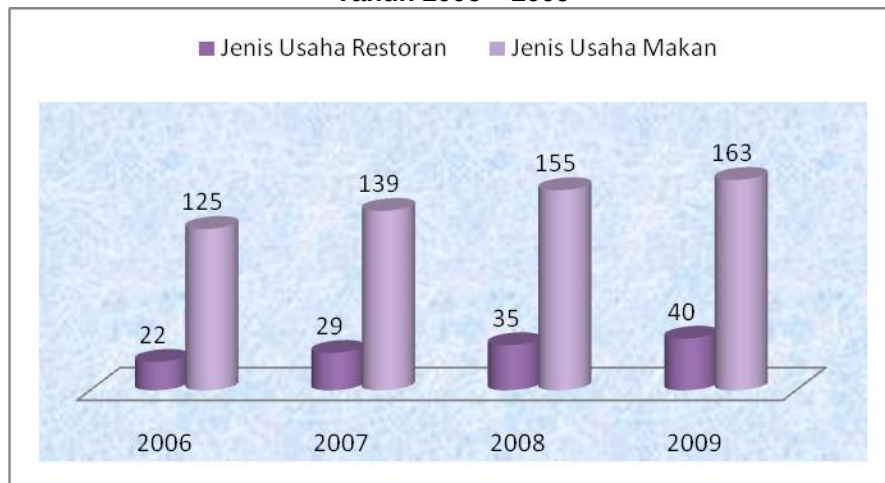
No	Indikator		Tahun (%)				
			2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah RT menggunakan listrik		80,444	73,969	73,324	79,085	85,214
2.	Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya		69,652	67,391	69,838	75,720	79,241
3.	Persentasi RT menggunakan listrik		86.58	91.11	95.25	95.75	92.99

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

g) Jumlah Restoran dan Rumah Makan

Jumlah restoran dan rumah di suatu daerah merupakan salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah. Kondisi daerah terkait dengan ketersediaan restoran dan rumah makan, diantaranya dapat dilihat dari jumlah restoran dan rumah makan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Gambar 2.40
Jenis Restoran dan Rumah Makan di Kota Palu
Tahun 2006 – 2009



Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

h) Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah penginapan/hotel sangat menunjang dalam

pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu daerah, dimana peningkatan jumlah penginapan berkorelasi dengan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah. Kondisi daerah terkait dengan jumlah penginapan/hotel terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Palu
Tahun 2006 – 2009

No	Uraian	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1.	Hotel Bintang 5	0	0	0	0
2.	Bintang 4	0	1	1	1
3.	Bintang 3	1	1	1	1
4.	Bintang 2	1	1	1	1
5.	Melati	21	24	25	27
6.	Penginapan	23	26	27	28
7.	Wisma/Mess	4	4	4	4
8.	Villa/Cottage	1	1	1	1
	Jumlah	51	58	60	63

Sumber : BPS Kota Palu, 2010 (diolah kembali)

2.4.3. Iklim Berinvestasi

Salah satu indikator dalam pembangunan perekonomian adalah iklim berinvestasi. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Salah satu hal yang mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Kota Palu antara lain kondisi keamanan di wilayah tersebut. Kondisi daerah terkait dengan iklim investasi dapat dilihat pada beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

a). Angka kriminalitas

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat adalah angka kriminalitas. Semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Pada tahun 2009 jumlah tindak kriminal di Kota Palu sebanyak 154 dan pada tahun 2010 ada 285 kasus, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Angka Kriminalitas di Kota Palu
Tahun 2009 – 2010

No.	Jenis Kejahatan	Tahun 2009			Tahun 2010		
		Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P		L	P	
1.	Ketertiban Umum	2	0	2	5	-	5
2.	Pemalsuan Uang	3	0	3	-	-	-
3.	Memalsukan Surat	0	0	0	1	1	2
4.	Kesusilaan	4	0	4	9	13	22
5.	Penculikan	1	0	1	1	-	1
6.	Pembunuhan	40	2	42	17	2	19
7.	Penganiayaan	6	0	6	19	-	19
8.	Pencurian	8	0	8	45	-	45
9.	Perampokan	8	0	8	19	1	20
10.	Memeras	0	0	0	1	-	1
11.	Penggelapan	1	1	2	5	1	6
12.	Penipuan	1	1	2	6	1	7
13.	Penadahan	0	0	0	1	-	1
14.	Korupsi	2	0	2	9	-	9
15.	Teroris	3	0	3	1	1	2
16.	Perlindungan Anak	25	0	25	40	1	41
17.	Pabeanan	4	0	4	-	-	-
18.	Narkoba	2	0	2	60	2	62
19.	Titipan POM	11	0	11	-	-	-
20.	Illegal Logging	26	0	26	3	-	3
21.	Lakalantas	3	0	3	7	-	7
22.	Pemburuan	0	0	0	2	-	2
23.	Senjata Tajam	0	0	0	2	-	2
24.	Farmasi	0	0	0	7	-	7
25.	Reserse	0	0	0	2	-	2
	Jumlah	150	4	154	262	23	285

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

b). Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan. Semakin sedikit jumlah demonstrasi, semakin tinggi tingkat kesepahaman dan berkorelasi positif dengan tingkat kondisi keamanan suatu wilayah atau daerah

c). Kemudahan Perizinan

Kemudahan perizinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi iklim investasi di suatu wilayah. Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu semakin mudah proses perizinan di suatu wilayah, akan semakin kondusif iklim investasi di wilayah tersebut.

d). Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah)

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

e). Status Kelurahan

Pembangunan kelurahan dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perdesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Berdasarkan statusnya, desa atau kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa/kelurahan swadaya; desa/kelurahan swakarya; dan desa/kelurahan swasembada (berkembang). Gambar lengkap mengenai jumlah kelurahan menurut

klasifikasinya di Kota Palu pada tahun 2010 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Jumlah Kelurahan Menurut Status dan Kecamatan
di Kota Palu Tahun 2010

No.	Kecamatan	Klasifikasi			Jumlah
		Swadaya	Swakarsa	Swasembada	
1.	Palu Barat	0	0	15	15
2.	Palu Selatan	0	0	12	12
3.	Palu Timur	0	3	5	8
4.	Palu Utara	0	0	8	8
Kota Palu 2009		0	3	40	43

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kondisi daerah terkait dengan sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

a). Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas sumber daya manusia berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin

baik kualitas tenaga kerjanya.

b). Tingkat Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15 - 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan penduduk Kota Palu tahun 2009 – 2010 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.54

Rasio Ketergantungan Tahun 2009 - 2010 di Kota Palu

No	Uraian	Rasio Ketergantungan			
		2009		2010	
		Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1.	Jumlah penduduk Usia < 15 tahun	85,398	27.87	96,360	28.63
2.	Jumlah penduduk Usia > 64 tahun	10,949	3.57	8,138	2.42
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) dan (2)	96,347	31.44	104,498	31.05
4.	Jumlah penduduk Usia 15 - 64 Tahun	210,068	68.56	232,034	68.95
5.	Jumlah Penduduk Keseluruhan	306,415	100.00	336,532	100.00
6.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	-	45.86	-	45.04

Sumber : BPS Kota Palu, 2011 (diolah kembali)

TABEL 2.56 ASPEK PELAYANAN UMUM & PILIHAN

I. Fokus Layanan Urusan Wajib

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					St a n d ar	Interpretasi
		2006	2007	2008	2009	2010		
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1	Kesejahteraan & Pemerataan Ekonom							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Peerintahan Umum, Adminisrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1.	Pertumbuhan PDRB (Nilai PDRB ADH Konstan)	3,322,197	3,822,292	4,655,152	5,332,677			
1.1.1.2.	Laju Inflasi	8,69	8,13	10,4	5,73	6,4		
1.2.1	Fokus Kesejahteraan Sosial							
1.2.1.1	Angka Melek Huruf			99,23	98,75			
1.2.1.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah			10,87	11,3			
1.2.1.3	Persentase Penduduk Bekerja			81,48	83,24			
1.2.2.	<i>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</i>							
1.2.2.1	Perkembangan group seni	100,08	131,26	226,51	319,31			
1.2.2.2	Jumlah Atlet				574			
1.2.2.3	Jumlah Induk Olahraga				17			
2	PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	<i>Pendidikan</i>							
	Pendidikan Dasar (7 – 12 tahun)							
	Angka Partisipasi Kasar		103,81	104,89	93,76	96,47		
	Angka Partisipasi Murni		74,83	103,61	78,13	82,61		
	Rasio Murid/Ruang Belajar		32,44	33,26	30,42	31,18		
	Rasio Murid/Guru		17,10	16,90	19,86	19,72		
	Rasio Murid/Buku		0,44	0,60	0,70	0,75		

	Pendidikan Menengah (13 - 15 tahun)							
	Angka Partisipasi Kasar		92,12	94,00	109,95	109,12		
	Angka Partisipasi Murni		89,80	94,80	80,61	83,84		
	Rasio Murid/Guru		10,82	10,65	11,60	11,83		
	Rasio Murid/Ruang Belajar		34,95	32,74	31,9	32,15		
	Rasio Murid/Buku		5,31	5,13	0,19	0,32		
	Pendidikan Atas (16- 18 tahun)							
	Angka Partisipasi Kasar		83,56	86,92	109,54	112,87		
	Angka Partisipasi Murni		51,65	54,75	64,61	70,77		
	Rasio Murid/Guru		23,19	21,88	13,17	35,15		
	Rasio Murid/Ruang Belajar		39,53	35,85	34,58	35,15		
	Rasio Murid/Buku		1,8	1,7	1,3	1,3		
	Kesehatan							
	Umur Harapan Hidup	67,5	67,5	67,5	69	69,7		
	Angka Kematian Kasar			2,67/1000 penduduk	3,13/1000 penduduk	3,14/1000 penduduk		
	Angka Kematian Bayi			4/1000 KH	3,37/1000 KH	4,11/1000 KH		
	Angka Kematian Ibu		153/100.000 KH	103/100.000 KH	96/100.000 KH	173/100.000 KH		
	Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk	3,88/100.000 pddk	3,94/100.000 pddk	3,88/100.000 pddk	3,89/100.000 pddk	3,83/100.000 pddk		
	Rasio Pustu per Satuan Penduduk	9,37/100.000 pddk	9,52/100.000 Pddk	9,06/100.000 pddk	9,40/100.000 pddk	9,26/100.000 pddk		
	Rasio Puskesmas Keliling per Satuan Penduduk	4,53/100.000 pddk	4,59/100.000 Pddk	4,53/100.000 pddk	4,54/100.000 pddk	4,47/100.000 pddk		
	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit Umum per Satuan Penduduk					329,15/10.000 pddk		
	Pekerjaan Umum							
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik				52,36%	68%		
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Sedang Rusak				2,03%	8,99%		
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Rusak				22,50%	20,70%		
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Rusak Berat				23,11%	2,31%		

	Rasio Jaringan Irigasi	5,57	5,57	6,24	6,24	6,24		
	Perumahan							
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	31,52	39,90	35,71	29,91			
	Perhubungan							
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	4933	536	5862	6524	7061		
	Jumlah Izin Trayek	1967	2014	2041	2094			
	Lingkungan Hidup							
	empat Pembuangan Sampah				0,5%	0,5%		
	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih	40,11	64,89	58,92	70,52			
	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal				50%	50%		
	Penegakan Hukum Lingkungan				100%	100%		
	Komunikasi dan Informatika							
	Banyaknya Pelanggan Telekomunikasi	19.713	20.558	30.853	32.990			
	Sarana Telekomunikasi Telpn Umum	62	60	61	81			
	Sarana Telekomunikasi Wartel	491	438	231	48			
	Perusahaan Operator Seluler			4 buah				
	Kependudukan dan Catata Sipil							
	Jumlah Akta Catatan Sipil yang Diterbitkan		7.563	3.993	3.131	55.110		
	Pemberdayaan Perempuan dan KB							
	Jumlah Anggota Legislatif Perempuan	23			22			
	Jumlah Target Akseptor Baru	14.493	7.848	8.880	7.056			
	Jumlah Pencapaian Akseptor Baru	3.987	6.870	7.462	9.073			
	Ketenagakerjaan							
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				66,51%			
	Tingkat Pengangguran Terbuka				10,91%			
	Koperasi dan UKM							
	Jumlah Koperasi	309	315	320	323	323		
	Jumlah UMKM yang Dibina			10.837	12.323	12.820		
	Kebudayaan dan Pariwisata							
	Jumlah Pelaksanaan Festival Teluk Palu	1	-	-	-	1		
	Ketahanan Pangan							
	Produktifitas Bahan Pangan Lokal			5.335	10.908			
	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan							
	Banyaknya LPM	43	43	43	43			

3.1. Potensi Kota Palu yang menonjol

Secara fisik geografis, Kota Palu dikelilingi beberapa pegunungan yakni, Gawalise, Vatulemo dan Masomba yang melingkar dari ufuk barat ke selatan dan timur kota. Sementara dari bahagian utara, dan bahagian barat, terbentang luas Teluk Palu sebagai bagian dari pemandangan dan estetika kota yang mungkin oleh kita sendiri, warga kota palu, kurang memberikan apresiasi.

Dari kondisi geografis tersebut, maka kota ini terletak di lembah yang sebagian diantaranya tersebar di sepanjang 20 km pinggiran pantai teluk dan sekitar 4 km sebelah menyebelah tepian sungai Palu yang membelah kota Palu menjadi dua bahagian. Jadi, kota ini merupakan kota Lembah, kota Sungai, sekaligus kota teluk dan pesisir yang diapit pegunungan dengan iklim yang sangat spesifik. Curah hujan berada pada kisaran kurang dari 1000 mm/tahun, dengan temperatur 27,7 C . Kota ini juga di lewati oleh sesar gempa Palu Koro yang membuat kawasan ini secara periodik tertentu menerima guncangan gempa tektonik. Karakter kota yang semacam ini menurut berbagai kalangan, jarang ditemukan. Kondisi geografis tersebut sengaja ditonjolkan, karena secara langsung merupakan peluang dan tantangan untuk menata pembangunan kota ini kedepan.

Sebagai ibu kota Propinsi, sekaligus ibukota Palu, kota ini terletak pada lintas trans Sulawesi dan didukung lancarnya hubungan laut dan udara telah berpengaruh pada pertumbuhan penduduk dengan segala daya tarik yang sangat perlu dicermati dalam perencanaan pembangunan kota. Posisi dan status Kota Palu yang demikian itu telah menjadikan Palu sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi,

Industri, Pelayanan Jasa, Pendidikan, Kesehatan, Pengembangan Sosial Budaya dan Konsentrasi Pendatang (penduduk baru).

Dari segi lalu lintas darat, kota ini dihubungkan dari berbagai penjuru Sulawesi melalui jalan trans-Sulawesi. Sedangkan dari segi lalu lintas laut, kota ini merupakan salah satu kota yang terletak di Selat Makassar yang kelak menjadi lalu lintas internasional setelah selat Malaka menjadi jenuh atau tidak mampu lagi melayani pelayaran dengan bobot besar (*ultra cargo carrier*). Posisi sebagai jalur internasional ini mengharuskan kita untuk segera berbenah terutama menghadapi era global.

Dari sudut ekoturisme dan ilmu pengetahuan, selain keunikan geologis Kota Palu sendiri, kita juga memiliki potensi berupa flora fauna unik (Endemik) berkelas dunia. Katakanlah Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dan sejumlah habitat lain menyimpan berbagai jenis flora fauna endemik seperti Kayu Eboni, Burung Maleo, Babi rusa, Anoa dan lain lain yang memiliki daya tarik wisatawan yang sangat tinggi nilainya. Kondisi sosiologis juga mendukung berupa variasi etnik lokal dengan keunikan bahasa serta pluralisme suku bangsa yang tidak berlebihan dikatakan sebagai miniatur Indonesia (Nasruddin, lembaga Prof. Sayogyo, 2002).

Dari sisi potensi pengembangan ekoturisme manca negara, kita bisa melakukan hubungan interkoneksitas dengan sentra pariwisata terdekat dan populer untuk kepentingan promosi. Kawasan seperti Tanah Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan dan Bonaken di Sulawesi Utara merupakan modal eksternal yang berharga bagi promosi pariwisata melalui pola kerjasama interkoneksitas yang saling menguntungkan. Pasir Putih Tanjung Karang dan Taman Nasional Lore Lindu di Donggala dan Poso, Pulau Togian di Ampana, Tanjung Api di Marowali dan danau Poso di Poso menjadi modal internal yang dapat dikembangkan. Keseluruhan obyek wisata Sulawesi Tengah tersebut akan memposisikan Palu sebagai pusat persinggahan yang menjanjikan. Tinggal kita kemas paket wisata di Kota Palu sendiri untuk menahan lama tinggal orang di kota ini.

Bila ditilik dari sudut ekonomi lokal, Kota Palu terletak ditengah, dilingkari tujuh kabupaten yang memungkinkan mengalir secara bolak balik arus barang ekonomi baik hasil produk lokal maupun dari luar daerah. Kondisi ini memungkinkan kota ini berkembang menjadi tempat transit yang berfungsi sekaligus sebagai sentral bisnis dan jasa.

Berdasarkan komposisi aktifitas ekonomi saat ini di kota Palu, sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB untuk data 2009 adalah sektor jasa-jasa sebesar 28,87 %, menyusul Angkutan dan Komunikasi sebesar 12,95%, Industri Pengolahan 12,61 %, Perdagangan, Hotel & Restoran 13,85%, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 11,76%. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi di bawah 11% terhadap PDRB di Kota Palu masing-masing, sektor bangunan (10,24 %), penggalian (4,33), listrik & air bersih (3,03 %) serta sektor pertanian (2.37 %).

Oleh karena itu, pada tempatnya bila kita mengajak seluruh warga Kota Palu untuk berpikir, seperti apa karakter Kota Palu masa depan. Paling tidak, dalam empat belas tahun kedepan, akan jadi seperti apa kota kita ini kelak, dengan melihat kondisi dan potensi kota kita hari ini. Karakter apa yang paling tepat untuk diletakkan sebagai visi yang dapat menggerakkan semua sektor dan atau potensi yang ada dan menjadi acuan untuk memecahkan masalah dan mewujudkan harapan warga kota ini. Hal ini penting agar kita tahu bagaimana dan kemana kota kita ini akan melangkah dengan lebih pasti.

3.2. Isu, Masalah dan Harapan Warga Kota Palu.

Berdasarkan hasil identifikasi isu strategis kota Palu dan harapan warga yang dilakukan selama ini sejak 2003, 2005 dan 2011, baik studi literature (Sekunder), lokakarya kelurahan, Kecamatan dan Kota oleh bersama BAPPEDA dan lokakarya bertingkat lainnya, diskusi terfokus menyangkut masalah dan solusi permasalahan kota dengan berbagai dinas terkait. Diskusi permasalahan tematik yang digagas publik (Simpul Warga/SIAGA/YPR), *Focus Group Discussion* (FGD) di 4 (empat) Kecamatan di Kota Palu, temu Warga setiap Kecamatan se Kota Palu dan Silaturahmi

Warga Kota Palu, penyebaran 3500 Angket, penjangkauan aspirasi dan harapan warga di kalangan profesional (Petani, Guru, Mahasiswa, Pengusaha, Pedagang kaki lima, Nelayan, Pemulung, Ojek, Becak, Dokar, dll). Pertemuan-pertemuan informal dengan DPRD dan Pemerintah Kota. Diskusi lepas dengan kalangan LSM termasuk dengan Dewan Kesenian di Kota Palu serta diskusi komparasi dengan warga Kota Palu yang studi di berbagai negara, diperoleh sejumlah isu, masalah dan harapan warga antara lain :

3.2.1. Isu Kota Palu yang menonjol

1. Pengembangan Ekonomi Lokal (kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat)
2. Isu Kinerja Apparatur Kota Dan Kualitas Pelayanan Publik (Tata kelola pemerintahan);
3. Isu Infrastruktur (energi, air bersih, transportasi dan komunikasi);
4. Isu Lingkungan Hidup dan Mitigasi bencana
5. Tata Ruang Kota;
6. Sosial budaya (Pendidikan dan kesehatan masyarakat).

3.2.2. Masalah Kota Palu yang menonjol :

1. Kemiskinan
2. Kebersihan dan Sampah Kota;
3. Energi Listrik;
4. Air Minum;
5. Pelayanan Publik;
6. Keamanan dan Ketertiban;
7. Transportasi;
8. Ketenagakerjaan;
9. Sarana prasarana
10. Tata ruang
11. Lingkungan Hidup dan bencana alam.

3.2.3 Harapan Warga Kota

Harapan warga tentang Karakter Kota Palu Kedepan antara lain :

1. Palu Kota Bersih, Indah dan Nyaman;
2. Palu Kota Idaman;
3. Palu Kota Kunjungan Wisata;
4. Palu Kota Wisata;
5. Palu Kota Jasa;
6. Palu Kota Transit;
7. Palu Kota Transit, Barang dan Jasa;
8. Palu Kota Transit Orang, Barang dan Jasa;
9. Palu Kota Wisata dan Jasa;
10. Palu Kota Paling Maju dan Lestari;
11. Palu Kota Religius;
12. Palu Kota Pendidikan.
13. Palu Kota Binter
14. Palu Kota Budaya
15. Palu Kota Seni dan Budaya

Atas berbagai masukan stakeholder, masalah, Isu strategi, dan potensi dan harapan berbagai stakeholder dari sekian seri diskusi sejak tahun 2003 hingga bulan Agustus 2011, maka dicapailah kesepakatan tentang visi daerah/kota Palu untuk 14 tahun kedepan adalah Kota Untuk Semua *“City For All”*.

3.3. Proses Panjang Lahirnya Visi Kota Palu

“Vision is a picture of preferred future state.

A description of what it would like to be some years from now.

It is more than a dream or set of hopes, it is a commitment.

Vision are rooted in reality but focused on the future”.

Cyntia Scot, Guritno (2003).

(Transled)

Seorang Pedagang Kaki Lima berkata di *Bukit Jabal Nur Kelurahan Tondo* saat berlangsung *Silaturahmi Warga Kota Palu* akhir

tahun 2002. Kami, kata PKL tersebut, tidak terlalu peduli seperti apa visi kota Palu, yang penting kami tahu besok kami makan apa. Dalam kapasitasnya, pedagang tersebut sama sekali tidak keliru. Tapi, yang keliru adalah ketidakmampuan kita untuk meyakinkan bahwa dengan visi yang rasional dan partisipatif, PKL itu seharusnya nanti tidak hanya tahu besok mereka makan apa, bahkan bagaimana caranya mereka memperoleh makanan. Sebab, seorang PKL sekalipun, telah tahu kearah mana kota akan menuju sehingga mereka telah bisa memprediksi kepentingannya dengan usaha mereka.

Visi akan membuat arah pembangunan terfokus sehingga sumber daya dan dana yang terbatas sekalipun akan terfokus untuk melakukan sesuatu yang pokok dan bisa menggerakkan sektor lain. Bukan sumber yang sedikit, membiayai banyak hal sehingga tak ada yang menonjol dan tidak strategis menggerakkan sektor lain. Inilah konsep efisiensi dan efektif yang secara konsisten bertumpu pada skala prioritas dan itulah manfaatnya kita membuat visi.

Beberapa waktu yang lalu umumnya berbagai kota di Indonesia dalam merancang visi kotanya selalu menggunakan konsultan dan hampir tidak ada rancangan dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Padahal hal ini penting karena visi kota adalah visi yang harus menjadi komitmen seluruh warga kota dari proses melahirkan hingga melaksanakannya. Terdapat juga visi Walikota atau Pemerintahan Kota. Lebih dahulu, harus didudukkan bahwa visi kota adalah visi seluruh masyarakat kota dengan jangkaan 20 sampai 25 tahun kedepan. Sedangkan Visi Walikota adalah Visi Pemerintahan Kota dalam kurun waktu 5 tahunan yang merupakan janji dan komitmen wali kota pada saat mencalonkan diri. Jadi, Visi Walikota akan sebaiknya mengambil bagian dari visi Kota untuk periode lima tahun ke pemerintahannya. Dengan begitu maka bidikan pembangunan akan terarah dan berkesinambungan, siapapun walikotanya.

Kalimat singkat yang dikutip dari Guritno (2003), tersebut menjelaskan bahwa, visi merupakan gambaran masa depan yang

diinginkan. Visi bukanlah sekedar mimpi, tapi disana ada komitmen. Yaitu, komitmen dari seluruh warga atau *stakeholders* (Baca : pemerintah dan rakyat) untuk mencapainya. Visi, dengan demikian, mengakar pada kenyataan (baca : potensi dan isu) tapi sekaligus memfokus pada masa depan. Jadi, visi bisa menjadi arah (*gueden*) bagi bergerakanya biduk kota kearah yang di sepakati.

Kata-kata yang disepakati mengisyaratkan bahwa arah pembangunan sebuah kota akan lebih baik bila lahir dari konsensus warganya. Dari pengalaman, terdapat paling tidak, dua pendekatan ketika orang mau membuat visi sebuah kota. **Pertama**, berangkat dari mimpi seseorang atau sekelompok orang tentang masa depan kota, lalu lahirlah sebuah visi dari mimpi tersebut. Langkah berikut adalah mengkaji berbagai masalah menuju visi untuk ditemukan jalan keluarnya. **Kedua**, melihat potensi yang ada dan dipadukan dengan nilai dan isu strategis yang ada, baru tentukan masa depan seperti apa yang bisa di dukung dengan potensi nilai dan isu strategis tersebut. Lebih lanjut, ditilik apa hambatannya dan bagaimana jalan keluarnya dalam bentuk misi, strategi dan model program aksi.

Cara mana pun yang dipilih kelak, harus bertumpu pada kaedah umum yaitu harus *Spesific, Mesurable, Acceptable, Rational dan Time (SMART)*. Ukuran standar ini mengisyaratkan sebuah visi yang harus dibangun bersama, yaitu unik, bisa diukur, dapat disetujui khalayak, diterima akal dan memiliki jangkauan waktu tertentu (25 tahun untuk visi kota).

Mengapa harus dua puluh tahunan ? Jawabannya sederhana saja, agar kebijakan umum dan strategis bisa bertahan dalam waktu relatif lama, sekaligus menghindari anggapan ganti pimpinan ganti kebijakan. Dari segi investasi ekonomi, butuh kepastian usaha dimana titik keseimbangannya (*break even point*) nya biasa tercapai dalam waktu relatif di atas lima belas hingga dua puluhan tahun. Pertukaran generasipun, secara alami akan dimulai pada kisaran waktu dua puluhan tahun itu.

Harus dimaklumi bahwa memulai penyelenggaraan pemerintahan dengan visi, relatif baru diintrodusir beberapa dekade terakhir. Karena itu, tidaklah mengherankan, seperti yang terungkap dalam banyak seminar lokal maupun nasional, terdapat banyak sekali salah kaprah atau latah dalam menyusun visi. Bagaimana tidak, visi pemerintahan yang hanya punya periode lima tahunan, biasanya disusun dengan kata-kata pilihan yang sangat manis dan amat ideal yang kalau diukur, mungkin baru bisa dicapai dalam lebih dua puluh tahunan bahkan tak terbatas (*Never ending*).

Hal tersebut amat berkaitan dengan kebiasaan kita untuk memasukan dan mengakomodir semua hal (*Incremental*) dan merangkainya menjadi kata indah. Dan itulah visi yang kedengarannya sangat indah tapi amat sulit dicapai. Padahal, dalam melahirkan visi, kecuali kalau ada tekad spesifik, hal-hal yang bersifat incemental, yaitu sesuatu yang mutlak harus dilakukan, tidak harus tertulis dalam visi. Hal tersebut secara umum dapat berupa masalah, keamanan, agama, kesehatan dan lain-lain.

Ketika itu, tahun 2002, belum banyak orang bicara tentang visi jangka panjang sebuah daerah atau kota. Meskipun telah ada dalam dokumen perencanaan, namun visi di era itu umumnya dibangun untuk jangka waktu lima tahun dan disusun berdasarkan kehendak sekelompok orang (birokrasi, politisi dan akademisi) yang disebut konsultan dengan pendekatan teknokratik. Dapat dipastikan tidak pernah sebuah visi dibangun dengan kerangka logika yang kuat dan dibangun dengan pendekatan partisipatif. Karena itu, banyak skeptis menyilimuti gerakan menggagas visi bersama untuk kota tersebut. Sejak tahun 2000 itu hingga saat ini kota Palu telah memiliki sejumlah visi jangka panjang yaitu : Maju dan lestari, Kota Transit (versi CDS), kota sentra Kakao dan rotan dan yang terakhir adalah kota untuk semua.

4.1. VISI PEMBANGUNAN KOTA PALU TAHUN 2005-2025

Visi Indonesia Masa Depan (Visi RPJPN), Visi RPJPD Propinsi Sulawesi Tengah yang Maju, Mandiri, Aman, Sejahtera dan Berkeadilan, Visi RPJM Sulteng yang sejajar dengan propinsi lain di Indonesia Timur turut menginspirasi visi jangka panjang kota Palu. Pijakan vertical tersebut disublimasikan dengan kondisi lokal kota Palu melahirkan revisi visi jangka panjang kota Palu 2005 – 2025 yang pada dasarnya merupakan pandangan filosofis jauh ke depan tentang cita-cita dan harapan pemerintah dan masyarakat tentang kualitas hidup secara makro yang perlu dicapai melalui pembangunan.

Berdasarkan karakteristik biogeofisik dan sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan pertahanan keamanan kota Palu selama rentan perkembangan satu dasawarsa terakhir (2000-2010) dengan memahami berbagai isu aktual, masalah terkini, tantangan, ancaman dan gangguan pengembangan selama 14 tahun ke depan (2011-2025), maka pemerintah daerah bersama masyarakat bertekad kuat untuk memberdayakan secara sinergis semua kekuatan yang dimilikinya untuk mengelola masalah pembangunan yang dihadapi. Pemerintah dan masyarakat berkomitmen secara politis untuk terus menerus berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat kota Palu dalam dua sawarsa mendatang (2011-2025). Berdasarkan amanat tersebut maka visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu mengalami revisi menjadi : Kota Palu, Kota Untuk Semua Atau “*City For All*”

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota Palu Tahun 2005-2025, kemudian dijabarkan ke dalam misi dan arah

pembangunan jangka panjang., strategi yang diintegrasikan dengan kondisi daerah, peluang, dan tantangan,serta rumusan permasalahan, guna mencapai tujuan pembangunan kota palu.

Sebagai sebuah Visi, apalagi yang bersifat makro jangka panjang, tentu saja masih bersifat umum, abstrak dan tidak langsung, namun demikian visi tersebut berada dalam konteks karakteristik spesifik Kota Palu. Visi ini akan diterjemahkan mengikuti kata kuncinya (*state of vision*) yang hanya bersifat tunggal yaitu “untuk semua”. Kata kunci tersebut merupakan jargon dan digunakan dalam perencanaan pembangunan sebagai konsep yang artikulasinya, pengukuran atau pendugaan dan interpretasinya menggunakan indikator. Konsep tersebut berkedudukan sebagai bagian integral visi yang mengandung pengertian bahwa keberhasilan pembangunan jangka panjang di kota palu dalam berbagai bidang dan aspek harus memenuhi ukuran capaiannya pada pertumbuhan ekonomi dan kemandirian dalam interaksi dan interkoneksi secara lokal, regional, nasional dan global. Selain itu, juga dicapai dan dinikmati dengan adil baik secara sosial, ekonomi, politik, budaya serta memperhatikan aspek lingkungan hidup dan bencana..

Oleh karena itu maka kemajuan dalam arti terjadi perubahan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan masyarakat adalah kemajuan yang berkeadilan dan berkelanjutan yang diuraikan dalam bentuk point point sebagai berikut :

1. Kota yang dapat melayani warganya secara adil .
2. Kota yang aman, tertib, bersih, sejuk dan layak di tempati.
3. Kota dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat mensejahterakan warganya.
4. Kota yang terbuka dan membahagiakan bagi yang datang dan yang menetap
5. Kota yang harmoni dalam keberagaman.
6. Kota yang menjunjung tinggi dan menghormati perbedaan antara sesama umat beragama, antar etnis dan antar budaya.

Cat : poin lanjutan infrastruktur kota tata ruang dn lingk hidup serta pertumbuhan ekonomi kota

4.2. MISI PEMBANGUNAN KOTA PALU TAHUN 2005-2025

Berdasarkan visi dan pernyataan visinya serta isu strategi, potensi dan masalah maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah kota Palu sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokrasi.
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, bermartabat, mandiri dan agamis bertumpuh pada sektor perdagangan, pariwisata dan industri.
3. Mewujudkan kota Palu sebagai kota Ekologis.

Misi tersebut dapat dicapai melalui satuan-satuan pengukuran yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pada tingkat manajemen pengelolaan pembangunan digunakan tingkat realisasi anggaran sebagai indikator keberhasilan, tetapi indikator ini tidak mengungkap perubahan pada kelompok sasaran program, kecuali hanya mengasumsi perubahan.

Pengukuran kemajuan dilakukan pada indikator dari karakter faktor yang diduga. Kemajuan masyarakat dalam bidang politik antara lain diukur dari kualitas kehidupan berdemokrasi baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Sementara keefektifan dan kesehatan kehidupan perpolitikan lembaga struktural politik (DPRD) maupun pemerintahan selain diperlihatkan melalui produk produk legislatif yang diperdakan; juga kesuksesan masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan pembangunan. Hal ini merupakan cita cita dari tata pemerintahan yang baik.

Kemajuan masyarakat dalam bidang ekonomi antara lain diukur pada indikator perubahan meningkat kualitas kesejahteraan, peningkatan dan distribusi PDRB menurut kelompok penerima pertumbuhan; tingkat pendapatan per kapita; daya beli masyarakat; kemajuan industri manufaktur yang diterangkan oleh sumbangan IPTEK; tingkat pengangguran; indeks kemiskinan yang semakin menurun karena kontribusi sektor utama perdagangan, pariwisata dan industri..

Peningkatan kualitas kesejahteraan juga dapat diduga berdasarkan intensitas benturan dan friksi sosial; kualitas rumah berdasarkan bahan lantai terluas; atap terluas dan dinding terluas; kualitas mobilitas geografi, termasuk tingkat konsumsi informasi; penguasaan faktor-faktor status yang memungkinkan masyarakat mengalami mobilitas sosial dalam strata sosial; kerukunan umat beragama.

Kemajuan masyarakat dalam bidang sosial antara lain diukur berdasarkan indikator peningkatan nilai tambah fungsi modal sosial meliputi peningkatan modal manusia (*human capital*) berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat daya saing masyarakat berdasarkan besaran nilai rerata dan kumulatif tingkat pendidikan; Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar, jumlah produk IPTEK yang dipatenkan; tingkat daya saing masyarakat, tingkat mobilitas sosial, tingkat konsumsi energi dan informasi, kecepatan transformasi sosial dan fungsional.

Kemajuan sosial menurut aspek demografi diukur dari penurunan angka kematian, kelahiran dan pertumbuhan penduduk, penurunan tingkat pengangguran, penurunan jumlah dan kualitas patologi sosial yang diterangkan oleh perubahan aspek demografi; perubahan persepsi lokalit masyarakat; peningkatan terpaan media komunikasi sebagai penduga tingkat konsumsi informasi.

Kemandirian suatu masyarakat dan pemerintah diukur dari tingkat ketergantungan terhadap kekuatan perubahan baik internal maupun eksternal. Ketergantungan pada sumber dana eksternal menunjukkan ketidakmandirian dalam ekonomi pembiayaan pembangunan. Kemandirian politik adalah kemandirian masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah politiknya sendiri.

Keadilan menunjuk pada suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat diberbagai bidang dan aspek yang tidak mengenal dan mempraktekkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap individu, kelompok, golongan, gender, strata dan wilayah. Keadilan di bidang pendidikan menunjuk pada pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pendidikan menurut jenis dan jenjang. Keadilan dalam

bidang kesehatan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota masyarakat untuk hidup sehat, untuk memperoleh pelayanan kesehatan bermutu, tepat waktu dan jumlah.

Keadilan dalam bidang hukum menunjuk pada keadaan dimana setiap subyek hukum berkedudukan sama di hadapan hukum, diperlakukan sama dihadapan hukum, kadilan yang memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak dan kewajibannya. Keadilan politik diukur dari kualitas kehidupan politik pada satuan individu aktor politik, masyarakat, partai politik dan kineja politik lembaga legislatif. Pada tingkat individu aktor politik dan masyarakat, keadilan politik menyangkut akses kekuasaan untuk seorang atau masyarakat dapat mengaktualisasi dirinya dalam kehidupan secara wajar dan bermakna. Keadilan politik harus tetap berlangsung dalam suasana demokrasi.

Pada tahun 2025, tahun akhir dari Pembangunan Jangka Panjang Daerah kota Palu harus masih menikmati kesejukan kota Palu dengan berlimpah oksigen karena RTH terjaga dan tertata, sumber sumber air tidak beralih fungsi sehingga penduduk memiliki akses memadai pada air minum. Pada waktu itu, kota ini tetap bersih dan nyaman dengan penanganan dan pemanfaatan sampah dan limbah dengan baik. Pada tahun 2025 itu, masyarakat telah terbiasa untuk berperilaku yang sangat bersahabat dengan lingkungan hidup, seperti hemat air dan energi, membuang sampah pada tempatnya dan menguapayakan sumur resapan di tiap rumah dan usaha sejenis lainnya.

5.1. Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kota Palu

Sasaran pembangunan jangka panjang adalah mewujudkan Kota Palu sebagai kota untuk semua (*city for all*). Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai visi Kota Palu untuk semua tersebut, maka sangat memerlukan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar (fisik dan social), kelembagaan pemerintahan, dan penyiapan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), maka implementasi visi-misi dalam kerangka pembangunan jangka panjang daerah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang ingin diselesaikan, tanpa mengesampingkan permasalahan yang lebih urgen lainnya. Untuk itu penekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetap berkesinambungan antar periode dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang.

Setiap saran dalam misi pembangunan jangka panjang Kota Palu ditetapkan menurut prioritas pentahapannya. Prioritas masing-masing misi dapat dipilih kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama ini mencerminkan arti strategis dan pentingnya permasalahan. Oleh karena itu Kota Palu pada akhir tahap pertama RPJMD (periode tahun 2005-2010), maka tahapan dan skala prioritas pada periode tersebut masih dilanjutkan, agar tetap berkesinambungan dengan tahapan dan skala prioritas RPJMD

tahap-tahap berikutnya. Berdasarkan tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun RPJMD sebagai berikutnya. Untuk mencapai visi Kota Palu untuk semua, maka misi yang ingin dicapai dalam 20 tahun mendatang, dituangkan kedalam sasaran yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) pencapaian strategi. Untuk mencapai itu diperlukan sinergitas antar pelaku diberbagai sector melalui aktivitas pembangunan, sebagai berikut:

1. Menciptakan Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan, melalui:

- Peningkatan Reformasi Birokrasi melalui deregulasi, debirokatisasi dan pembentukan karakter birokrat yang bersih dan berwibawa.
- Pengelolaan Administrasi Publik berbasis *Database* dan IT (Informasi dan Teknologi).
- Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah.
- Peningkatan kapasitas dan sinergitas rukun tetangga (RT) / rukun warga (RW), Kelurahan dan Kecamatan.
- Perencanaan program Pembangunan yang terintegrasi, komprehensif, sinergis, partisipatif dan akuntabel.
- Penguatan Kapasitas aparatur dan kelembagaan kota melalui bimbingan teknis, pelatihan dan pendidikan lanjutan.
- Peningkatan kapasitas warga kota untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kota palu

2. Menyediakan Pelayanan Publik yang Layak dan Terjangkau, melalui:

- Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil untuk mewujudkan rencana pembangunan yang efektif dan efisien
- Meningkatkan akses pendidikan dan Layanan Kesehatan yang berkualitas.
- Penyediaan layanan publik dan Jaminan Sosial bagi kelompok masyarakat tidak mampu (anak-anak, lansia dan cacat).
- Peningkatan Pengelolaan Persampahan yang efektif dan efisien.

- Peningkatan akses transportasi yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat.
- Peningkatan pasokan energi Listrik yang memadai melalui diversifikasi sumber-sumber alternatif.
- Peningkatan kualitas air bersih yang sehat, aman dan memadai.

3. Menyediakan kebutuhan Dasar masyarakat, melalui:

- Tersedianya pangan yang berkualitas, cukup dan terjangkau.
- Tersedianya Perumahan yang cukup dan layak huni.
- Tersedianya informasi kesempatan kerja dan lapangan kerja

4. Persamaan hak, kedudukan dan Penegakan Hukum, melalui:

- Implementasi Peraturan daerah sebagai wujud penegakan kewibawaan hukum.
- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (stekholder) melalui Penyuluhan, pendampingan dan Advokasi,
- Peningkatan rasa keadilan dan kesetaraan gender melalui pengarus utamaan gender
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan.
- Pembentukan kesadaran hukum dan etika sosial sejak usia dini

5. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi perkotaan melalui:

- Penciptaan iklim investasi yang kondusif disektor perdagangan, pariwisata dan industri melalui pengendalian faktor-faktor penyebab ekonomi biaya tinggi
- Penyediaan infrastruktur ekonomi yang kompetitif di sektor perdagangan, pariwisata dan industri.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin kota melalui penguatan ekonomi informal, pariwisata dan industry kreatif.

- Peningkatan peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Menengah Berbasis Sumberdaya Lokal melalui peningkatan iklim usaha dan akses permodalan
- Promosi terhadap produk unggulan dan potensi daerah sebagai identitas kota
- Pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif dan efisien.
- Peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Peningkatan Kerjasama Ekonomi regional, nasional dan internasional.

6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertumpuh pada potensi lokal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, melalui:

- Penciptaan SDM yang menguasai teknologi tepat guna yang mampu mengolah potensi lokal.
- Penciptaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing di pasar kerja.
- Pengembangan budaya produktif yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa dan agamis.
- Penciptaan SDM yang berkarakter dan memiliki kepekaan sosial melalui penerapan kurikulum berbasis budaya lokal di semua jenjang pendidikan
- Meningkatkan kualitas SDM Tenaga pendidik melalui bimbingan teknis, pelatihan dan pendidikan lanjutan

7. Mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan serta meminimalkan Resiko Bencana, melalui:

- Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.
- Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.
- Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas dan Sekolah.

- Pengelolaan tata ruang yang konsisten dan partisipatif dengan mempertahankan dan menciptakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dan terlindungnya sumber-sumber mata air.
- Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi SDA khas kota Palu.
- Peningkatan kapasitas pemerintah dan peran masyarakat dalam penegelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup

5. 2. Arah Pembangunan Daerah Kota Palu

Untuk mencapai visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005–2025, melalui tahapan dan skala prioritas pemerintah Kota terekam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) guna menjawab berbagai permasalahan yang hendak diselesaikan secara terencana, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Ada pun tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan pentingnya permasalahan yang harus diselesaikan dengan tidak mengabaikan kompleksitas permasalahan lainnya. Fokus dan skala prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun seluruhnya tetap dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya dalam kerangka pencapaian visi, misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu. Hal tersebut dilakukan hubungannya dengan berbagai keterbatasan sumberdaya pembangunan yang dimiliki Kota Palu, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tersebut perlu dilaksanakan melalui tahapan dan skala prioritas yang direncanakan sebagai berikut:

5.2.1. RPJM Daerah Kota Palu Tahap Pertama Tahun 2005-2010

Mengacu pada pencapaian hasil-hasil pembangunan Kota Palu periode sebelumnya, maka pembangunan Kota Palu pada tahap ini

guna mendukung pencapaian visi: "Terwujudnya pembangunan Kota Palu untuk Semua", dibutuhkan *Masterplan* Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik dengan memperhatikan keserasian dan kelestarian lingkungan.

Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap pertama pembangunan jangka panjang Kota Palu yaitu: Tersedianya *masterplan* dan ketersediaan Infrastruktur Perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan memperhatikan keserasian dan kelestarian lingkungan.

Indikator kinerja utamanya adalah: Tersedianya *masterplan* kawasan pusat industri, perdagangan, pariwisata, dan pelayanan publik dengan segala fasilitas kemudahan yang terkait, dengan memperhatikan keserasian dan kelestarian lingkungan.

Hasil yang diharapkan dicapai pada pembangunan tahap pertama RPJPD Kota Palu, atau diakhir tahun RPJMD tahap pertama (2010) adalah: Di masing-masing wilayah Kecamatan telah tersedia *masterplan* kawasan terpusat perdagangan dan industri, pariwisata, serta segala fasilitas untuk kemudahan pelayanan publik, dengan memperhatikan keserasian dan kelestarian lingkungan.

Kondisi ini tercapai bila Kota Palu memenuhi kriteria aman dan damai melalui tertanganinya berbagai kerawanan. Kota Palu yang aman didukung oleh suasana demokratis yang ditandai dengan meningkatnya keadilan dan penegakan hukum dan terciptanya landasan hukum untuk memperkuat kelembagaan demokrasi. Bersamaan dengan itu, pelayanan kepada masyarakat makin membaik; serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota Palu dibuktikan dengan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan sejalan

dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi; kualitas SDM yang meningkat dan membaiknya pengelolaan SDA dan mutu lingkungan hidup. Kondisi itu dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yg lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur dan peran swasta terutama untuk sektor transportasi, energi dan kelistrikan, serta komunikasi.

Peningkatan kualitas SDM, antara lain, ditandai oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun bangsa yang berwatak cerdas. Peningkatan watak dan perilaku warga kota Palu yang beragama, toleran dan hermoni dalam keberagaman, bergotong-royong, dan berorientasi iptek; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak.

Bersamaan dengan hal tersebut. Membaiknya pengelolaan SDA diikuti dengan meningkatnya mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi kota palu yang rawan bencana dan spirit untuk menjadikan kota ini sebagai kota ekologis. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup dan keadaan wilayah yang rawan bencana sehingga makin peduli dan antisipatif. Kondisi ini ditunjang pengembangan kapasitas kelembagaan dan pemerintahan dalam penanggulangan bencana serta diacunya rencana tata ruang secara hierarki sebagai payung kebijakan spasial semua sektor dalam rangka mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup.

5.2.2 RPJM Daerah Kota Palu Tahap Kedua Tahun 2010-2015

Pada tahap kedua ini diharapkan Penataan, dan penyediaan Infrastruktur perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan public, semakin baik dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap kedua pembangunan jangka panjang Kota Palu yaitu: Tersedianya Infrastruktur Perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan menjaga kelestarian lingkungan.

Indikator kinerja utamanya adalah: Tersedianya kawasan pusat industri, perdagangan, pariwisata, dan pelayanan publik dengan segala fasilitas kemudahan yang terkait, dengan menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil yang diharapkan dicapai pada pembangunan tahap kedua RPJPD Kota Palu, atau diakhir tahun RPJMD tahap kedua (2015) adalah: Di masing-masing wilayah Kecamatan telah tersedia kawasan pusat perdagangan dan industri, pariwisata, serta segala fasilitas untuk kemudahan pelayanan publik, dengan menjaga kelestarian lingkungan.

Kondisi aman dan damai di kota palu semakin membaik sejalan meningkatnya kesejahteraan dan keadilan. Keamanan yang makin kondusif juga sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum. Kehidupan warga yang makin demokratis ditandai dengan semakin kuatnya peran masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Selain itu, kualitas pelayanan publik lebih terjangkau, cepat, transparan, dan akuntabel melalui penerapan standar pelayanan minimum.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan perkotaan antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka

kemiskinan dan pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender; terkendalinya pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di kota palu dan jaringan kerja sama antar daerah (KAPET PALAPAS).

Meningkatnya daya saing perekonomian melalui penguatan sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Optimalisasi pemanfaatan SDA secara terpadu melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat. Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi; peningkatan pemanfaatan energi alternatif; serta perlindungan dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri perikanan, wisata bahari dikembangkan secara berkelanjutan.

Dalam kerangka pencapaian kota ekologis dan pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan kesadaran masyarakat. Indikatornya adalah berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi SDA dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan SDA kota palu termasuk perlindungan dan pengembangan sumber sumber air; mantapnya kelembagaan dan kapasitas penanggulangan bencana; Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas RTRW serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

5.2.3 RPJM Daerah Kota Palu Tahap Ketiga Tahun 2015 - 2020

Pada tahap ketiga ini diharapkan terjadinya ***Peningkatan kualitas Infrastruktur perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.***

Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap ketiga pembangunan jangka panjang Kota Palu yaitu: ***Meningkatnya kualitas Infrastruktur Perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.***

Indikator kinerja utamanya adalah: ***Tersedianya kawasan pusat industri, perdagangan, pariwisata, dan pelayanan publik yang berkualitas, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.***

Hasil yang diharapkan dicapai pada pembangunan tahap ketiga RPJPD Kota Palu, atau diakhir tahun RPJMD tahap ketiga adalah: Di masing-masing wilayah Kecamatan telah memiliki kawasan pusat perdagangan dan industri, pariwisata, serta segala fasilitas yang berkualitas untuk kemudahan pelayanan publik, dengan tidak mengabaikan persoalan lingkungan.

Hal hal tersebut didukung oleh kondisi aman dan perdamaian yang makin mantap dan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi dan nondiskriminasi. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek berkembang makin mantap serta makin meningkatnya profesionalisme aparatur dalam bingkai tata kelola pemerintahan yang baik.

Kesejahteraan masyarakat terus membaik dan merata didukung oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik dengan indikator meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung manajemen

pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Daya saing perekonomian kota Palu semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya sektor perdagangan, pariwisata dan industri dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, IPTEK dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang; terpenuhinya pasokan tenaga listrik hingga ke tingkat elektrifikasi rumah tangga,; terwujudnya konservasi dan pengembangan sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pemukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap menuju kota ekologis dicerminkan oleh indikator terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan dan semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang serta meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.

5.2.4 RPJM Daerah Kota Palu Tahap Keempat Tahun 2020 - 2025

Pada tahap keempat ini diharapkan Kota Palu telah memiliki kawasan perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik, yang mampu memberi daya saing, dengan kualitas lingkungan yang terjaga.

Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap keempat pembangunan jangka panjang Kota Palu yaitu: Kawasan Perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang memiliki daya saing, dengan kualitas lingkungan yang terjaga dan lestari.

Indikator kinerja utamanya adalah: Tersedianya kawasan pusat industri, perdagangan, pariwisata, dan pelayanan publik yang memiliki daya saing, dengan kualitas lingkungan yang terjaga dan lestari.

Hasil yang diharapkan dicapai pada pembangunan tahap keempat RPJPD Kota Palu, atau diakhir tahun RPJMD tahap keempat (2024) adalah: Di masing-masing wilayah Kecamatan telah memiliki kawasan pusat perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan public yang berkualitas dan berdaya saing, dengan kualitas lingkungan yang terjaga dan lestari.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta dengan indikator terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh warga kota palu;; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi yang mandiri.

Kesejahteraan masyarakat terus meningkat ditandai makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya SDM berkualitas

dan berdaya saing, antara lain ditunjukkan oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan, makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; dan terwujudnya kesetaraan gender;

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan mantapnya keterpaduan antara sektor perdagangan, pariwisata, industri sumber daya alam, dan sektor jasa. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; Sejalan dengan itu, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin makin rendah. Kondisi kota untuk semua makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi dan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat; tercapainya elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan dan misi kota palu sebagai kota ekologis mak keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan sesuai kaidah konservasi. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan. Masyarakat dengan demikian sangat peduli, sigap dan antisipatif dalam pengelolaan SDA serta mitigasi bencana.

5.3. Tantangan Pembangunan Kota Palu

5.3.1. Tantangan Ekonomi

- a. Kota Palu 20 tahun ke depan akan menghadapi jumlah penduduk semakin bertambah terutama tenaga kerja terdidik. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan daya saing, dan kesejahteraan. Disamping itu, persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk di pusat Kota Palu dapat dikurangi.
- b. Posisi strategis kota Palu sebagai salah satu kota di selat makasar harus mengantisipasi peluang manfaat dari meningkatnya volume perdagangan melalui lalu lintas laut terutama dengan menggunakan jenis kapal dengan tonase yang besar (*ultra cargo carrier*).
- c. Pembangunan ekonomi Kota Palu sampai saat ini, telah menghasilkan berbagai kemajuan, meskipun masih jauh dari cita-cita untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Tantangannya 20 tahun kedepan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- d. Kemajuan ekonomi Kota Palu perlu mendapat dukungan dari potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Untuk itu perlu kemandirian untuk mempertahankan kedaulatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi berdaya saing. Dengan pemahaman itu tantangan utama kemajuan ekonomi Kota Palu ke depan adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien melalui praktek ekonomi yang baik dan sehat, serta prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar di Kota Palu.
- e. Persoalan kemiskinan kota menjadi tantangan Kota Palu kedepan, untuk itu kemiskinan perlu diubah menjadi potensi yang dapat

mendukung perekonomian Kota Palu, sekaligus untuk mensejahterakan kalangan miskin kota. Ditandai dengan terwujudnya kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan tempat penghunian yang layak.

5.3.2. Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing

- a. Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang di sebut dengan sumber daya (*resources*), baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Kedua sumberdaya tersebut sangat penting dan menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Jumlah penduduk yang besar adalah modal dasar pembangunan, namun kalau tidak diarahkan dan tingkatkan kualitasnya, maka akan menjadi penghambat pembangunan. Trend pertumbuhan penduduk kota Palu mengisyaratkan perlu peningkatan sumberdaya manusia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan iptek. Implementasinya harus mengacu kepada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal menuju kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, sejahtera, maju dan kokoh dalam kekuatan moral dan cita-citanya
- b. Cita-cita, tujuan, dan sasaran pembangunan hanya dapat dicapai apabila institusi yang ada mampu menggerakkan segala potensi daerah yang tersedia dan peniadakan berbagai hambatan. Kemampuan institusi akan meningkat apabila sumberdaya manusia yang menjalankan dan menggerakkannya mempunyai kemampuan yang memadai. Dengan demikian peningkatan sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat merupakan ujung tombak dari semua Program Pembangunan.kota Palu.
- c. Penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan harus dijadikan program penting dalam menjamin pembangunan yang berkelanjutan, karena kemiskinan selain akan menjadi beban pertumbuhan juga akan menjadi penyebab degradasi sumberdaya alam – lingkungan hidup. Di lain pihak, kemiskinan juga dapat terjadi akibat degradasi kualitas SDA-LH dan pemutusan akses masyarakat terhadap sumberdaya milik bersama (*common property resources*). Karena itu pengelolaan

sumberdaya alam secara lestari merupakan upaya penting dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan.

- d. Dalam era globalisasi, kualitas sumberdaya manusia yang handal akan sangat membantu suatu bangsa untuk memenangkan kompetisi atau persaingan dalam perekonomian global sekaligus dapat menjaga eksistensi negara tersebut dalam percaturan dan dinamika perekonomian regional dan global yang semakin kompetitif.
- e. Kuatnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi menjadi tantangan Kota Palu untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa dan sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal.
- f. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan kedepannya adalah pembangunan dan aplikasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan.

5.3.3. Degradasi Lingkungan dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan.

- a. Dalam sebagian kehidupan masyarakat dan budaya perkotaan telah berkembang gaya hidup konsumtif, karena sebagian besar mereka tidak lagi mengkonsumsi berdasarkan nilai guna, nilai pakai, tetapi sesuatu yang hanya merupakan “simbol” di mana image atau citra menjadi sangat penting. Permasalahan lingkungan seperti pencemaran, degradasi lahan kritis, dan kelangkaan sumberdaya alam akan cenderung berkembang sebagai dampak dari pola produksi/ industri dan konsumsi yang berlebihan
- b. Perkembangan kota melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik disatu sisi merupakan simbol kemajuan peradaban manusia. Namun disisi lain menimbulkan berbagai dampak negatif yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas

lingkungan. Kondisi ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya persoalan lingkungan di perkotaan seperti peningkatan suhu dan tingkat polusi udara berupa produksi karbondioksida (CO_2) dan menurunnya produksi oksigen (O_2) di udara. Palu sebagai kota lembah yang panas dan kering akan menjadi sangat beresiko kumulatif dengan emisi dan polusi akibat pencemaran.

- c. Untuk mengimbangi pesatnya pembangunan fisik kota, penerapan konsep hutan kota dalam perencanaan tata ruang berupa jalur hijau, taman kota, tanaman perkarangan, diharapkan dapat meningkatkan produksi oksigen, menjaring partikel debu dan partikel lainnya. Kondisi ini akan meningkatkan kenyamanan warga untuk tinggal di Palu. Sebagai Kota yang berada di garis khatulistiwa yang panas mengisyaratkan kebutuhan ruang terbuka hijau seluas mungkin agar membuat Kota Palu menjadi lebih teduh dan nyaman. Selain itu, meningkatnya ruang terbuka hijau diharapkan secara mikro dapat mereduksi dampak anomai iklim, seperti, banjir dan tanah langsor serta kehilangan harta beda masyarakat dan secara makro dapat berkontribusi sebagai paru-paru dunia dan mereduksi ancaman "*global warming*".
- d. Salah satu tantangan pembangunan berkelanjutan bagi Kota Palu, adalah usaha pertambangan emas di Poboya. Berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan berbagai pihak, usaha ini menjadi salah satu penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal ini karena sebagian besar pengolahan bijih emas dilakukan dengan proses amalgamasi, dimana merkuri (Hg) digunakan sebagai media untuk mengikat emas. Mengingat sifat merkuri yang berbahaya, maka penyebaran logam ini perlu diawasi agar penanggulangannya dapat dilakukan sedini mungkin secara terarah. Selain itu, untuk menekan jumlah limbah merkuri, maka perlu dilakukan perbaikan sistem pengolahan yang dapat menekan jumlah limbah. Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka diperlukan upaya pendekatan melalui penanganan tailing atau limbah B3 yang berwawasan lingkungan. .

- e. Daerah Poboya merupakan kawasan penting di Kota Palu karena merupakan *water catchment area* (daerah tangkapan air) bagi ratusan ribu masyarakat kota Palu termasuk PDAM yang menyuplai kebutuhan air bersih warga. Selain itu, berkurangnya debit air sungai Poboya dan Kawatuna akibat penggunaan air oleh mesin-mesin pengolahan emas telah mengorbankan sumber-sumber pendapatan dan mata pencaharian masyarakat sekitar, sehingga banyak yang beralih profesi. Krisis air ini telah mematikan sumber kehidupan para petani bawang, padi dan sayur mayur yang sangat bergantung pada pasokan air sungai ini. Poboya yang dahulunya merupakan kawasan pertanian dengan hamparan sawah, ladang dan kebun-kebun masyarakat, kini dipenuhi dengan mesin-mesin tromol pengolah emas dan lubang-lubang menganga bekas galian para penambang.
- f. Keprihatinan dan kekhawatiran rusaknya lingkungan dan ancaman pencemaran terhadap keselamatan warga Kota Palu. Data dan fakta-fakta dampak negatif pertambangan emas di kawasan tersebut saat ini telah mengindikasikan kecenderungan terjadinya hal ini, antara lain: tingkat pencemaran merkuri, tanah longsor, perubahan bentang alam, konflik sosial dan tanah. Selain itu, masalah keselamatan kerja dan kesehatan pada usaha pertambangan rakyat sering diabaikan. Pertambangan-pertambangan yang demikian termasuk pertambangan tanpa izin (PETI) biasanya mempunyai keterbatasan ekonomi/permodalan, pendidikan/pengetahuan dan keterampilan sehingga kalau tidak diatur dan diarahkan akan berdampak luas bagi warga kota Palu dimasa yang akan datang

5.3.4. Demokratisasi, Sosial dan Penegakan Hukum

- a. Proses demokratisasi telah mendorong antusias masyarakat berpolitik melalui organisasi partai politik seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kritis. Adanya tuntutan keterbukaan dalam wadah partisipasi politik rakyat serta munculnya berbagai bentuk asosiasi masyarakat sipil dalam bentuk ormas, lembaga swadaya masyarakat maupun forum forum lainnya, menjadi model yang sangat

penting. Masyarakat (*civil society*) yang kuat akan dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu penguatan kelembangaan menjadi tugas bersama sebagai langkah mempercepat masyarakat madani.

- b. Pembangunan sosial masih dihadapkan pada permasalahan penyandang masalah sosial seperti, kemiskinan, anak terlantar, gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan wanita rawan sosial ekonomi. Meningkatnya anak terlantar dan anak jalanan akan memicu meningkatnya kerawanan khususnya di wilayah padat penduduk.
- c. Di bidang ketentraman dan ketertiban umum, rasa aman merupakan kebutuhan bersama dengan lebih mengedepankan peran masyarakat dan aparat keamanan. Pemerintah Kota Palu sesuai dengan kewenangannya harus menjaga dan mencegah peluang terjadinya konflik yang bernuansa pada disintegrasi sosial. Untuk itu, perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan pemahaman HAM serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak kejahatan..
- d. Pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satunya hal yang urgen dalam menjamin kenyamanan warga sebagaimana konsep Palu sebagai kota untuk semua. Langkah-langkah perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Palu, antara lain: 1) Meningkatkan kerja sama dengan para penegak hokum dalam penegakkan supremasi hukum; 2) Meningkatkan kemampuan daya tangkal masyarakat yang tangguh, baik di pemukiman maupun di tempat kerja; 3) Peningkatan kapasitas Polisi Pamong Praja, melalui pembinaan dan Pemberdayaan Linmas dan Penanggulangan Bencana; 4) Membentuk wadah koordinasi seluruh kegiatan penanggulangan narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Aditif serta Kenakalan Remaja.
- e. Di Bidang hukum, diperlukan. Produk hukum seperti Peraturan Daerah yang merupakan implementasi dari otonomi daerah dapat mencerminkan aspirasi kebutuhan masyarakat Kota Palu, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dibutuhkan langkah kebijakan Pemerintah Kota Palu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memberikan kepastian hukum dan ketentraman dalam kehidupan.

5.3.5. Pengembangan Infrastruktur Perkotaan dan Tataruang Berkelanjutan

- a. Seperti juga kota lain, perkembangan Kota Palu dengan mobilitas yang begitu tinggi menimbulkan dan meninggalkan permasalahan-permasalahan kompleks. Hampir semua warga kota bergerak dan melakukan mobilisasi massal menuju tempat beraktifitasnya masing-masing. Fenomena kemacetan dan kesemerawutan di tempat tertentu mulai nampak sehingga butuh antisipasi kedepan..
- b. Pertumbuhan dan pengembangan suatu wilayah seperti kota Palu dilatar belakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu dan teknologi, dinamika ekonomi, perkembangan jaringan komunikasi-transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan menurunkan kualitas kehidupan warga Kota Palu.
- c. Kemajuan ekonomi membawa dampak pada intensitas aktivitas sosial ekonomi dan luas wilayah pengembangan perkotaan dan kecenderungan serupa akan terus terjadi. Peningkatan jumlah pergerakan terjadi yang ditimbulkan oleh berkembangnya aktivitas dan taraf hidup masyarakat menuntut penambahan prasarana pelayanan public yang lebih baik. .
- d. Kota yang menganut paradigma pembangunan berkelanjutan dalam rencana tata ruangnya merupakan suatu kota yang nyaman bagi penghuninya, di mana akses ekonomi dan sosial budaya terbuka luas bagi setiap warganya untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan interaksi sosial warganya serta kedekatan dengan lingkungannya. Namun masih banyak masalah dan kendala dalam implementasinya dan menimbulkan berbagai konflik kepentingan antar

pemerintah (*public sector*), pengusaha (*private sector*), profesional (*expert*), ilmuwan, lembaga swadaya masyarakat, wakil masyarakat, dan segenap lapisan masyarakat.

- e. Konflik yang terjadi antara sektor formal dan informal atau sektor modern dan tradisional sering sangat tajam; proyek "*urban renewal*" sering diplesetkan sebagai "*urban removal*"; fasilitas publik seperti taman kota harus bersaing untuk tetap eksis dengan bangunan komersial; serta bangunan bersejarah berganti dengan bangunan modern dan minimalis karena alasan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, maka kota bukanlah menjadi tempat yang nyaman bagi warganya. Oleh karena itu, perlu ada kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan yang diterapkan dalam pengelolaan tata ruang di Kota Palu agar impian masyarakat kota Palu sebagai kota yang nyaman sebagaimana salah satu filosofi dari "*Kota Untuk Semua (City for All)*" dapat terwujud.

6.1. Penyelenggaraan

1. Dokumen RPJPD Kota Palu tahun 2005-2025 memuat prinsip rencana strategi pembangunan Kota Palu setiap lima tahun sekaligus menjadi dasar penyusunan visi dan misi serta program bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilu kada sesuai dengan tahapan dan prioritas yang ditetapkan.
2. Pencapaian sasaran strategis tahun 2005 –2025 ditetapkan dalam beberapa kebijakan strategis yang terkait dengan RPJPD Kota Palu Tahun 2005 –2025.
3. Sasaran strategis RPJPD Kota Palu Tahun 2005 –2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota Kota Palu. Dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kota, para Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Setiap unit kerja agar menjabarkan RPJPD Kota Palu Tahun 2005 – 2025 pada unit kerjanya masing-masing sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
5. Upaya pencapaian sasaran strategis RPJPD Kota Palu Tahun 2005 – 2025 dilaksanakan melalui berbagai tahapan sesuai dengan RPJPD Kota Palu Tahun 2005 –2025 dengan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu dan pusat, serta masyarakat/swasta.
6. Pengukuran indikator kinerja dan kebijakan dan program dievaluasi berdasarkan bobot pencapaian yang tercantum dalam RPJPD Kota Palu Tahun 2005 –2025. Sementara capaian pengukuran indikator

kinerja kegiatan dievaluasi berdasarkan RPJPD Kota Palu Tahun 2005 –2025.

6.2. Organisasi Pelaksanaan dan Sumber Pembiayaan

Efektifitas penyelenggaraan RPJPD Kota Palu Tahun 2005 –2025 disusun dalam bentuk struktur organisasi pelaksanaan yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Palu. Sedangkan sumber dana untuk menjalankan RPJPD Kota Palu Tahun 2005 –2025 berasal dari sumber-sumber penerimaan APBD Kota Palu yang terdiri dari PAD, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum prinsip-prinsip aspek pembiayaan RPJMD Tahun 2005-2025 ini antara lain :

- a. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- b. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta
- c. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta.

Mewujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan pembiayaan daerah maupun upaya-upaya peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah, terus menerus dilakukan secara berkesinambungan antara lain :

- 1. Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Daerah**
 - a. Peningkatan penggalan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.
 - b. Optimalisasi dana perimbangan, dana dekonsentrasi serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat.

- c. Peningkatan kemampuan pembiayaan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
- d. Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai insentif dalam penanaman modal.
- e. Pendayagunaan potensi pinjaman dan obligasi daerah serta peningkatan skim pembiayaan.

2. Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Perencanaan APBD yang efisien dan efektif baik belanja aparatur maupun belanja pelayanan publik.
- b. Transparansi APBD.
- c. Kerjasama pembangunan, baik antar Pemda dan antar negara, dengan masyarakat dan swasta, maupun lembaga-lembaga donor.
- d. Privatisasi berbagai pelayanan publik.
- e. Revitalisasi aset-aset Pemda.
- f. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah.
- g. Penetapan Standar Analisis Belanja (SAB) dengan tepat.

6.3. Evaluasi Indikator Kinerja

Evaluasi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan atau program atau kebijakan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali secara dini penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan dari rencana, dan kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Tujuan RJPD dapat dipahami sebagai akibat akhir dari seluruh upaya pembangunan selama 25 tahun. Strategi RPJPD pada dasarnya adalah pilihan sebab akibat secara sistematis dilakukan dan asumsi-asumsi yang diharapkan tersedia, agar tujuan RPJPD tercapai. Evaluasi dilakukan dengan cara menetapkan indikator-indikator kinerja yang menggambarkan secara tepat keadaan-keadaan sebab dan akibat dalam strategi pembangunan. Indikator kinerja merupakan besaran-besaran yang dapat diukur dengan relatif mudah dan murah, yang mencerminkan keadaan-keadaan sebab akibat.

Indikator kinerja memiliki hirarkhi yang berbeda. Di tingkat Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor atau Institusi Pemerintah lainnya, besaran-besaran RPJPD hanya bersifat taktis bagi Walikota. Karena penyelenggaraan pembangunan memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengukuran kinerja itu, perlu dikembangkan dokumen-dokumen yang dipakai untuk mencatat pencapaian kinerja yang disepakati. indikator-indikator kinerja yang dipilih adalah indikator-indikator kinerja pencapaian tujuan, sasaran, dan hasil-hasil pembangunan. Ketiga sasaran itu adalah komponen strategi RPJPD. Selanjutnya instansi/dinas pemerintah Kota Palu perlu menyusun Matriks RPJPD instansinya, yang menempatkan program serta kegiatan sebagai besaran RPJPD. Standar kinerja adalah besaran-besaran target yang harus dicapai untuk setiap indikator kinerja yang dipilih. Standar kinerja tersebut dapat dinyatakan sebagai batas bawah (*lower bound target*) yang masih dapat diterima, atau batas atas (*upper bound target*) yang masih dapat diterima.

Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam PJPD Kota Palu penting artinya untuk dilaksanakan minimal sekali dalam lima tahun untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Selanjutnya evaluasi dengan umpan balik hasil pelaksanaan bermanfaat dalam perumusan langkah-langkah perbaikan. Pengukuran tingkat kinerja dalam evaluasi meliputi; pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran kinerja program, dan pengukuran kinerja kebijakan. Dalam pengukuran kinerja, terdapat langkah-langkah pengukuran sebagai berikut

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja meliputi; masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

2. Penetapan Pencapaian Kinerja

Penetapan pencapaian kinerja, dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang

ada. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada unit kerja lingkup Pemerintah Kota Palu di dalam menjabarkan kebijakan dan program yang sudah ditetapkan dalam bentuk kegiatan pada masing-masing instansi yang bersangkutan.

Untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan ada beberapa rumus yang digunakan dalam penghitungan capaian indikator kinerja, yaitu :

- a. Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik, maka untuk penghitungan capaian indikator kinerja digunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- c. Nilai capaian indikator kinerja :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Capaian indikator kinerja} \times \text{bobot indikator kinerja}}{100 \%} \times 100 \%$$

Setiap kegiatan dalam program pembangunan mempunyai bobot kumulatif yang sama yaitu 100 % untuk pelaksanaan kegiatan. Proyeksi penentuan bobot setiap tahun bersifat proporsional dengan batas maksimal 25 tahun. Sebagai contoh, untuk kegiatan yang hanya dilaksanakan 5 tahun, maka bobot setiap tahun adalah 20 %. Pada kegiatan yang memerlukan waktu 25 tahun, maka bobot setiap tahunnya adalah 4 %. Penilaian kinerja kegiatan terdiri dari masukan,

keluaran, hasil, manfaat, dampak, yang masing-masing bernilai 1 sampai 20. Penilaian kinerja kegiatan kumulatif berjumlah 100.

Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil indikator-indikator kinerja, tetapi harus menyajikan data dan informasi yang relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi, serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan rinci. Disamping itu, dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinerja yang antara lain mencakup analisis *inputs*, *outputs*, analisis realisasi *outcomes* dan *benefits*, analisis *impacts* baik positif maupun negatif, dan analisis proses pencapaian indikator-indikator kinerja, analisis keuangan, dan analisis kebijakan. Analisis tersebut antara lain dilakukan dengan cara membandingkan indikator kinerja dengan realisasi sebagai berikut :

- a. Perbandingan antara kinerja nyata dan kinerja yang direncanakan.
- b. Perbandingan antara kinerja nyata dan tahun-tahun sebelumnya

Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat maka, ditetapkan standar yang berkaitan dengan penggunaan jasa layanan pemerintah, dengan memperlihatkan standar dan kendala-kendala atau tingkat kepuasan yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya, untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja suatu instansi, terutama yang sifatnya lintas sektoral, digunakan indikator-indikator ekonomi, sosial, atau indikator lainnya baik yang bersifat nasional maupun internasional, seperti misalnya: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita, tingkat inflasi, ekspor, impor, tingkat kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, tingkat kematian bayi dan Balita, tingkat kesehatan ibu dan anak, tingkat kesehatan gizi masyarakat, tingkat usia harapan hidup rata-rata penduduk, kualitas air, tanah dan udara dan lain sebagainya. Indikator pengukuran kinerja dikenakan pada setiap program dan kegiatan yang terdiri atas lima tolok ukur,

yaitu masukan, keluaran, hasil, dampak, dan manfaat, sesuai dengan : Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, Neraca Daerah, Neraca Lingkungan Hidup Daerah Laporan Pertanggung Jawaban Walikota dan Laporan masyarakat. Indicator-indikator capaian kinerja tersebut akan di jabarkan lebih rinci pada dokumen RPJMD setiap lima tahun.